

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kabupaten Muara Enim

Tahun 2007



Diterbitkan : Desember 2007
Data : Oktober 2006 - Oktober 2007



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Jl. Cut Nyak Dien No. 39 ☎ (0734) 421774

✉ bandalda@muaraenim.go.id

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya peningkatan kualitas pembangunan yang diarahkan pada perwujudan pembangunan berkelanjutan demi kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Kegiatan manusia menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan merubah kondisi lingkungannya. Masyarakat bereaksi terhadap perubahan kondisi tersebut melalui kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk dapat menyusun rencana pembangunan dalam rangka implementasi konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan informasi yang lengkap, akurat dan aktual dari berbagai aspek. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim (SoER Kabupaten) Tahun 2007 yang disusun berdasarkan pedoman umum dari Menteri Negara Lingkungan Hidup pada prinsipnya dalam rangka menyajikan seluruh data dan informasi serta dokumentasi tentang kondisi kualitas lingkungan hidup daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007.

Mengingat luas dan kompleksnya cakupan data serta informasi yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, disadari bahwa Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim (SoER Kabupaten) ini masih belum begitu sempurna. Untuk itu saran dan masukan dari semua pihak guna meningkatkan kualitas Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim ini senantiasa kami harapkan.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam mengumpulkan data dan menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga niat mulia kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT.

Muara Enim, Desember 2007

**KEPALA BAPEDALDA
KABUPATEN MUARA ENIM**



**Ir. Hj. ROSMIANI TJE'MAT, M.Ed
NIP. 130 780 727**



BUPATI MUARA ENIM

KATA PENGANTAR

Assalam u'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan baik, sesuai dengan Pedoman Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota (State of the Environment Report/SoER) yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2007.

Penyusunan Buku SLHD ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kaitan kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi lingkungan terutama berkaitan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan lingkungan. Informasi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap lingkungan dan membantu pengambil keputusan dalam menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungan hidup.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007, memuat data tentang media lingkungan (air, udara, lahan dan hutan serta keanekaragaman hayati) yang terangkum dalam Buku **KUMPULAN DATA STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH** dan menampilkan isu-isu lingkungan hidup, status dan kecenderungan lingkungan berikut rencana tindak lanjut untuk pengendalian dampak lingkungan yang terangkum dalam Buku **LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**.

Akhirnya, kepada Tim Penyusun serta semua pihak yang telah memberikan andil dan peran sertanya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Mudah-mudahan, buku ini dapat dipublikasikan secara luas, sehingga masyarakat Kabupaten Muara Enim memiliki gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai potret kondisi lingkungan, serta menjadikan Kabupaten Muara Enim yang nyaman dan lestari, yang dihuni masyarakatnya yang sejahtera lahir batin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Muara Enim, Desember 2007

BUPATI MUARA ENIM,



H. KALAMUDIN, D. SH, MH



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH

Jl. Cut Nyak Dien No. 39 ☎ (0734) 421774 ✉ bapedalda@muaraenim.go.id

MUARA ENIM

Kode Pos 31313

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya peningkatan kualitas pembangunan yang diarahkan pada perwujudan pembangunan berkelanjutan demi kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Kegiatan manusia menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan merubah kondisi lingkungannya. Masyarakat bereaksi terhadap perubahan kondisi tersebut melalui kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk dapat menyusun rencana pembangunan dalam rangka implementasi konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan diperlukan informasi yang lengkap, akurat dan aktual dari berbagai aspek. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim (SoER Kabupaten) Tahun 2007 yang disusun berdasarkan pedoman umum dari Menteri Negara Lingkungan Hidup pada prinsipnya dalam rangka menyajikan seluruh data dan informasi serta dokumentasi tentang kondisi kualitas lingkungan hidup daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007.

Mengingat luas dan kompleksnya cakupan data serta informasi yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, disadari bahwa Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim (SoER Kabupaten) ini masih belum begitu sempurna. Untuk itu saran dan masukan dari semua pihak guna meningkatkan kualitas Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim ini senantiasa kami harapkan.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam mengumpulkan data dan menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muara Enim ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga niat mulia kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT.

Muara Enim, Desember 2007

**KEPALA BAPEDALDA
KABUPATEN MUARA ENIM**

**Ir. Hj. ROSMIANI TJEMAT, M. Ed
NIP. 130 780 727**

ABSTRAK

Meningkatnya tekanan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam di Kabupaten Muara Enim telah menyebabkan kerusakan (degradasi) lingkungan semakin besar. Hal tersebut tidak akan terjadi bila masyarakat Kabupaten Muara Enim memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan.

Walaupun ekonomi membaik dan masyarakat kian sejahtera, namun bila pengelolaan lingkungan tidak diperhatikan, perbaikan ekonomi dan kesejahteraan yang diperoleh tidak akan berkelanjutan dan maksimal, karena besarnya biaya pemulihan yang harus dikeluarkan akibat dampak kerusakan maupun pencemaran lingkungan yang berpengaruh pada generasi sekarang dan yang akan datang, sehingga perlunya tanggung jawab kita bersama dalam menjaga lingkungan yang lebih baik

Berdasarkan pengamatan kondisi permasalahan di lapangan, beberapa isu utama yang menjadi persoalan sehubungan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2007 antara lain adalah (1) bencana banjir yang melanda Pendopo kecamatan Talang Ubi, (2) bencana longsor di Kecamatan Semende Darat Laut, (3) Penurunan Kualitas Air Permukaan dan (4) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam tersebut maka pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim di masa yang akan datang, akan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam (*natural resource based*) dengan mengajak investor baik dari dalam maupun luar negeri dan bersinergi dengan masyarakat setempat agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab untuk mengelola serta menjaga keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR BUPATI MUARA ENIM	i
KATA PENGANTAR KEPALA BAPEDALDA	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR KOTAK	x
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1. TUJUAN PENULISAN LAPORAN	I - 1
2. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MUARA ENIM	I - 3
3. GAMBARAN UMUM	I - 5
A. Geografis dan Topografi	I - 5
B. Wilayah Administratif Pemerintahan	I - 7
C. Keadaan Penduduk (Demografi)	I - 8
D. Pendidikan	I - 9
E. Ketenaga Kerjaan	I - 10
F. Kesehatan	I - 11
4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	I - 13
A. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup	I - 13
1. Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	I - 14
2. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan	I - 15
3. Pendanaan	I - 16
B. Kebijakan Tata Ruang	I - 17
C. Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya	I - 18
1. Kebijakan Ekonomi	I - 18
1.1. Arah Kebijakan	I - 18
1.2. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan	I - 19
a. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	I - 19
b. Pertanian dan Ketahanan Pangan	I - 19
c. Perkebunan	I - 20
d. Kehutanan	I - 21
e. Peternakan	I - 22
f. Perikanan	I - 23
g. Industri	I - 23
h. Perdagangan	I - 24
i. Koperasi	I - 24
j. Pariwisata	I - 25
2. Kebijakan Sosial Budaya	I - 26
2.1. Arah Kebijakan	I - 26
2.1. Strategi dan Prioritas dan Program Kegiatan	I - 26
a. Kependudukan dan Tenaga Kerja	I - 26
b. Pendidikan	I - 26

c. Pelayanan Kesehatan	I - 27
d. Kesejahteraan Sosial	I - 28
e. Pemuda dan Olahraga	I - 28
f. Agama	I - 29
BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA	II - 1
1. BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT	II - 1
A. Kejadian Bencana	II - 1
B. Penyebab Bencana	II - 1
C. Dampak Bencana	II - 3
D. Penanggulangan Bencana Longsor	II - 3
2. BENCANA BANJIR DI PENDOPO KECAMATAN TALANG UBI	II - 4
A. Kejadian Bencana	II - 4
B. Penyebab Bencana	II - 5
C. Dampak Bencana	II - 5
D. Penanggulangan Dampak Bencana	II - 6
E. Permasalahan Banjir di Kabupaten Muara Enim	II - 9
3. PENURUNAN KUALITAS AIR PEMUKAAN	II - 11
A. Kondisi Perairan di Kabupaten Muara Enim	II - 11
B. Tekanan / Penyebab Penurunan Kualitas Air Permukaan	II - 11
C. Dampak Penurunan Kualitas Air Permukaan	II - 13
D. Respon / Upaya Penanggulangan	II - 14
4. PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	II - 16
A. Kasus Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	II - 16
B. Tekanan / Penyebab Terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	II - 20
C. Dampak Terhadap Lingkungan	II - 22
D. Upaya / Respon Penanggulangan	II - 22
BAB III AIR	III - 1
1. KONDISI PERAIRAN	III - 1
A. Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Enim Tahun 2007	III - 2
B. Penetapan Titik Pantau	III - 14
C. Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Lematang	III - 15
D. Sumber Air Bersih Rumah Tangga	III - 16
2. TEKANAN TERHADAP SUMBER DAYA AIR	III - 17
3. DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PERAIRAN DI KABUPATEN MUARA ENIM	III - 20
4. RESPON / UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR	III - 24
BAB IV UDARA	III - 1
1. KONDISI METEOROLOGI KABUPATEN MUARA ENIM	IV - 1
A. Temperatur Udara	IV - 2

B. Kecepatan dan Arah Angin	IV - 3
C. Kelembaban dan Curah Hujan	IV - 5
2. KARAKTERISTIK SUMBER PENCEMAR UDARA YANG ADA DI KABUPATEN MUARA ENIM	IV - 8
1. Sumber Pencemar Udara Bergerak	IV - 8
2. Sumber Pencemar Udara Tidak Bergerak	IV - 10
3 DAMPAK PENCEMARAN UDARA	IV - 15
4. UPAYA PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	IV - 16
A. Pemantauan Kualitas Udara	IV - 16
1. Pemantauan Kualitas Udara Ambien	IV - 16
2. Pemantauan Kualitas Udara Emisi	IV - 20
B. Pengendalian Kualitas Udara	IV - 23
1. Pengendalian Kualita Udara Ambien Perkotaan	IV - 23
2. Pengendalian Kualitas Udara di Sumber Pencemar	IV - 23
5. PEMANASAN GLOBAL (<i>GLOBAL WARMING</i>)	IV - 25
6. PENGENDALIAN BAHAN PERUSAK OZON (BPO)	IV -25
 BAB V LAHAN DAN HUTAN	 V - 1
1. PENGERTIAN LAHAN DAN HUTAN	V - 1
A. LAHAN	V - 1
B. HUTAN	V - 2
2. KONDISI SUMBER DAYA LAHAN DAN HUTAN	V - 3
A. Jenis Tanah	V - 3
B. Penggunaan Lahan	V - 5
C. Luas Kawasan Hutan	V - 5
D. Ruang Terbuka Hijau	V - 8
3. TEKANAN TERHADAP LAHAN DAN HUTAN	V - 10
4. DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP SUMBER DAYA LAHAN DAN HUTAN	V - 17
5. UPAYA-UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN DAN HUTAN	V - 18
 BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI	 VI - 1
1. KONDISI KEANEKARAGAMAN HAYATI	VI - 1
2. TEKANAN TEHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI	VI - 2
3. DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI	VI - 3
4. PENGELOLAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI ..	VI - 4
 BAB VII AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	 VII - 1

LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kabupaten Muara Enim Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut	I - 6
Tabel 1.2	Fasilitas dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2007	I - 12
Tabel 2.1	Jenis Kegiatan yang Berpotensi Meningkatkan Kandungan Minyak dan Lemak pada Perairan di Kabupaten Muara Enim	II - 12
Tabel 2.2	Banyaknya Penderita Penyakit Kulit dan Diare di Kabupaten Muara Enim Tahun 2006	II - 13
Tabel 2.3	Biaya Pengelolaan Air Bersih PDAM Lematang-Enim Tahun 2005 - 2007	II - 13
Tabel 2.4	Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup yang Terjadi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2007	II - 17
Tabel 3.1	Rekapitulasi Hasil Analisis terhadap Kualitas Sungai Enim Tahun 2007	III - 2
Tabel 3.2	Rekapitulasi Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai Lematang Tahun 2007	III - 15
Tabel 3.3	Daftar Perusahaan yang Telah Diberikan Izin Pembuangan Limbah Cair	III -25
Tabel 3.4	Daftar Perusahaan yang Mendapat Surat Izin Pengambilan /Pemanfaatan Air Permukaan di Kabupaten Muara Enim	III - 27
Tabel 3.5	Daftar Perusahaan/Kegiatan yang Memanfaatkan Air Bawah Tanah (Sumur Bor) di Kabupaten Muara Enim Tahun 2007	III - 28
Tabel 3.6	Daftar Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Kelola Lingkungan Perusahaan (PROPER) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007.....	III - 31
Tabel 4.1	Arah dan Kecepatan Angin	IV - 3
Tabel 4.2	Data Curah Hujan Wilayah Kabupaten Muara Enim	IV - 6
Tabel 4.3	Hasil Pengujian Kualitas Air Hujan	IV - 7
Tabel 4.4	Kendaraan Bermotor di Muara Enim Tahun 2006	IV - 8
Tabel 4.5	Jumlah Kejadian Penyakit ISPA di Kabupaten Muara Enim	IV - 15
Tabel 4.6	Lokasi Titik Pantau Kualitas Udara Ambien Tahun 2007	IV - 16
Tabel 4.7	Rekapitulasi Hasil Analisa Kualitas Udara Ambien Kota Muara Enim dan Kota Tanjung Enim Tahun 2007	IV - 17
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien PTBA 2007	IV - 18
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Kuaitas Udara Ambien PLTU Sektor Bukit Asam Tahun 2007	IV - 19
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien PT. Lingga Jaya Tahun 2007	IV - 19
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien PTPN VII SULI Tahun 2007	IV - 20

Tabel 4.12	Hasil Pengujian Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Kab. Muara Enim Tahun 2007	IV - 21
Tabel 4.13	Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi PLTU Sektor Bukit Asam Tahun 2007	IV - 22
Tabel 4.14	Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi PTPN VII SULI Tahun 2007	IV - 22
Tabel 5.1	Jenis dan Sebaran Tanah di Kabupaten Muara Enim	V - 3
Tabel 5.2	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Kabupaten Muara Enim Tahun 2007	V - 6
Tabel 5.3	Daftar Areal Ruang Terbuka Hijau di Kota Muara Enim Tahun 2007	V - 8
Tabel 5.4	Data Sebaran Hot Spot di Kabupaten Muara Enim	V - 13
Tabel 5.5	Sarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2007	V - 14
Tabel 5.6	Daftar Perusahaan Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Muara Enim Tahun 2007	V - 16
Tabel 6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi Tahun 2007	VI - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1. TUJUAN PENULISAN LAPORAN

Tantangan terbesar untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup yang harus dihadapi Daerah Otonomi seperti Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah penambahan penduduk dan eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya yang makin meningkat. Masalah lingkungan timbul pada saat pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim melebihi kapasitas daya dukung lingkungan serta adanya permasalahan dan konflik yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber daya alam antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha di Kabupaten Muara Enim.

Menyikapi kecenderungan menurunnya efektivitas dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan agar menuju alur pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yang difokuskan pada upaya perlambatan laju perusakan dan pencemaran lingkungan; perbaikan maupun peningkatan kualitas lingkungan yang telah pulih dari kerusakan dan pencemaran lingkungan, maka diperlukan motivasi kuat dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk mendorong semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bergerak bersama mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, yang memasukkan pertimbangan lingkungan dalam setiap tahapan pembangunan yang pada hakekatnya bagian penting dari implementasi *Good Environmental Governance*.

Dalam menjalankan kebijakan lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 14 ayat (1) huruf j urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pengendalian Lingkungan Hidup skala Kabupaten, Sedangkan pada Pasal 22 huruf k bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban Melestarikan Lingkungan Hidup.

Perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim yang pada tahap awalnya hanya ditekankan pada peningkatan produktivitas/pertumbuhan ekonomi telah mulai

bergeser pada upaya-upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan lingkungan melalui proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif yang melibatkan peran serta para pelaku pembangunan (*stake holder*) dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan guna terwujudnya Tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk membuat suatu perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang menyangkut sumber daya alam suatu daerah, diperlukan penyediaan informasi mengenai keadaan lingkungan daerah atau Status Lingkungan Hidup Daerah

Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Muara Enim setiap tahunnya sebagai wujud implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 10 yang mewajibkan Pemerintah baik Nasional maupun Daerah untuk menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Muara Enim disusun dalam rangka penyediaan informasi lingkungan hidup selama satu tahun dengan tujuan:

- a. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik.
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan kepentingan penanaman modal (investor).
- d. Menyediakan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (*Good Environmental Governance*) di daerah serta sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan bersama-sama dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

2. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MUARA ENIM

Besarnya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengayomi dan melayani kepentingan masyarakatnya dituntut untuk terus berbenah diri. Sarana dan prasarana yang belum memadai, daya dukung lingkungan yang makin terbatas, serta kemajuan serta kesejahteraan masyarakat menjadi permasalahan pembangunan yang

dihadapi. Selama ini, kebijaksanaan dan arahan pembangunan yang ditempuh pemerintah daerah selalu berorientasi kepada 2 (dua) hal pokok yakni :

1. Mempercepat pembangunan untuk segera dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah di dalam masyarakat.
2. Mempercepat pembangunan untuk segera dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Akan tetapi kemakmuran yang dicapai masih menghadapi masalah besar yang seringkali dapat menimbulkan permasalahan baru.

Permasalahan Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya berakar dari tuntutan peran dan fungsinya yang sedemikian besar, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Oleh karena itu perlu pemantapan visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan tersebut di atas secara terpadu. Dalam dokumen Rencana Strategik Kabupaten Muara Enim 2003 — 2008 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan).

Visi Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

" Menjadikan Bumi Serasan Sekundang sebagai Kabupaten Yang Mampu meningkatkan Pelayanan dan Pendapatan Masyarakat "

Selanjutnya untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka visi tersebut dijabarkan dalam Misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan ketahanan budaya.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal pemerintahan daerah Kabupaten Muara Enim *serta dengan memperhatikan* kebutuhan stakeholders, akan diketahui kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*) pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim tersebut yang selanjutnya di rumuskan juga faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.
2. Aktualisasi semangat serasan sekundang sebagai nilai-nilai luhur untuk

berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Adanya peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan jiwa otonomi daerah.
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat
7. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Adanya optimalisasi penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian pembiayaan Pemerintah kabupaten Muara Enim.

Tujuan dan sasaran strategik pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim sebagai arahan dan operasional pencapaian Misi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur,
2. Mewujudkan Akuntabilitas kinerja,
3. Mewujudkan supremasi hukum,
4. Meningkatkan penerimaan daerah,
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga,
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
7. Mengembangkan ekonomi masyarakat,
8. Mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan masyarakat,
9. Meningkatkan integritas pembangunan di pedesaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas diperlukan upaya-upaya :

Menegakkan supremasi hukum, kepastian hukum dan budaya hukum.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel.

Mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro, UKM dan koperasi dan peningkatan daya saing produk.

Meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka

peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengendalian produksi, pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah lingkungan.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan daya dukung daerah.

3. GAMBARAN UMUM

A. Geografis dan Topografi

Kabupaten Muara Enim dengan luas wilayah 9.238,77 Km² merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan, yang secara geografis terletak pada posisi antara 4^o sampai 6^o Lintang Selatan dan 104^o sampai 106^o Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi rawas dan Kabupaten Lahat.

Topografi Kabupaten Muara Enim memiliki relief beraneka ragam, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Bentangan wilayah dengan keragaman topografi tersebut menimbulkan terbentuknya banyak bukit dan sungai. Berdasarkan derajat kemiringan wilayah kabupaten Muara Enim terdiri dari 41,3% terletak pada kemiringan lereng 3 – 12%, 34,4% terletak pada kemiringan 0 – 3%, 9,4% terletak pada kemiringan lereng 12-40%, dan 10,3% terletak pada kemiringan lebih besar 40% serta dataran tinggi yaitu pegunungan/perbukitan dan lembah seluas 4,6%.

Berdasarkan ketinggian tanah, daerah pegunungan/ perbukitan, terletak di wilayah Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Laut dengan ketinggian mencapai > 1.000 m dpl (79,56%) dan 500 – 1.000 m dpl (20,44%) dengan ketinggian menurun ke arah utara timur laut, daerah rawa/lebak yang berhadapan langsung dengan aliran Sungai Musi yaitu Kecamatan Talang Ubi, dan Kecamatan Gelumbang. Kabupaten Muara Enim menurut Ketinggian di atas permukaan laut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
KABUPATEN MUARA ENIM MENURUT KETINGGIAN DARI PERMUKAAN LAUT

No	Ketinggian (m) dpl	Daerah Sebaran / Kecamatan
1.	> 1000	Semende Darat Ulu
2.	1000	Semende Darat Tengah
3.	500 – 1000	Semende Darat Laut
4.	500 – 800	Tanjung Agung
5.	100 – 500	Lawang Kidul
6.	25 – 100	Muara Enim
7.	25 – 100	Ujan Mas
8.	25 – 100	Gunung Megang
9.	25 – 100	Rambang Dangku
10.	26 – 100	Benakat
11.	10 – 25	Talang Ubi
12.	26 – 100	Tanah Abang
13.	27 – 100	Penukal
14.	27 – 100	Abab
15.	25 – 100	Penukal Utara
16.	10 - 25	Rambang
17.	28 - 100	Lubai
18.	12 - 25	Lembek
19.	11 - 25	Sungai Rotan
20.	10 - 25	Gelumbang
21.		Muara Belida *
22.		Kelekar *

Sumber : *Muara Enim Dalam Angka, 2005*

*Belum ada Data karena kecamatan baru.

Wilayah Kabupaten Muara Enim dilalui Sungai Enim dan Sungai Lematang. Sungai Enim melewati Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanjung Agung, Lawang Kidul dan Muara Enim, sedangkan Sungai Lematang melewati Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Rambang Dangku, Tanah Abang, Penukal, dan Kecamatan Sungai Rotan.

Wilayah Administratif Pemerintahan

Seiring dengan perkembangan ekonomi daerah di Kabupaten Muara Enim telah terjadi pemekaran wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2005 yaitu Kecamatan Muara Belida dan Kecamatan Kelekar yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Gelumbang, serta Kecamatan Abab yang semula merupakan bagian dari Kecamatan Penukal Abab. Dengan terbentuknya Kecamatan Abab, nama Kecamatan Penukal Abab berubah menjadi Kecamatan Penukal, sehingga wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Muara Enim yang semula berjumlah 19 kecamatan bertambah menjadi 22 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Semende Darat Ulu
2. Kecamatan Semende Darat Tengah
3. Kecamatan Semende Darat Laut

4. Kecamatan Tanjung Agung
5. Kecamatan Kecamatan Lawang Kidul
6. Kecamatan Muara Enim
7. Kecamatan Ujanmas
8. Kecamatan Gunung Megang
9. Kecamatan Rambang Dangku
10. Kecamatan Talang Ubi
11. Kecamatan Benakat
12. Kecamatan Tanah Abang
13. Kecamatan Penukal Utara
14. Kecamatan Penukal
15. Kecamatan Abab
16. Kecamatan Rambang
17. Kecamatan Lubai
18. Kecamatan Sungai Rotan
19. Kecamatan Lembak
20. Kecamatan Gelumbang
21. Kecamatan Muara Belida
22. Kecamatan Kelekar

Keadaan Penduduk (Demografi)

Data kependudukan dengan segala aspek pendukungnya merupakan informasi penting yang diperlukan dalam penyusunan rencana maupun strategi kebijakan dalam berbagai bidang termasuk dalam pemetaan masalah lingkungan dan kecenderungan (*trend*) yang akan terjadi kedepan serta manajemen konflik lingkungan yang akan dihadapi.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk data BPS daerah Kabupaten Muara Enim Pertumbuhan Penduduk dalam kurun waktu 1990 – 2000 sebesar 2,04% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990- 2000 lebih lambat dibanding periode 1980 – 1990 yang pertumbuhannya mencapai 3,14%. ,sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang semakin menurun.

Keadaan ini menggambarkan antara lain keberhasilan pembinaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2007 berjumlah 666.636 jiwa. Jika dibandingkan Tahun 2006 ada peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,22%.

Selanjutnya berdasarkan komposisi distribusi persentase penduduk, diketahui bahwa

Kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduknya adalah Kecamatan Talang Ubi berjumlah 61.310 jiwa atau 9,19 persen, diikuti Kecamatan Lawang Kidul berjumlah 58.376 jiwa atau 8,76 persen, dan Kecamatan Muara Enim berjumlah 51.225 jiwa atau 7,68 persen. Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Talang Ubi dan Lawang Kidul karena adanya kegiatan perusahaan tambang minyak dan batubara terbesar di Kabupaten Muara Enim. Sedangkan Kecamatan Muara Enim merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

Salah satu dimensi permasalahan kependudukan yang ada di Kabupaten Muara Enim adalah tidak meratanya distribusi penduduk antar kecamatan. Dengan kondisi ini, di satu pihak ada kecamatan yang sangat padat penduduknya, sementara di kecamatan lain kepadatan penduduknya relatif rendah. Berdasarkan kepadatannya, diketahui bahwa kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Muara Enim (2.521 jiwa/Km²) diikuti Kecamatan Lawang Kidul (1.533 jiwa/Km²). dan Kecamatan Tanah Abang (1.094 jiwa/Km²).

Adanya perbedaan sumber daya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan sebaran penduduk antar kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim . Biasanya penduduk akan berkumpul pada suatu wilayah yang dapat menunjang kehidupannya serta di pengaruhi pula oleh kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim .

Namun demikian, potensi sumberdaya manusia yang relatif besar ini masih dihadapkan dengan berbagai pemasalahannya terutama masalah kualitas sumberdaya manusia yang secara umum masih relatif rendah. Kondisi ini di dorong lagi oleh keterbatasan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus berupaya dan mengedepankan program-program peningkatan kualitas sumberdaya manusia terutama di bidang pendidikan (formal dan informal), kesehatan dan agama, baik melalui pembinaan, pendidikan, penyuluhan dan penyediaan sarana dan prasarannya sehingga diharapkan kedepan potensi sumberdaya manusia yang relatif besar tersebut menjadi potensial dalam rangka mensukseskan pembangunan.

Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim karena pendidikan memiliki andil yang besar terhadap kemajuan daerah, baik secara ekonomi maupun sosial. Kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia karena pendidikan merupakan salah satu sarana meningkatkan kecerdasan dan

keterampilan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Investasi dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia keuntungannya tidak hanya dinikmati oleh orang yang meningkatkan pendidikan tersebut (*private rate to return*) melainkan juga dinikmati oleh masyarakat luas (*social rate return*). Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka wawasannya pada seluruh aspek kehidupan juga akan meningkat. Karena itu dengan wawasan yang luas, diharapkan pemahaman akan pentingnya mengelola lingkungan yang baik akan semakin meningkat.

Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah dikeluarkan antara lain pelaksanaan program-program peningkatan kuantitas maupun kualitas pengajar, sarana dan prasarana belajar dan sekolah-sekolah teladan. Pengkajian partisipasi pendidikan penduduk Kabupaten Muara Enim pada setiap jenjang pendidikan (sekolah dasar hingga perguruan tinggi), diharapkan akan dapat memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia yang potensial di masa yang akan datang. Dalam hal ini, salah satu ukuran untuk melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan mengetahui Tingkat Partisipasi Sekolah penduduk di Kabupaten Muara Enim. Untuk tingkat SD angka partisipasi rata-rata mencapai 108,47%, tingkat SMP angka partisipasi sudah cukup baik yaitu rata-rata mencapai 81,15% sedangkan untuk tingkat SLTA masih agak rendah yaitu 45,67%.

Ketenagakerjaan

Terciptanya lapangan kerja yang semakin meluas dan berkelanjutan yang pada akhirnya mampu meminimalkan angka pengangguran merupakan sasaran dari program ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan diharapkan produktivitas tenaga kerja meningkat pula sehingga mampu memberikan kontribusi pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk bekerja) di Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2006 sekitar 56% dan jumlah pengangguran selama tahun 2006 yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja ada sekitar 30.383 jiwa. Di Kabupaten Muara Enim jumlah pencari kerja terbanyak adalah yang belatar belakang pendidikan Sekolah Menengah. Dibandingkan dengan pencari kerja yang belatar pendidikan Diploma atau Strata, pada umumnya kualitas mereka lebih rendah, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan.

Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan atau disebut penduduk yang aktif secara ekonomi (*Economically Active*

Population) sedangkan sisanya yaitu mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (cacat, penerima pendapatan dan lain sebagainya) atau digolongkan sebagai bukan angkatan kerja (*Non Economically Active Population*).

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2006 sebesar 329.127 jiwa. Komposisi jumlah pencari kerja mulai dari SD hingga pendidikan tertinggi sarjana yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2006 yaitu sebanyak 14.776 jiwa. Jenjang pendidikan komposisi terbanyak pada tingkatan SLTA sebanyak 9.322 jiwa dan yang terkecil pada tingkat SD tercatat sekitar 76 jiwa.

Jumlah pencari kerja tahun 2006 jika dilihat dari komposisi jenis kelamin, maka pencari kerja perempuan tercatat 8.031 jiwa sedangkan pencari kerja laki-laki tercatat 6.745 jiwa. Terlihat selisih antara jumlah pencari kerja wanita dan laki-laki cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pola hidup, dimana emansipasi perempuan terutama ibu rumah tangga tidak lagi mengandalkan penghasilan dari suami yang terbatas di samping tuntutan biaya hidup yang makin meningkat.

Kesehatan

Faktor yang paling dominan dan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Muara Enim adalah faktor lingkungan masyarakat itu sendiri. Status kesehatan menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Berbagai faktor dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, antara lain faktor/program dan pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat (*gaya hidup/life style*), faktor keturunan dan faktor lingkungan.

Ada tiga komponen yang mempengaruhi tingkat penyakit atau gangguan kesehatan pada masyarakat Kabupaten Muara Enim saat ini yaitu *Host* (manusia), *Agent* (penyebab penyakit) dan *Environment* (lingkungan) yang saling berkaitan. Perubahan kualitas lingkungan hidup manusia sangat besar sekali pengaruhnya terhadap intensitas agent penyakit dan daya tahan masyarakat terhadap penyakit. Kesehatan merupakan salah satu dimensi kesejahteraan masyarakat yang berpengaruh pada berbagai kondisi sosial ekonomi. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan program kesehatan yang mengutamakan upaya perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang diharapkan akan meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan meningkat pula. Untuk mencapai sasaran meningkatkan kesehatan masyarakat itu, maka telah ditempuh upaya antara lain dengan memprioritaskan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus

kepada masyarakat penghasilan rendah, daerah pedesaan dan daerah terpencil salah satunya berupa pembangunan jaringan kerja Puskesmas yang semakin meluas

Untuk menyetatkan lingkungan hidup pada masyarakat Kabupaten Muara Enim maka perlu upaya dengan cara melakukan sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan ini terutama lingkungan fisik yaitu air, tanah dan udara. Kegiatan sanitasi lingkungan dapat berupa penyehatan air minum, pembuangan dan pengolahan air kotor serta sampah, pemberantasan vektor penyakit, sanitasi industri dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Indikator derajat kesehatan masyarakat yang relevan dengan kualitas lingkungan adalah angka kesakitan (*morbidity*), pola penyakit yang menonjol, angka kematian (*mortality*), penyakit-penyakit yang berbasis pengaruh lingkungan serta usia harapan hidup.

Kondisi di lapangan ternyata pola penyakit yang umum di derita dan masyarakat sebagaimana daerah tropis lainnya masih banyak di sebabkan penyakit infeksi. Kenyataan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap kesehatan manusia di sekelilingnya. Jenis penyakit ini apabila dilihat dari epidemiologi lingkungan, sangat erat hubungannya dengan kualitas lingkungan, khususnya kualitas air bersih yang digunakan, serta ditambah dengan perilaku masyarakat yang kurang bersih.

Tabel 1.2
Fasilitas dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2007

No	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1.	Rumah Sakit	2 Buah
2.	Puskesmas non Perawatan	14 Buah
3.	Puskesmas dengan Perawatan	8 Buah
4.	Puskesmas Pembantu	108 Buah
5.	Puskesmas Keliling 4 Roda	22 Buah
6.	Balai Pengobatan	5 Buah
7.	Rumah Bersalin (swasta)	3 Buah
8.	Optikal	4 Buah
9.	Apotek	9 Buah
10.	Toko Obat	12 Buah
11.	Dokter Ahli	16 Orang
12.	Dokter Umum	53 Orang
13.	Dokter Gigi	16 Orang
14.	Apoteker	3 Orang
15.	Sarjana Kesehatan	37 Orang
16.	Perawat Medis Kesehatan	383 Orang
17.	Bidan	346 Orang
18.	Tenaga non Medis	96 Orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2007

4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

A. Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang sedang berjalan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan menuju peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan menempatkan manusia sebagai pelaku sekaligus bagian dari proses perubahan melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan otonomi daerah masih memperlihatkan tarik menarik antara kepentingan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepentingan pelestarian Lingkungan. Aktivitas pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim yang relatif cepat telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup, antara lain kemunduran sumber daya alam yang terbaharui sebagai penyangga kehidupan seperti air, tanah dan hutan dan terkurasnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan batubara. Semua ini dikhawatirkan akan mempengaruhi basis yang diperlukan bagi keberlanjutan pembangunan dimasa depan. Penurunan kualitas lingkungan menjadi persoalan dasar yang dihadapi tidak saja oleh Kabupaten Muara Enim tapi juga telah menjadi permasalahan nasional bahkan internasional. Hal ini menuntut perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga kelestarian demi kehidupan generasi mendatang dengan bersama-sama berupaya melindungi sumber daya alam yang masih ada serta memperbaiki kerusakan lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim harus didorong pada terwujudnya *good environmental governance* di kalangan Pemerintah Kabupaten dimana dalam pelaksanaannya perlu menjalankan pemerintahan yang berwibawa (*good governance*), khususnya di bidang Lingkungan hidup (*good environmental governance*) atau Tata Praja Lingkungan.

Dalam ruang lingkup pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, isu Otonomi Daerah merupakan isu yang kompleks. Kompleksitas ini menyangkut kompleksitas konsep, komitmen, dan implementasi. Kompleksitas ini harus dipecahkan lebih lanjut dengan *win-win solution* baik secara *top down approach* maupun *bottom up approach* (dalam garis kepemimpinan vertikal) dan garis kepemimpinan horizontal. Pengelolaan lingkungan hidup era otonomi perlu mendapat perhatian serius karena permasalahan lingkungan hidup makin bersifat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang bersifat fisik, politik sosial, budaya, maupun ekonomi sehingga penyelesaian terhadap masalah lingkungan juga harus melibatkan upaya yang multidisipliner dan multi pihak

Anggapan bahwa pengelolaan lingkungan tidak menghasilkan “keuntungan” secara ekonomi dan hanya memperlakukan lingkungan sebagai obyek dalam aktivitas perekonomian dan kehidupan telah menjadikan Lingkungan Hidup sebagai isu pinggiran pada setiap pembahasan perencanaan pembangunan.

1. Arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan wilayah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Muara Enim dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam hal ini Bapedalda Kabupaten Muara Enim juga telah menetapkan Visi pembangunan di bidang Lingkungan Hidup seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim 2003 – 2008 yakni :

“ Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih dan Lestari di Kabupaten Muara Enim “

Sedangkan Misi Bapedalda Kabupaten Muara Enim untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan adalah:

- (1) Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Meningkatkan kualitasSDM dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dalam semua sektor pembangunan.
- (5) Mendukung penegakan supremasi hukum di bidang lingkungan hidup.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim sebagaimana yang tercantum dalam Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 - 2008, diarahkan untuk :

- (1) Meningkatkan penyuluhan sadar lingkungan dan perencanaan pemanfaatan

Sumber Daya Alam (SDA) , dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola lingkungan.

- (2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), Perangkat, sarana, dana , Penelitian dan pengembangan.
- (3) Memanfaatkan SDA tak terbaharui (*non renewable*) sebagai modal pembangunan dan SDA terbaharui (*renewable*) sebagai pengganti fungsinya.
- (4) Meningkatkan optimalitas perencanaan perusahaan SDA dan Lingkungan Hidup.
- (5) Meningkatkan jumlah dan mutu upaya rehabilitasi ekosistem yang sudah rusak dan konservasi ekosistem alami.
- (6) Meningkatkan koordinasi dalam penataan lahan menurut rencana tata ruang wilayah.
- (7) Menuntaskan perselisihan dan meredam kecemburuan sosial akibat adanya aktivitas pemanfaatan SDA.
- (8) Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran akibat adanya limbah.
- (9) Memberdayakan masyarakat dalam mengelola lingkungan.

2. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai penjabaran arah kebijakan tersebut meliputi :

- (1) Penyuluhan sadar lingkungan yang berkelanjutan terhadap semua pihak terkait, dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan penyediaan bahan bacaan tentang lingkungan hidup.
- (2) Peningkatan aparat dan perangkat kerja melalui pembentukan Bapedalda, laboratorium lingkungan dan sarana pendukung operasionalnya.
- (3) Peningkatan penelitian dan pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup.
- (4) Pemanfaatan SDA terbaharui sebagai pengganti lokomotif pembangunan setelah habisnya cadangan SDA tak terbaharui lewat kegiatan rehabilitasi / reboisasi lahan / DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis dan konservasi ekosistem alami (hutan lindung, suaka alam dan DAS).
- (5) Pengawasan penerapan *Ecolabelling* dalam kegiatan HPH/ HTI.
- (6) Inventarisasi dan evaluasi SDA dan LH pada kawasan yang belum diteliti melalui

survei dan pemetaan tanah, air, iklim, flora dan fauna, serta potensi pariwisata.

- (7) Optimalisasi perencanaan dalam pemanfaatan SDA oleh pengusaha / penduduk secara optimal berdasarkan keterbatasan daya dukung SDA dan tata ruang serta penuntasan perselisihan yang terjadi.
- (8) Peningkatan koordinasi pemanfaatan lahan lewat penggunaan perkotaan dan kawasan perdesaan secara fungsional. Ketidakerasian pembangunan antar sektor rencana tata ruang sebagai acuan kegiatan pembangunan.
- (9) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran akibat adanya limbah kegiatan industri / non industri dan pendaurulangan limbah / sampah yang bernilai ekonomis.
- (10) Penilaian ulang status sungai dalam prokash dan penilaian status baku mutu air limbah perairan yang representatif.

3. *Pendanaan*

Pendanaan bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2007 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Komposisi anggaran yang disediakan untuk sektor lingkungan hidup (Bapedalda) pada dana APBD adalah sebesar Rp. 2.591.283.005 atau sebesar 0,30% dari total APBD Kabupaten Muara Enim (Rp. 854.738.904.156,39). Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan pemantauan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Namun ada beberapa instansi lain yang juga memiliki dana untuk pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Dinas Kehutanan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pertambangan dan Energi, Bappeda dan Dinas Kesehatan sehingga jumlah keseluruhan dana untuk sektor lingkungan hidup sebesar Rp. 18.395.373.920 atau 2,15% dibandingkan jumlah seluruh dana APBD Kabupaten. Sedangkan dari APBN, dana yang dialokasikan untuk lingkungan hidup berupa Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar Rp. 201.000.000,- yang dimanfaatkan untuk pengadaan sarana dan prasarana pencegahan kerusakan lingkungan.

Jika dibandingkan dengan alokasi pembangunan untuk sektor-sektor produktif (industri, pertanian dan pertambangan) serta sektor jasa (transportasi) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maka alokasi anggaran untuk sektor lingkungan terbilang kecil, sedangkan Penerimaan Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya

Alam yang diperoleh cukup besar yaitu sebesar
(November 2007).

Rp. 80.183.397.066

B. Kebijakan Tata Ruang

Pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim yang lebih berorientasi sektoral yang telah dilaksanakan selama ini merupakan salah satu ciri bentuk pengelolaan sumberdaya alam yang dapat menimbulkan pengrusakan sumberdaya alam dan menurunkan kualitas lingkungan. Selain penyebab di atas, kenyataan ini juga disebabkan oleh pelaku aktivitas (*stakeholder*) yang kurang memperhatikan segi spatial, sehingga tidak jarang terjadi konflik spatial dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam antar sektor. Selain itu pembangunan yang berorientasi sektoral juga berkontribusi pada ketimpangan pembangunan antar kawasan, baik antar daerah maupun antar kawasan dan ketimpangan pembangunan antar kawasan menyebabkan pembangunan kawasan akan menjadi kurang berdaya dan berhasil guna.

Untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim, harus dilakukan penataan ruang sesuai dengan kondisi sumberdaya alam dan pemanfaatan yang diinginkan serta tidak melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (carrying capacity).

Pendekatan pemanfaatan ruang untuk penyusunan penataan ruang kawasan juga tidak dapat dipisahkan dari konsep perencanaan tata ruang untuk keseluruhan wilayah. Pendekatannya melalui keterpaduan, baik bertolak dari aspek lingkungan serta wujud biogeofisik ruang wilayah. Pendekatan yang terpadu tersebut merupakan cerminan usaha pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak saja menguntungkan kehidupan masyarakat Kabupaten Muara Enim saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang serta pertimbangan mendasar pada tatapan lingkungan dan daya dukung lingkungan.

Arah kebijakan Tata Ruang disusun berdasarkan kebutuhan penataan ruang yang harus dijadikan acuan bagi sektor-sektor yang terkait sebagai pelengkap pembangunan sehingga dapat mewujudkan sasaran untuk:

1. Memantapkan kawasan berfungsi lindung dan kawasan menurut fungsi lainnya
2. Menetapkan arahan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
3. Menetapkan pola pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan

4. Menetapkan pola pengembangan sistem prasarana wilayah
5. Menetapkan arah pengembangan wilayah-wilayah yang diprioritaskan
6. Menetapkan kebijaksanaan penunjang penataan ruang untuk mewujudkan struktur tata ruang yang direncanakan.

C. Kebijakan Sosial, Ekonomi Dan Budaya

1. Kebijakan Ekonomi

1.1. Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan ekonomi Kabupaten Muara Enim adalah mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan akses sumberdaya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peran serta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim.

1.2. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

a. Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Muara Enim mempunyai potensi yang cukup besar akan deposit bahan tambang dan bahan galian. Untuk mengelola sumber daya mineral dan energi sebagai asset pembangunan maka kebijakan diarahkan kepada :

- (1) Menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan perusahaan pertambangan umum, migas dan ketenagalistrikan
- (2) Menyediakan data dan informasi tentang peluang investasi di sektor pertambangan dan energi
- (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu dan ahli dalam pekerjaan pertambangan dan energi.
- (4) Menciptakan kesempatan kepada masyarakat pengusaha kecil untuk berusaha dalam sektor pertambangan dan energi.
- (5) Mendorong industri pertambangan untuk mempererat hubungan dengan mem berdayakan masyarakat di sekitarnya.

- (6) Mengupayakan agar kegiatan pertambangan dan energi ramah dan peka terhadap lingkungan.

b. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembangunan di bidang pertanian diarahkan untuk memantapkan swasembada pangan, menghasilkan produk-produk unggulan berdaya saing tinggi, menyediakan bahan baku bagi keperluan industri, dan perluasan lapangan kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah :

- (1) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas, kualitas dan pendapatan petani.
- (2) Mengoptimalkan pembangunan finansial dalam mendukung penyediaan modal
- (3) Mengembangkan usaha diversifikasi pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian.
- (4) Mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- (5) Pengembangan komoditas hortikultura khas unggulan daerah dengan penerapan bioteknologi
- (6) Meningkatkan peran petugas lapangan dan penyuluh pertanian.
- (7) Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan produk pertanian
- (8) Pemberdayaan kelembagaan petani, pemerintah dan swasta.

c. Perkebunan

Yang dihadapi perkebunan rakyat adalah rendahnya produktivitas dan mutu hasil, minimnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi, belum tumbuhnya industri hilir pengolahan hasil, belum memadainya sarana transportasi dan rendahnya kemampuan SDM Petani serta lemahnya kelembagaan petani sehingga posisi tawar petani lemah. Selain itu pengelolaan perkebunan rakyat masih sangat tradisional dengan ciri luasan lahan sempit, kebun tepencar-pencar, pemeliharaan tidak intensif serta penggunaan bibit lokal. Sebagian besar perkebunan rakyat juga didominasi oleh tanaman-tanaman yang sudah tua.

Mengingat masih besarnya potensi lahan di Kabupaten Muara Enim, masih terbuka kemungkinan untuk pengembangan areal terutama untuk tanaman karet, kelapa sawit,

dan kopi. Rehabilitasi dan intensifikasi kebun-kebun tua dan baru melalui peremajaan serta penggunaan bibit unggul diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

Untuk mewujudkan perkebunan yang berproduktivitas dan bermutu produksi tinggi serta menguntungkan petani serta mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai Iptek yang sesuai perkembangan zaman maka kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah :

- (1) Mewujudkan perkebunan rakyat yang berorientasi agribisnis, efisien dan produktif.
- (2) Mendorong terciptanya kepastian hukum bagi pemilikan lahan.
- (3) Mengurangi kesenjangan antara perkebunan besar dan masyarakat sekitar.
- (4) Menciptakan peluang bagi petani kecil untuk mendapatkan masukan produksi melalui pinjaman berbunga lunak jangka panjang.
- (5) Menciptakan sistem pemasaran yang menguntungkan petani.
- (6) Meningkatkan akses informasi pasar.
- (7) Meningkatkan SDM petani, petugas perkebunan dan kelembagaan petani.
- (8) Menerapkan teknologi pengelolaan lahan yang spesifik lokasi.
- (9) Memperbaiki mutu olahan hasil dengan teknologi yang tepat guna dan mudah dikuasai petani.

d. Kehutanan

Pembangunan sub sektor kehutanan dilandasi prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar mungkin melalui pola penguasaan hutan yang menjamin sebesar-besarnya pendapatan selaras dengan ketersediaan hutan/hasilnya serta kepentingan ekonomi dan budaya lokal dengan tetap memelihara kelestarian SDA dan kelangsungan fungsinya sebagai suatu ekosistem yang menentukan lingkungan hidup. Berdasarkan prinsip ini maka arah kebijakan pembangunan sektor kehutanan meliputi :

- (1) Membuat unit percontohan usaha pelestarian sumber Daya Alam dan UPM (Usaha Pertanian Menetap).
- (2) Mendorong dan membina masyarakat untuk melestarikan dan mengelola hutan melalui pemberian keteladanan dalam semua kegiatan sektor kehutanan.
- (3) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengelolaan hutan dan industri pengolahan hasil hutan harus berwawasan lingkungan.

- (4) Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif pada sektor kehutanan.
- (5) Memperluas areal rehabilitasi, reboisasi hutan rusak atau lahan kritis dengan menggunakan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis atau ekologis.
- (6) Mencegah kerusakan dan pengamanaan hutan/lahan.
- (7) Meningkatkan kemampuan dan peranan pemerintah daerah dalam pelestarian hutan dan fungsinya melalui perbaikan kelembagaan dan aktivitasnya.
- (8) Memperbaiki koordinasi antar instansi kehutanan dan instansi lain yang terkait dan penerbitan administrasi dan dokumentasi agar memudahkan masyarakat/pengusaha dalam mengakses informasi/pelayanan.

e. *Peternakan*

Usaha peternakan di Kabupaten Muara Enim berintikan usaha Peternakan Rakyat. Usaha peternakan ini, jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Namun usaha-usaha peternakan itu pada umumnya, masih berupa usaha sampingan, dengan skala kecil dan dikelola secara tradisional serta belum sepenuhnya berorientasi bisnis. Ternak yang diusahakan pada umumnya adalah ayam buras, kambing dan sapi.

Sektor bisnis ikut pula mengembangkan usaha peternakan di Kabupaten Muara Enim yang ditandai dengan kehadiran sejumlah perusahaan peternakan ayam ras berskala besar.

Potensi wilayah sebenarnya cukup mendukung pengembangan usaha peternakan yang maju, dengan skala yang lebih menguntungkan. Padang rumput sumber makanan ternak masih cukup tersedia untuk pengembangan peternakan. Sehubungan dengan itu maka berbagai kebijakan ditempuh untuk pengembangan usaha peternakan yakni :

- (1) Meningkatkan kemampuan SDM peternak melalui optimalisasi tugas penyuluh peternakan.
- (2) Meningkatkan pengembangan intensifikasi peternakan
- (3) Mengembangkan pembibitan ternak rakyat
- (4) Mengembangkan teknologi spesifik lokasi untuk pembuatan pakan
- (5) Mengembangkan sarana dan meningkatkan pengetahuan dalam pengolahan hasil ternak.
- (6) Mengembangkan sistem pemasaran yang berpihak kepada para peternak melalui pembentukan sistem kelembagaan pemasaran hasil ternak, dan

(7) Meningkatkan penanaman dan akses modal bidang peternakan.

f. Perikanan

Kebijakan pembangunan di bidang Perikanan di arahkan kepada :

- (1) Meningkatkan produksi perikanan dan memelihara mutu sumber daya perairan
- (2) Menggalakkan aplikasi teknologi budidaya dan produksi olahan
- (3) Mencegah penangkapan ikan yang merusak siklus hidup dan habitat perairan
- (4) Meningkatkan teknik pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum
- (5) Mengembangkan spesies ikan yang bernilai ekonomis
- (6) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran petugas untuk melindungi pelestarian spesies ikan dan habitat perikanan.
- (7) Mengembangkan teknologi pengolahan hasil perikanan
- (8) Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk memperluas pengetahuan nelayan.
- (9) Membentuk suatu lembaga sosial yang berpihak pada nelayan.

g. Industri

Strategi pengembangan sektor industri di Kabupaten Muara Enim diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sektor ini, baik oleh pemerintah maupun dunia usaha dan masyarakat. Guna mencapai sasaran yang diharapkan, maka kebijakan pembangunan diarahkan kepada :

- (1) Meningkatkan daya saing dalam mencapai keunggulan komparatif yang dinamis, baik dalam pasar domestik maupun pasar nasional bahkan pasar internasional.
- (2) Meningkatkan keterkaitan (kemitraan) antara industri hulu dan hilir, serta industri besar, menengah dan kecil yang makin maju, dan manajemennya makin profesional, sumber daya manusianya makin berkualitas, serta teknologi proses dan pemasaran hasil produknya makin menguntungkan.
- (3) Meningkatkan kemampuan industri secara optimal.
- (4) Mengembangkan iklim berusaha yang kondusif untuk meningkatkan investasi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri, penguasaan teknologi yang makin berkembang, sistem informasi, menyederhanakan birokrasi dan memantapkan pola kemitraan yang saling menunjang dan menguntungkan.

h. Perdagangan

Sektor Perdagangan merupakan sektor ketiga terbesar penyumbang pendapatan domestik regional bruto setelah sektor pertambangan dan sektor pertanian. Dalam rangka menyiapkan sektor perdagangan Kabupaten Muara Enim menghadapi pasar Global, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB perlu ditingkatkan lagi dimasa mendatang.

Kebijakan pembangunan di sektor perdagangan diarahkan kepada :

- (1) Meningkatkan daya saing, memperlancar arus barang dan jasa.
- (2) Meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri guna mengantisipasi era perdagangan bebas.
- (4) Menjamin ketersediaan bahan pokok dan bahan lainnya, serta penyebarannya secara merata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Menggalakkan dan merangsang ekspor non migas guna menambah sumber penghasilan devisa negara.
- (6) Mengurangi impor secara bertahap untuk barang modal, bahan baku dan bahan penolong.
- (7) Menciptakan iklim yang mendukung dalam membantu dan mendorong usaha kecil, usaha menengah dan koperasi secara terpadu dan berkesinambungan.

i. Koperasi

Pengembangan koperasi di Kabupaten Muara Enim diarahkan kepada :

- (1) Meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- (2) Menyempurnakan perda dan kebijakan sektoral, menyederhanakan perizinan, dan retribusi, serta meningkatkan upaya penegakan hukum perkoprasian.
- (3) Memberikan insentif dan kemudahan untuk menumbuhkembangkan sistem dan jaringan lembaga pendukung koperasi dan UKM yang lebih meluas di daerah.
- (4) Membangun lembaga keuangan (LKM) yang mandiri dan mengakar di masyarakat, lembaga penjaminan dana, dan lembaga profesional sebagai pendamping dan penyedia pelatihan, teknologi, informasi dan layanan advokasi.
- (5) Meningkatkan kemampuan aparat dan menyederhanakan birokrasi pemerintah

daerah untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator dalam melaksanakan kebijakan dan program pemberdayaan koperasi dan UKM.

j. Pariwisata

Obyek dan daya tarik wisata sebagian besar masih kurang dikunjungi wisatawan karena berbagai kelemahan seperti belum adanya sarana transportasi khusus yang tersedia setiap saat dibutuhkan atau belum terjadwal, belum tersedianya sarana telekomunikasi, kurangnya promosi dan pemasaran, serta pengelolaan yang baik. Sumber daya manusia juga masih terbatas baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas.

Untuk mengatasi berbagai persoalan di atas, maka strategi kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Muara Enim adalah :

- (1) Merencanakan, mengorganisasi termasuk koordinasi antar instansi dan lembaga terkait dan pelaksanaan pengembangan pariwisata secara terpadu, terkoordinir dan menyeluruh sangat diperlukan.
- (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga usaha jasa kepariwisataan dalam pembangunan pariwisata.
- (3) Mengembangkan potensi nilai-nilai seni dan budaya masyarakat melalui pengembangan peranan dan fungsi-fungsi lembaga adat maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada.
- (4) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi upaya pengembangan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) kepariwisataan yang profesional.

2. Kebijakan Sosial Budaya

2.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah memperkuat tatanan masyarakat dan lingkungan sosial, memelihara situasi sosial politik yang kondusif, meningkatkan ketaatan agama dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial serta meningkatkan infrastruktur sosial.

2.2. Strategi dan Prioritas Program Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bidang pembangunan Sosial Budaya, maka dijabarkan program sektor-sektor yang berkaitan sebagai berikut :

a. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Kebijakan bidang kependudukan dan tenaga kerja dapat diarahkan untuk memperbaiki struktur kependudukan dan juga administrasi penduduk yakni :

- (1) Memperluas lapangan kerja, melalui pertumbuhan sektor riil yang positif.
- (2) Mengaktifkan peran instansi teknis yang relevan dalam penanganan masalah unjuk rasa di bidang ketenagakerjaan
- (3) Mengupayakan pembentukan aturan khusus yang memberikan legalitas bagi LSM (forum masyarakat) sesuai dengan lingkup kegiatannya.
- (4) Membentuk kebijakan yang mengatur tentang kontribusi perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim dalam pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitarnya.
- (5) Menyesuaikan peraturan daerah sejalan dengan aspirasi dan perkembangan masyarakat.

b. Pendidikan

Kebijakan Pembangunan di bidang Pendidikan di Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk :

- (1) Memperbaiki sistem insentif dan sinyal-sinyal sosial maupun ekonomi yang berada diluar sistem pendidikan
- (2) Memperbaiki efektifitas dan pemerataan pendidikan, dan memperbaiki unsur-unsur internal dalam sistem pendidikan itu sendiri.
- (3) Memperbaiki kebijakan di bidang pendidikan terutama untuk mengatasi anak-anak putus sekolah pada pasca krisis ekonomi, dan meningkatkan daya tampung sekolah.
- (4) Mempersiapkan anak-anak putus sekolah dan lepas sekolah untuk memasuki dunia kerja.

Dari arah kebijaksanaan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mewujudkan target untuk:

- (1) Meningkatnya jumlah penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Meningkatnya tingkat partisipasi anak usia sekolah.
- (3) Meningkatnya kualitas proses dan hasil pendidikan formal.
- (4) Menurunnya angka buta aksara
- (5) Tersusunnya metode pengajaran yang berbasis kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan alam setempat.

c. Pelayanan Kesehatan

Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal utama keberhasilan pembangunan karena aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan dan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan kesehatan, mengembangkan sistem jaminan sosial kesehatan / ketenagakerjaan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan yaitu :

- (1) Terjadinya penurunan angka penderita penyakit degeneratif dan infeksi
- (2) Terjadinya penurunan angka pertumbuhan penduduk dan angka kematian
- (3) Tersedianya fasilitas dan SDM bidang kesehatan yang representatif.

d. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan sektor yang patut menjadi perhatian. Kebijakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :

- (1) Meningkatkan dana pembinaan, dengan menggali sumber dana dari berbagai aktivitas yang mungkin dilakukan.
- (2) Menghimpun dana bagi para penyandang cacat dan korban bencana alam.
- (3) Melakukan pembinaan bagi para tuna susila
- (4) Upaya pengembangan sikap dan perilaku solidaritas dan tanggung jawab sosial pada semua kalangan anggota.
- (5) Meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembinaan kesejahteraan sosial di wilayah Kabupaten Muara Enim
- (6) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan kerja sama yang terpadu dengan

berbagai pihak terkait baik pemerintah maupun swasta untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.

- (7) Memanfaatkan kemajuan iptek dalam melakukan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.

e. Pemuda dan Olahraga

Pemuda merupakan asset penting daerah, karena pemuda merupakan sumber daya yang akan menggerakkan roda pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Sehingga pemuda perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai dan dibina dan diarahkan agar tidak terjebak dalam pergaulan yang negatif.

Arah kebijakan pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga ini adalah :

- (1) Meningkatkan keterampilan melalui pendidikan formal
- (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas organisasi kepemudaan yang dapat diandalkan dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Muara Enim
- (3) Menerapkan kebijakan yang mengacu pada penguasaan iptek yang dipadu dengan potensi daerah bagi pemuda untuk menyongsong era globalisasi dan proses reformasi.
- (4) Menyediakan fasilitas bagi kegiatan produktif bagi pemuda.

f. Agama

Meskipun tidak terjadi konflik keagamaan yang serius di Kabupaten Muara Enim, kesadaran hidup beragama terus ditingkatkan agar pengamalan dan toleransi keagamaan semakin kental dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan pembangunan di bidang agama diarahkan kepada :

- (1) Meningkatkan penyuluhan/penerangan dalam bidang keagamaan termasuk meningkatkan kerukunan hidup beragama
- (2) Meningkatkan pengadaan dan distribusi tenaga pengajar pada sekolah agama.
- (3) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan dan fasilitas penunjang lainnya.
- (4) Meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan pendidikan sekolah agama.

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Selama Tahun 2007 Isu Lingkungan Hidup Utama yang terjadi di Kabupaten Muara Enim yaitu :

BENCANA TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT

Kejadian Bencana

Bencana tanah longsor terjadi di Ataran Sawah Lebar Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut pada Bulan Januari 2007 sekitar pukul 03.00 WIB. Kecamatan Semende Darat Laut berada berada pada ketinggian di atas 500 m dpl dan merupakan daerah yang termasuk bagian dari Bukit Barisan, sehingga Topografi wilayah ini umumnya adalah dataran tinggi perbukitan dan pegunungan.

Material longsor berupa tanah dan batuan menutupi areal persawahan dan kebun milik masyarakat. Selain itu aliran anak Sungai Muara Dua, yang juga tertimpa longsor mengalami perubahan aliran berpindah sejauh \pm 200 m.

Penyebab Bencana

Bencana ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu berkurangnya tutupan lahan/vegetasi di daerah bagian hulu dan kemiringan/ slope lereng yang curam (60% – 90%) ditambah dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan lereng pegunungan sekitar ataran sawah menjadi longsor.

Gambar.2.1 Bencana Longsor di Semende Darat laut, 2007



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Kejadian longsor di daerah bagian hulu Sungai Enim ini bukan hal yang pertama meskipun bukan terjadi di tempat yang sama, tercatat beberapa kejadian longsor yaitu :

Tahun 2003, tepatnya pada tanggal 8 November 2003 terjadi longsor ruas jalan lintas tengah Sumatera di Kawasan Simpang Meo Kecamatan Tanjung Agung. Longsoran tidak hanya terjadi di badan jalan, tetapi juga di tebing yang terletak di tepi jalan.

Tanggal 23 April 2006 bencana tanah longsor terjadi di Desa Sri Tanjung, Kecamatan Semende Darat Tengah. Tiga orang meninggal dunia akibat kejadian ini.

Kejadian-kejadian tersebut diduga timbul oleh faktor-faktor yang sama. Faktor kondisi geografis dan curah hujan adalah faktor yang tidak dapat dihindari, namun berkurangnya tutupan lahan akibat penebangan/pembukaan lahan, yang menyebabkan lapisan atas yang berpori/berongga yang mampu menyimpan air hujan dan kaya unsur hara untuk kehidupan vegetasi di atasnya terbawa bersama erosi sehingga tinggalah lapisan tanah dengan koefisien limpasan yang sangat tinggi sehingga air hujan yang dilimpahkan/dialirkan jauh lebih tinggi daripada yang di serap.

Faktor lain yang masih belum menyeluruh dilakukan yaitu : konservasi lahan kritis. Jika hal ini dilakukan maka kejadian longsor akan dapat diminimalisasi.

Dampak Bencana

Dampak bencana yang dapat dihitung secara angka yaitu : ± 1 Ha areal persawahan rusak, 7 batang pohon Durian mati, 300 batang pohon Kopi mati. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ekologis akibat kejadian ini tidak dapat dihitung secara empiris seperti berkurang/hilangnya fauna air yang semula berada dalam aliran sungai yang tertimbun, berdampak juga pada ekosistem dan rantai makanan yang ada di bagian hilirnya. Perubahan pola aliran dan pendangkalan sungai merupakan kerusakan lingkungan yang jarang diperhitungkan sebagai kerugian.

Penanggulangan Bencana Longsor

Pada kejadian longsor, penanggulangan yang pertama kali dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah melakukan konstruksi kestabilan lereng dengan pemasangan bronjong dan melakukan pengedaman di lereng tempat terjadi longsor

Gambar. 2.2

Bronjong yang dipasang untuk longsor yang terjadi Tahun 2006



Sumber : Bapedal da Kabupaten Muara Enim, 2007

Upaya-upaya pencegahan yang telah dilakukan dan terus menerus akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor antara lain :

- a. Revegetasi lahan gundul dengan menanam lokasi-lokasi tersebut dengan tanaman-tanaman lokal setempat

- b. Mengamankan kawasan hutan lindung, dengan memasang papan peringatan, penyuluhan dan lain-lain.
- c. Menginventarisasi lokasi rawan longsor yang ditampilkan dalam bentuk peta.
- d. Melakukan inventarisasi lahan kritis dan menetapkan rencana konservasi lahan kritis yang mengacu pada peta lahan kritis

BENCANA BANJIR DI PENDOPO KECAMATAN TALANG UBI

Gambar 2.3 Rumah Penduduk yang terendam banjir



A. Kejadian Bencana

Hujan deras yang berlangsung terus menerus selama kurang lebih tujuh jam yang mengguyur kota Pendopo Kecamatan Talang Ubi pada hari Minggu 16 September 2007 sejak pukul 21.00 Wib sampai dengan Pukul 04.00 Wib hari Senin tanggal 17 September 2007 telah membuat Sungai Abab, Sungai Beracung dan Sungai Penokal meluap yang disebabkan oleh tingginya debit air yang masuk dari anak sungai di wilayah tersebut. . Akibatnya air sungai menggenangi empat kelurahan di Pendopo yaitu Kelurahan Talang Ubi Selatan, Talang Ubi Utara, Talang Ubi Timur dan Talang Ubi Barat dengan kedalaman air mencapai 2 – 4 meter dan luas genangan mencapai \pm 15 Ha pada pemukiman penduduk dan 40 Ha pada lahan sawah masyarakat.

B. Penyebab Bencana

Tekanan/ penyebab terjadinya banjir di Pendopo antara lain karena :

1. Terjadinya pendangkalan dan penyempitan alur Sungai Abab, Sungai Penulal dan Sungai Beracung akibat banyaknya bangunan di bantaran sungai.
2. Terjadinya alih fungsi lahan yang mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air.
3. Kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan penumpukan sampah pada alur sungai
4. Belum adanya sistem drainase teknis untuk pengaliran limpasan air ke Sungai Abab, Sungai Penulal dan Sungai Beracung yang melintas di Kota Talang Ubi.
5. Curah hujan yang tinggi

C. Dampak Bencana

1. Kerusakan Rumah

Berdasarkan hasil inventarisasi dari Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, kerusakan akibat kejadian ini yaitu :

- a. Kelurahan Talang Ubi Barat
 - Rumah penduduk yang terendam air sebanyak 527 KK
 - Rumah hanyut/roboh sebanyak 9 rumah
- b. Kelurahan Talang Ubi Timur
 - Rumah penduduk yang terendam air sebanyak 350 KK
 - Rumah yang rusak/roboh sebanyak 7 rumah
- c. Kelurahan Talang Ubi Utara
 - Rumah penduduk yang terendam air sebanyak 19 KK
 - Rumah yang rusak/roboh sebanyak 1 rumah
- d. Kelurahan Talang Ubi Selatan
 - Rumah Penduduk yang terendam air sebanyak 51 KK

Total rumah penduduk yang terendam air sebanyak 1.012 KK / 4.719 Jiwa dan rumah yang hanyut/roboh sebanyak 17 rumah.

2. Kerusakan infrastruktur

Banjir besar yang melanda kota Pendopo telah menyebabkan jalan dan 2 unit jembatan rusak sehingga sempat menyebabkan arus lalu lintas terhambat. Kerugian diperkirakan mencapai 1,2 milyar rupiah.

3. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Akibat kejadian ini tentu saja juga menyebabkan kerusakan lingkungan seperti misalnya banyaknya tanaman dan pepohonan yang rusak dan roboh. Sampah yang bertebaran dimana-mana dan air akibat banjir yang tentu saja kotor telah mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai penyakit. Jumlah penduduk yang sakit akibat banjir dan berkunjung ke Posko berjumlah 1.371 jiwa dengan jenis penyakit ISPA, Diare, Demam, Dermatitis, Luka, Kedinginan, Hipertensi, sakit gigi dan sakit mata dan yang meninggal akibat kedinginan berjumlah 1 orang.

D. Penanggulangan Dampak Bencana

Dalam rangka meringankan beban korban banjir, bantuan dari berbagai pihak berupa :

- a. Penanganan gawat darurat (emergency) dengan membentuk empat posko di tiap keluarahan yang terkena banjir. Di tiap posko terdapat posko tenaga kesehatan, posko dapur umum dan posko keamanan.
- b. Penyaluran bantuan : dari Pemkab Muara Enim, Pemprov Sumatera Selatan dan dari Ketua PMI Provinsi Sumatera Selatan antara lain berupa bahan makanan, air mineral, selimut, tikar, kain, terpal, obat-obatan, mobil ambulance dan tenaga medis
- c. Selain dari Pemerintah daerah, bantuan dari berbagai pihak juga berdatangan antara lain dari PT. Pertamina EP, PT. Medco E & P Indonesia, PT. Indelberg Indonesia, Bank Sumsel, PT. Binatek, PT. Pendopo Energi Batu bara.

Untuk mengantisipasi supaya tidak terulang kembali musibah banjir, Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama-sama TNI, stake holder dan masyarakat Talang Ubi melakukan kegiatan normalisasi Sungai Abab.

Gambar 2.4 Kegiatan Normalisasi Sungai di Pendopo

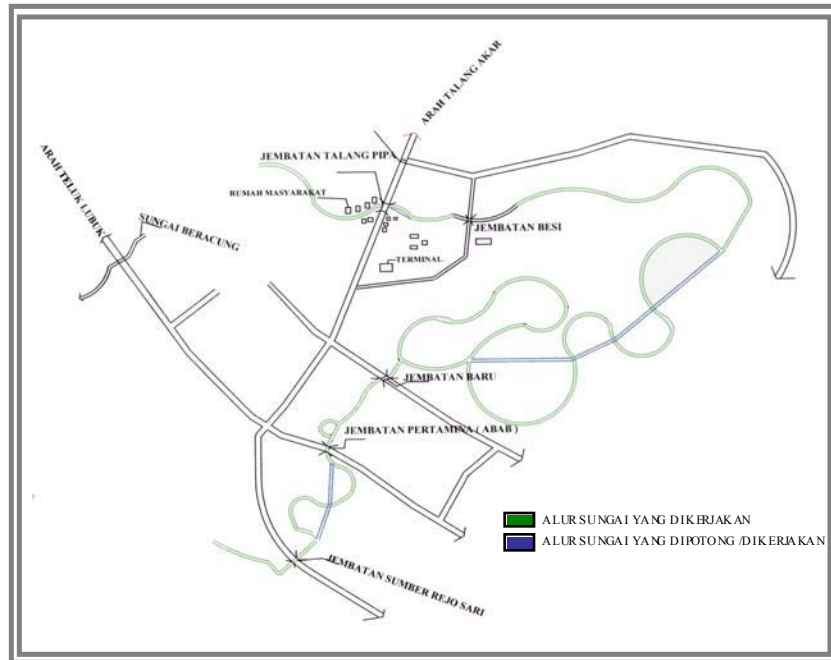


Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Kegiatan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Karya Bhakti TNI Manunggal Serasan yang berlangsung selama dua bulan dari tanggal 3 Oktober 2007 hingga 3 Desember 2007. Untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan normalisasi ini, bantuan alat berat dari perusahaan-perusahaan seperti PT. Musi Hutan Persada, PT. Pertamina dan PTBA telah dikerahkan.

Kegiatan Normalisasi sungai dimulai dari Jembatan Talang Pipa sampai dengan Jembatan Sumber Rejo yang dilakukan dengan cara pelebaran dan pengerukan alur sungai sepanjang 762 m. Selain itu juga dilakukan pembuatan alur sungai baru sepanjang 628 m. Total yang sudah dikerjakan sampai pembuatan Laporan ini dikerjakan adalah sepanjang 1.045 m.

Gambar 2.5. Sketsa Situasi Normalisasi Alur Sungai Abab



Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim, 2007

Selain normalisasi sungai juga dilaksanakan kegiatan perbaikan lima buah jembatan dan merelokasi rumah-rumah penduduk terutama yang ada di bantaran sungai.

Langkah jangka panjang yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai langkah pencegahan timbulnya kejadian/bencana alam banjir yang lebih besar lagi yaitu :

- a. Penyusunan Perencanaan Teknis sistem drainase kota Pendopo secara komprehensif
- b. Pemanfaatan lahan yang memedomani Rencana Tata Ruang Wilayah.

Permasalahan Banjir Di Kabupaten Muara Enim

Intensitas kejadian bencana banjir termasuk tinggi di Kabupaten Muara Enim selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Banjir tahunan di beberapa wilayah dalam Kabupaten Muara Enim merupakan masalah lingkungan yang tidak mudah untuk dipecahkan walaupun upaya penanggulannya sudah dilakukan. Banjir terbesar terjadi pada Tahun 2005 yang melanda 9 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Enim, Ujanmas, Benakat, Gunung

Megang, Tanah Abang, Rambang Dangku, Sungai Rotan dan Lubai dan mengakibatkan kerugian material sebesar Rp. 57.012.258.750,-.

Beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan banjir di Kabupaten Muara Enim antara lain :

- a. Keadaan topografi Kabupaten Muara Enim yang landai dan dilalui oleh sungai dan pertemuan muara anak sungai yang cukup besar debitnya.
- b. Wilayah Kabupaten Muara Enim sebagian besar adalah dataran rendah, yang diperburuk dengan banyaknya lokasi pemukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Berhubung pelaksanaan pembangunan belum diimplementasikan secara konsisten sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah karena masih adanya konflik kepentingan antar sektor.
- c. Badan-badan air yang semakin menyempit akibat tumbuhnya bangunan di bantaran sungai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai.
- d. Pembangunan fisik dan aktivitas masyarakat pada daerah hulu makin mengurangi daerah resapan atau daerah tangkapan air sehingga terjadi aliran air (*run off*) yang cukup deras tanpa hambatan.
- e. Terjadinya pendangkalan sungai atau sedimentasi, baik akibat proses alam maupun akibat aktivitas manusia.
- f. Curah hujan yang tinggi dan tidak menentu akibat kondisi musim antara penghujan dan kemarau yang tidak stabil.
- g. Banyaknya drainase yang tersumbat akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke selokan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan.

Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan banjir yaitu dengan cara :

- Penanaman pohon penghijauan di bantaran sungai secara berkelanjutan.
- Normalisasi Sungai dan anak-anak sungai.
- Penghutan kembali lahan bekas tambang, dengan pemanfaatan sebagai Taman Hutan Raya atau kegiatan ekonomi lainnya.
- Menggalakkan Program Penghijauan seperti Hutan Rakyat.
- Membuat Talud pada keempat sisi setiap jembatan-jembatan yang relatif panjang.
- Melaksanakan pembersihan sungai dan anak-anak sungai secara reguler.

- Melaksanakan kegiatan penghijauan terutama pada saat peringatan hari-hari lingkungan.
- Melibatkan peran serta masyarakat dengan mengadakan gerakan Jum'at Bersih. Melalui kegiatan ini masyarakat secara bergotong royong membersihkan lingkungan perumahan dan perkantoran termasuk pembersihan parit-parit jalan.
- Menambah fasilitas sarana dan prasarana kebersihan antara lain dengan menambah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) dan Truk Sampah.
- Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan dan melakukan penebangan hasil hutan secara liar.

3 PENURUNAN KUALITAS AIR PERMUKAAN

A. Kondisi Perairan Di Kabupaten Muara Enim

Kabupaten Muara Enim adalah daerah yang kaya akan sumber daya air permukaan, di sini mengalir dua sungai besar yaitu Sungai Enim dan Sungai Lematang. Sungai Enim adalah sungai yang dari hulu hingga hilirnya berada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Sungai Enim adalah muara dari banyak sekali anak-anak sungai. Sungai Enim bermuara ke Sungai Lematang yang merupakan bagian dari DAS Musi, sebagai sungai terbesar di Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagaimana masyarakat Indonesia yang budayanya sangat kental dan dipengaruhi oleh keadaan alam sekitar, masyarakat Muara Enim dapat dikatakan masyarakat sungai. Kebutuhan masyarakat sangat tergantung pada sungai, pertanian, perikanan dan kebutuhan domestik masyarakat masih sangat bergantung kepada sungai maupun anak sungai, masyarakat pun mempunyai suatu kebiasaan untuk membangun rumah sedekat mungkin dengan sungai.

Dari hasil pengujian kualitas air sungai selama tiga tahun terakhir walaupun secara keseluruhan masih memenuhi standar baku mutu Air Sungai Kelas I yang ditetapkan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Sungai. Namun beberapa parameter telah menunjukkan peningkatan dan melebihi baku mutu yang ditetapkan seperti parameter COD, BOD, dan minyak dan lemak. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya jumlah

penduduk dan makin beragamnya aktivitas yang menghasilkan limbah yang outletnya akhirnya bermuara ke sungai.

B. Tekanan/Penyebab Penurunan Kualitas Air

Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Muara Enim dari segi kandungan minyak dan lemak perlu menjadi perhatian yang utama karena :

1. Banyaknya kegiatan Industri / perusahaan yang berpotensi meningkatkan kandungan minyak dan lemak

Tabel. 2.1

Jenis Kegiatan yang Berpotensi Meningkatkan Kandungan Minyak dan Lemak pada Perairan di Kabupaten Muara Enim

No	Jenis Usaha / kegiatan	Jumlah perusahaan
1.	PPKS	5
2.	Industri Pengolahan Karet	3
3.	Asphalt Mixing Plant	2
4.	SPBU	9
5.	Minyak Bumi	8

Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

2. Banyaknya Usaha – usaha kecil di bantaran sungai / dekat sungai seperti rumah makan, cucian mobil, industri tahu/tempe dan lain-lain yang sebagai besar belum memiliki IPAL., sehingga limbah industri biasanya langsung di buang dan mengalir ke perairan umum.
3. Banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di bantaran sungai juga menjadi sumber poluter bagi air sungai. Limbah Domestik berupa deterjen dan sampah yang dibuang ke sungai dapat mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan. Menurut informasi dari UPTD Kebersihan dan pertamanan Kota Muara Enim, di kota Muara Enim ada 488 rumah yang berada di bantaran sungai yaitu 194 rumah di bantaran Sungai Enim, 126 rumah di bantaran Sungai Lematang, 49 rumah di bantaran Sungai Pelawaran dan 119 rumah di bantaran Sungai Aur.
4. Air limpasan atau air buangan yang dihasilkan Kegiatan pertambangan batubara baik melalui atau tanpa proses Kolam Pengendap Lumpur (KPL) juga menjadi salah satu sumber pencemar.
5. Penebangan hutan di daerah hulu sungai yang tidak mengikuti aturan juga akan

menjadi penyebab menurunnya kualitas air.

C. Dampak Penurunan Kualitas Air Permukaan

Penurunan kualitas air permukaan telah menimbulkan dampak berupa :

- a. Timbulnya gangguan kesehatan bagi masyarakat pengguna air sungai seperti gangguan kesehatan kulit dan Diare.

Tabel 2.2 Banyaknya Penderita Penyakit Kulit dan Diare Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2006

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Penderita Penyakit	
			Kulit	Diare
1.	Semende Darat Laut	Pajar Bulan	592	282
2.	Semende Darat Tengah	Tanjung Raya	462	357
3.	Semende Darat Laut	Pulau Panggung	757	656
4.	Tanjung Agung	Tanjung Agung	1.445	999
5.	Lawang Kidul	Tanjung Enim	2.078	2.892
6.	Muara Enim	Muara Enim	7.405	3.219
7.	Ujan Mas	Ujan Mas	680	832
8.	Gunung Megang	Gunung Megang	1.093	642
		Teluk Lubuk	254	341
		Sumaja Makmur	84	361
9.	Benakat	-		
10.	Rambang Danguku	Tebat Agung	1.392	1.033
		Muara Emburung	478	596
11.	Talang Ubi	Talang Ubi	2.658	2.654
12.	Tanah Abang	Tanah Abang	305	604
13.	Penukal	Simpang Bambang	3.057	1.293
14.	Abab			
15.	Penukal Utara	Air Itam	2.694	3.689
16.	Rambang	Sugih Waras	1.295	1.242
17.	Lubai	Beringin	726	1.030
		Sumber Mulya	1.210	1.267
18.	Lembak	Lembak	1.294	2.025
19.	Gelumbang	Gelumbang	1.785	2.515
20.	Kelekar			
21.	Sungai Rotan	Sukarami	909	1.196
22.	Muara Beida			
	Jumlah		32.653	29.725

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2007

- b. Meningkatnya biaya pengelolaan air bersih (PDAM), karena air baku yang tercemar akan sulit diolah menjadi sumber air minum.

Tabel 2.3 Biaya Pengelolaan Air Bersih PDAM Lematang – Enim Tahun 2005 - 2007

No	Tahun	Biaya Pengelolaan Air
1.	2005	Rp. 815.117.832,61
2.	2006	Rp. 860.354.414,60
3.	2007	Rp. 1.071.680.619

Sumber : PDAM Lematang – Enim, 2007

- c. Terganggunya kehidupan Biota air. Tingginya nilai beberapa parameter yang terkandung dalam air sungai berpengaruh terhadap kemampuan biota air untuk bertahan hidup.
- d. Sebagian besar sumber nafkah masyarakat tergantung pada perairan baik bagi usaha pertanian, perikanan, transportasi air dan industri. Dengan menurunnya kualitas air, berarti juga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi mereka.

D. Respon / Upaya Penanggulangan

Beberapa hal yang sudah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air :

- a. Mewajibkan perusahaan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang telah mewajibkan setiap kegiatan yang menggunakan media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkan oleh Bupati Muara Enim dan setiap 3 bulan sekali perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan pengawasan agar kualitas buangnya selalu memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Sampai dengan Tahun 2007 sudah ada 12 perusahaan yang memiliki IPLC.
- b. Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar dan penting untuk melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut mengelola lingkungannya sesuai dengan yang tercantum dalam RKL dan RPL.
- c. Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai dampak penting untuk menyusun dokumen UKL/UPL dan mewajibkan pihak perusahaan mengacu pada dokumen UKL/UPL dalam mengelola lingkungannya.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan terutama kinerja IPAL perusahaan dan setiap perusahaan diwajibkan secara berkala memeriksakan limbah cairnya di Laboratorium Bapedalda Kabupaten Muara Enim.

- e. Mendukung pelaksanaan Program PROPER dalam rangka penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan, yang dilaksanakan oleh Bapedalda Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup.
- f. Secara berkala melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas air Sungai Enim pada titik-titik pantau yang telah ditentukan.
- g. Mewajibkan setiap kegiatan yang akan memanfaatkan air permukaan untuk kebutuhan industri, pertambangan, pertanian dan sebagainya untuk memiliki Izin Pemanfaatan Air Permukaan dari Bupati Muara Enim melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim. Sudah ada 6 (enam) perusahaan yang mendapatkan Izin Pemanfaatan Air Permukaan yaitu PTBA, PTPN VII Unit Usaha SUNI, PTPN VII Unit Usaha SULI, PTPN VII Unit Usaha Beringin, dan PT. Tanjungenim Lestari dan PT. Pertamina Geothermal Energi.
- h. Bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan normalisasi sungai.
- i. Bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan terutama di bagian hulu.

Beberapa hal mendatang yang perlu dilakukan yaitu :

- 1. Melakukan analisa efektifitas kemampuan IPAL perusahaan-perusahaan yang ada terutama untuk kandungan minyak dan lemak
- 2. Mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan IPALnya
- 3. Bekerja sama dengan instansi perguruan tinggi/peneliti untuk mendata/mengkaji kualitas seluruh perairan yang berpotensi menurun kualitasnya akibat kegiatan-kegiatan yang berpotensi membuang minyak atau benda.

4. PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

A. Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Munculnya berbagai kegiatan/usaha yang ada di Kabupaten Muara Enim selain memberikan dampak positif berupa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada meningkatnya kerusakan lingkungan. Di Kabupaten Muara Enim terdapat 67 perusahaan termasuk industri, perkebunan, pertambangan, rumah sakit dan SPBU, serta 136 industri rumah tangga yang berpotensi sebagai sumber pencemar. Banyaknya pengaduan masyarakat tentang adanya berbagai kasus pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat selama Tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya menjadi persoalan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebagian besar kasus-kasus ini terjadi di lokasi tambang minyak.

Misalnya saja adanya kebocoran pipa saluran distribusi minyak pada perusahaan minyak. Minyak yang tercecer dapat mencemari lahan/tanah disekitarnya terutama perusahaan yang lokasinya berdampingan dengan lahan perkebunan penduduk. Hal ini tentu saja dapat merugikan dan meresahkan masyarakat di sekitarnya.

Dari tahun ke tahun luasan hutan semakin menurun dan dialihkan untuk penggunaan lain. Akibatnya di beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim kondisi lahan yang ada telah berubah menjadi lahan kritis. Menurut informasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim luasan lahan kritis yang ada di Kabupaten Muara Enim sekitar \pm 132.454,08 Ha atau 14,34% dari luas Kabupaten Muara Enim.

Beberapa pengaduan masyarakat mengenai kasus dugaan pencemaran yang masuk ke Bapedalda Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2007 dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel. 2.4

Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup yang Terjadi di Kabupaten Muara Enim Pada Tahun 2007

NO	LOKASI (WAKTU KEJADIAN)	PERUSAHAAN/ PIHAK YANG DUGA SUMBER PENCEMAR	URAIAN KASUS	TINDAK LANJUT
01	Ds. Sumber Jaya Talang Akar Kec. Talang Ubi (Januari 2007)	PT. Pertamina Pendopo	Adanya genangan air dikebun Karet masyarakat akibat tersumbatnya gorong-gorong disisi hilir sumur bor Talang Akar 83 PT. Pertamina Pendopo	Pihak perusahaan diminta untuk memperbaiki Gorong-gorong yang telah rusak tertutup lumpur dan terhadap warga yang dirugikan agar diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kades dan Camat setempat.
02	Gas Sumur BNG #12 Field Pendopo Kecamatan Talang Ubi (Januari 2007)	PT. Pertamina EP Region Sumatera Area Pendopo.	Telah terjadi Kebocoran Valve Casing Conductor Ø 2" x 3000 Psi diduga dipotong orang yang tak bertanggung jawab	Telah dilaksanakan Penanggulangan dengan cara menginjeksi lumpur dan air asin Untuk memperbaiki sumur akan dilakukan dengan perangkat RIG H-30
03.	Talang Akar Pendopo Kecamatan Talang Ubi. (Maret 2007)	PT. Pertamina EP Area Pendopo.	Terjadi kebakaran tanki minyak No. 103 dengan kapasitas tampung 15.000 barrel Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian tersebut tanaman Karet Masyarakat layu/kering. Saat kejadian diperkirakan minyak mentah ± 800 barel dan sebagian minyak mengalir ke ground pit.	PT. Pertamina Pendopo mengalihkan minyak dari tanki 103 ke tanki 102 dan terjadi ceceran yang mengalir ke danau didalam lokasi Booster. Tanki dilengkapi dgn 2 arde 2 buah penangkal petir, tanggul pengaman tanah setinggi 1 m ground pit dan sekeliling booster dipagari dgn kawat harmonika.
04.	Sungai Sebayas Desa Pantawewa Kecamatan Penual. (Maret 2007)	JOB Pertamina Lekom Maras Pengabuan Kec. Penual.	Berdasarkan laporan Camat Penual terjadinya pemotongan pipa oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga minyak mentah mengalir ke sungai Sebayas dan mencemari sungai tersebut.	Kebocoran pipa telah diatasi dengan pemasangan camp pipa 6". Minyak mentah sempat mengalir kesungai ± 200 meter ke hilir diperkirakan minyak yang tumpah ± 5 Barel dan telah diambil kembali ± 3 barel sisanya yang melekat di pohon, ranting maupun serasah disepanjang sungai sebayas dilakukan pembersihan.
05.	Desa Talang Baru Kecamatan Lembak. (Maret 2007)	PT. Pertamina DCH Prabumulih.	Telah terjadi kebocoran pipa trans line jalur Prabumulih - KM 3 Plaju.	Minyak yang tercecer telah dikutip dengan menggunakan <i>oil boom</i> , <i>absorbent</i> serta <i>vacuum truck</i> . Kompensasi lahan dan tanam tumbuhan milik penduduk yang tercemar Peningkatan pengawasan jalur pipa minyak maupun gas dengan melibatkan unsur inspeksi untuk evaluasi teknis terhadap kelayakan jalur pipa. Telah dilakukan pengambilan sampel air Sungai Rumpitan pada titik ± 150M dari tempat pengutipan minyak dgn pH terukur 7,62. Hasil pengujian sampel, parameter COD dan Minyak lemak melebihi baku mutu yang ditetapkan.

06.	Lubuk Lesung Jalur Rambutan Betung Desa Padang Bindu Kecamatan Benakat. (April 2007)	PT. Pertamina EP Region Sumatera Area Pendopo.	Telah terjadi kebocoran pipa Gas Ø 16 milik PT. Pertamina EP. Region Sumatera Area Pendopo di lokasi Lubuk Lesung KP 82 Betung desa Padang Karena erosi / terkikisnya tanah dibawah jalur pipa oleh luapan air Sungai Benakat, meyemburnya air dan lumpur yang mengenai pepohonan hutan belukar radius lebih kurang 50 meter.	Tim Bapedalda memberikan saran-saran sebagai berikut: - Pada jalur pipa dipinggir sungai Benakat agar dipasang Support/penyangga pipa. - Bantaran sungai Benakat yang tererosi agar dipasang Talud penahan erosi dan disekitar lokasi kejadian agar dibersihkan dari lumpur dan tanah agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas setempat.
07.	Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab. (April 2007)	PT. Golden Blossom Sumatera.	Terjadinya limpasan air ke Sungai / Suak / danau / Lebung akibat pembangunan Boundaries / Drainase PT. Golden Blossom Sumatera yang bocor. Akibatnya sisa-sisa dari kegiatan seperti akafakar, potongan gabus ikut hanyut dibawah air melalui Sungai Meruih kearah sungai Musi hal inilah dikatakan masyarakat sebagai limbah dari PT. Golden Blossom Sumatera.	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Mengantisipasi limpasan air ke Sungai/Suak/Danau/Lebung agar pembangunan Boundaries drainase di blok 3 lokasi plasma segera diselesaikan dan dialirkan ke kanal induk. - Setiap pembangunan Drainase, agar serasah, Potongan² kayu dan gabus dibersihkan terlebih dahulu bila perlu dipasang penyelet sbg penahan sehingga tidak ikut mengalir ke lahan masyarakat/ke kanal induk yang akhirnya ke sungai musui. - mengadakan musyawarah dgn masyarakat/Pengemil atau pengambil lelang sungai suak,danau,lebung dan masyarakat desa sekitarnya yang difasilitasi pemerintah desa dan Kecamatan.
08.	Desa. Lingga Kecamatan Lawang Kidul. (Mei 2007)	PT. Lingga Jaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah truk yang membawa bahan baku Karet parkir disepanjang Jalan Raya - Masalah bau Karet yang berasal dari air limpasan maupun proses pengeinginan bahan baku. - Air yang mengalir kesiring/ parit dan sungai. 	<ul style="list-style-type: none"> - Truk yang membawa bahan baku yang parkir disekitar pabrik telah ditertibkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan masyarakat sekitar. - Bau karet yang berasal dari air limpasan telah ditanggulangi dengan menggunakan DEORUB (dead oran Rubber) - Air yang melimpas ke siring telah ditanggulangi melalui proses IPAL dan dilakukan pengukuran kualitas air limbah setiap bulan serta membuat bak penampung sebanyak dua buah.
09.	Desa. Sugiham Kecamatan Rambang. (Mei 2007)	PT. Medco E & P Lematang Indonesia.	Adanya genangan air di kebun Karet masyarakat akibat tersumbatnya gorong-gorong pipa PT. Medco E & P Lematang Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - memperbaiki gorong-gorong - Musyawarah dan mufakat untuk ganti tugi lahan masyarakat - Meningkatkan pengawasan pada jalur² pipa

10.	Desa Karang Mulya Kecamatan Lubay. (Mei 2007)	PT. PGN PT. Cipta Panji Manunggal.	Adanya tanaman Karet Masyarakat Desa Karang Mulya terendam air akibat tersubatnya gorong-gorong dan hujan terus menerus. Selain itu telah terjadi Erosi dan Longsor di Jalan. Ppa Nomor 36 KP. 10 milik PT. PGN yang melintasi kebun masyarakat yang merupakan daerah cekungan dan aliran air dari areal sekitar menuju anak sungai Tanjung Putus. Adanya erosi dan pada jalan PT PGN sehingga menutupi aliran air dan anak sungai Tanjung Putus	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki jalan dan membuat gorong-gorong - Terhadap karet warga yang terendam Air agar diberikan lepedulian oleh perusahaan kepada pemilik kebun
11.	Di jalur Km. 2 SP Dewa Kecamatan PPP Pengabuan (Juni2007)	PT. Lekom Maras.	Telah terjadi kebocoran ppa minyak mentah milik JOB Pertamina Lekom Maras dirusak oleh pihak ketiga yang mengakibatkan Pohon Karet milik Asulterkena semburan minyak.	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak PT. Lekom Maras telah mengambil minyak yang tumpah ± 3 Barrel sisanya dilakukan pembersihan.
12.	Desa Muara Lematang Kec. Sungai Rotan (Juli 2007)	PT. Golden Blossom Sumatera (PT.GBS)	Terjadinya pelimpasan air pada lokasi hilir kanal pada titik lokasi BPN GBS 23 yang mana pada saat peninjauan air dalam keadaan tinggi sehingga limpasan mengalir ke hutan kebaran dan lahan masyarakat Muara Lematang yang sebelumnya ditanami padi	<ul style="list-style-type: none"> - pada lokasi kanal sepanjang 7Km terdapat 8 titik kebocoran dan sudah di tutup,hanya 1 titik dibuat Pintu air yang mengalir ke sungai Lingkis - Pada lokasi kebun inti yang alirannya menuju sungai Jongor sudah di buat cekdam. - Pada kanal induk sudah diperdalam yg semula 2,5m menjadi 4m yang bermuara ke Sungai Musi.
13.	Ke c. Rambang Dangku (Agustus 2007)	PT. Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper	Ke khawatiran masyarakat terhadap dampak Limbah B3 yang dihasilkan PT. TEL dan keberatan akan pembangunan Landfill #4 yang diduga di dalam nya terdapat mata air	<ul style="list-style-type: none"> - mengadakan sosialisasi Ipd Masyarakat. - Melakukan normalisasi / kanalisasi anak sungai penjelawatan yang berkelek-kek sehingga lurus dan benar2 berjarak 500 mdari landfill - Di sekitar lokasi pembangunan Landfil terdapat sejumlah mata air sehingga pembuatan landfill tidak menggunakan sistem pengaliran. - Menanam sepanjang bantaran kanal sungai Penjelawatan dgn tanaman produktif seperti Karet agar bisa dimanfaatkan masyarakat.
14	Desa Karang Endah Selatan Kec. Gelumbang (September 2007)	Limbah Domestik	<p>Tercemanya sumur warga Karang Endah Selatan yang berbau tidak sedap serta berwarna kekuning-kuningan.</p> <p>Hasil analisis terhadap air sumur: Timbulnya warna kekuning-kuningan pada air sumur dipengaruhi oleh kadar senyawa Besi (1,306) serta Mangan (1,1) yg berasal dari Tumbuhan dan hewan yang mati,rembesan tinja</p>	<p>Untuk sementara air sumur digunakan sebagai MCK saja sedangkan untuk air minum dapat mengambil dari sumur WSSLIC yang berjumlah 9 buah.</p> <p>Langkah yang perlu dilakukan dalam hal tsb adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sumur masyarakat agar memenuhi jarak dan konstruksi yang ideal utk mencegah masuknya sumber pencemar.

	<p>hewan yang mati, rembesan tinja akibat penguapan yang tinggi di musim kemarau serta lindi pembuangan sampah.</p> <p>Kandungan Amoniak (NH₃) Pada sumur waiga yang bersumber dari tanah dangkal dan dipengaruhi oleh rembesan yang berasal dari pembuangan limbah, jamban (Septik Tank), pembuangan sampah domestik di bantaran sungai. Kadar amoniak adalah 5,1 melebihi kadar maksimum 1,5.</p>	<p>pencemar.</p> <p>2. Peningkatan pelayanan air bersih dari kegiatan program air bersih (WSSLIC).</p> <p>3. Peningkatan kesadaran masyarakat dlm memelihara sanitasi lingkungan tidak membuang sampah pd sungai</p> <p>4. meningkatkan pemanfaatan sumur resapan sbg upaya minimisasi pencemaran air.</p>
--	--	--

Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

B. Tekanan /Penyebab Terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan dan berbagai kasus pencemaran yang terjadi di Kabupaten Muara Enim antara lain disebabkan oleh :

- a. Semakin meningkatnya jumlah kegiatan atau perusahaan-perusahaan baru di Kabupaten Muara Enim setiap tahunnya yang berarti juga meningkatkan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Muara Enim.

Gambar 2.6

Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Aktifitas Industri



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

- b. Masih rendahnya kesadaran pengusaha untuk mengimplementasikan dokumen AMDAL dan UKL/UPL yang telah disahkan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan.
- c. Konversi hutan menjadi areal perkebunan dan pertambangan.

Adanya konversi hutan menjadi areal yang lebih produktif yaitu perkebunan dan pertambangan menyebabkan struktur dan komposisi tanah mengalami perubahan. Pada kegiatan perkebunan, akar tanaman yang ditanam di lokasi perkebunan kurang

mampu untuk menyerap air dibandingkan dengan akar tanaman pepohonan asli yang ada di hutan. Demikian juga dengan kegiatan pertambangan, pengupasan tanah pucuk mengakibatkan lahan menjadi kritis. d. Adanya kegiatan tambang terbuka termasuk kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah menimbulkan terjadinya perubahan bentang alam.

Ada tiga Perusahaan Pertambangan Batubara yang sudah beroperasi di Kabupaten Muara Enim yaitu PT. Tambang Batubara Bukit Asam, PT. Batubara Bukit Kendi, dan PT. Prima Mulya Sarana Sejahtera. Sedangkan kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C biasanya dikelola oleh masyarakat atau merupakan industri kecil. Menurut Data dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, luas lahan yang telah digunakan untuk kegiatan tambang galian golongan C adalah 71, 846 Ha.

d. Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kebiasaan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar tampaknya agak sulit untuk dihentikan. Pertimbangan biaya yang murah dan alat sederhana menjadi alasan utama mereka. Sampai saat ini belum ditemukan alternatif lain yang lebih efektif, murah dan memungkinkan dilakukan oleh masyarakat lokal.

e. Perilaku masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pemanfaatan sampah dan pemakaian produk-produk daur ulang. Sampah terutama sampah organik dapat merusak tanah/lahan karena tidak bisa diuraikan sehingga menutupi tanah dan vegetasi yang ada di atasnya akibatnya proses-proses alami tanah yang melakukan daur dekomposisi bahan-bahan organik menjadi unsur yang bermanfaat bagi tanaman menjadi terganggu.

C. Dampak Terhadap Lingkungan

- a. Terjadinya perubahan bentang lahan akibat kegiatan pertambangan .
- b. Menurunnya tingkat kesuburan tanah akibat pencemaran tanah
- c. Meningkatnya luas lahan kritis
- d. Berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Muara Enim
- e. Sampah atau Limbah Domestik yang mengotori lingkungan baik di perairan maupun di perkotaan dapat mengganggu keindahan dan kenyamanan lingkungan.
- f. Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir pada saat musim penghujan

D. Upaya / Respon Penanggulangan

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan kualitas lingkungan antara lain adalah :

- a. Melaksanakan Program Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN).
- b. Melaksanakan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan bagi lahan bekas tambang PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk untuk dimanfaatkan sebagai Taman Hutan Raya.
- c. Melaksanakan kegiatan penghijauan terutama pada hari – hari besar peringatan nasional.
- d. Melakukan penilaian kelayakan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) bagi kegiatan yang akan beroperasi di Kabupaten Muara Enim oleh Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Muara Enim.
- e. Melaksanakan penanganan kasus-kasus pencemaran dengan melibatkan dinas terkait
- f. Melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan dengan pengujian kualitas air sungai dan udara ambient.
- g. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim dan melakukan pembinaan terhadap industri-industri kecil termasuk pengusaha tambang galian golongan C.
- h. Menginventarisasi perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3
- i. Melakukan inventarisasi lahan kritis dan memetakannya.
- j. Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan
- k. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dengan mengadakan kegiatan gotong-royong kebersihan jum'at bersih, mengadakan lomba-lomba kebersihan sekolah, kantor dan tingkat kelurahan dan membagikan bibit-bibit pohon kepada masyarakat untuk di tanam di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.
- l. Mendukung Program Menuju Indonesia Hijau yang diprogramkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dimulai dari pembuatan peta-peta lokasi sumber daya air, lokasi perkebunan, lokasi daerah rawan bencana, peta penggunaan lahan dan sebagainya.
- m. Menumbuhkan rasa cinta lingkungan sejak dini kepada anak-anak dengan mengadakan lomba lukis lingkungan hidup untuk siswa tingkat sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama, dan lomba menulis artikel tentang lingkungan untuk murid tingkat sekolah menengah atas.

BAB III

AIR

1. KONDISI PERAIRAN

Sebagai rangkaian kegiatan pengelolaan lingkungan terutama lingkungan perairan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam hal ini Bapedalda Kabupaten Muara Enim telah menjadikan pemantauan Kualitas Sungai sebagai kegiatan rutin setiap tahunnya, pemantauan dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu tahun yaitu pada musim kemarau musim pancaroba dan musim hujan guna mengetahui kualitas sungai untuk dijadikan dasar-dasar dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan selanjutnya.

Untuk kegiatan pemantauan setiap tahunnya dilakukan peningkatan baik jumlah titik pantau maupun parameter yang dipantau, agar diperoleh data yang lebih representatif dalam menetapkan mutu air sungai. Namun dikarenakan sungai-sungai yang ada di Kabupaten Muara Enim terutama yang berada dalam DAS Musi yang melintasi beberapa

Gambar 3.1. Sungai Enim



kabupaten seperti Sungai Lematang yang melewati Kabupaten Muara Enim beserta beberapa anak sungai lainnya yang dipantau langsung oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan, maka Bapedalda Kabupaten Muara Enim pada tahun 2007 menitikberatkan Pemantauan pada Sungai Enim yang dari hulu sampai hilirnya berada di Kabupaten Muara Enim.

Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Tabel. 3.1 Rekapitulasi Hasil Analisis terhadap Kualitas Sungai Enim

No.	Parameter Lokasi	Koordinat		pH	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	DHL (mg/L)	DO (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
		Bujur Timur	Lintang Selatan						
1	Sungai Enim Tengah			7.40	12	24.8	41.2	10.47	3.35
2	Sungai Air Beringin			7.70	7.67	14.83	24.2	14.66	4.82
3	Desa Indramayu	103° 46' 39.8"	04° 02' 59.1"	6.28	9	96	142.9	9.7	1.36
4	Desa Pandan Dulana	103° 47' 40.1"	04° 01' 29.0"	6.48	8	17	61.0	9.5	1.96
5	Desa Lebak Budi	103° 48' 13.8"	03° 59' 51.3"	6.46	7	18	60.1	9.8	1.46
6	Desa Tanjung Agung	103° 48' 10.6"	03° 56' 30.3"	6.51	8	28	58.0	9.4	1.06
7	Desa Darma	103° 48' 0.02"	03° 48' 0.7"	6.92	14	28	60.8	9.6	1.64
8	Dekat RM Karfika	103° 48' 12.3"	03° 45' 42.7"	6.90	29	18	62.7	9.1	1.56
9	Jembatan PTBA	103° 47' 34.9"	03° 45' 12.0"	7.14	24	14	58.2	9.1	2.40
10	Hilir Pasar Ti Enim	103° 47' 41.2"	03° 44' 1.35"	6.98	23	23	91.4	8.9	2.20
11	Hilir Lingga Jaya	103° 47' 47.9"	03° 44' 23.7"	6.79	44	21	101.9	8.8	2.10
12	Hilir PLTU	103° 47' 53.1"	03° 43' 42.6"	6.62	111	44	107.2	9.2	2.29
13	Hilir Karang Raia	103° 47' 17.9"	03° 40' 27.1"	6.04	129	15	88.3	9.6	3.95
14	Intake PDAM	103° 46' 49.8"	03° 39' 37.0"	6.58	25	23	85.3	9.2	1.24
15	Belakang Kop Bintang	103° 46' 49.6"	03° 39' 34.5"	6.34	33	26	88.3	9.8	1.46
	Baku Mutu			6-9	Maks 50	Maks 1000		Min 6	Maks 2

No.	Parameter Lokasi	Koordinat		COD (mg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Amonia (mg/L)	Besi (mg/L)	Mangan (mg/L)	Phosfat (mg/L)
		Bujur Timur	Lintang Selatan						
1	Sungai Enim Tengah			22.05	0.66	<0.01	0.303	0.007	
2	Sungai Air Beringin			17.15	1.00	<0.01	0.245	0.012	
3	Desa Indramayu	103° 46' 39.8"	04° 02' 59.1"	39.10	0.66	<0.01	0.208	<0.1	1.79
4	Desa Pandan Dulana	103° 47' 40.1"	04° 01' 29.0"	27.60	1.00	<0.01	0.21	0.1	0.23
5	Desa Lebak Budi	103° 48' 13.8"	03° 59' 51.3"	36.80	0.33	<0.01	0.226	0.3	0.16
6	Desa Tanjung Agung	103° 48' 10.6"	03° 56' 30.3"	34.50	0.33	<0.01	0.271	0.7	0.17
7	Desa Darma	103° 48' 0.02"	03° 48' 0.7"	67.62	0.66	<0.01	0.275	<0.1	0.52
8	Dekat RM Karfika	103° 48' 12.3"	03° 45' 42.7"	25.30	0.66	<0.01	0.348	1.6	1.98
9	Jembatan PTBA	103° 47' 34.9"	03° 45' 12.0"	12.42	1.00	0.13	0.267	0.1	0.87
10	Hilir Pasar Tj Enim	103° 47' 41.2"	03° 44' 1.35"	28.52	0.33	<0.01	0.329	<0.1	0.28
11	Hilir Lingga Jaya	103° 47' 47.9"	03° 44' 23.7"	82.80	0.33	<0.01	0.604	0.2	0.3
12	Hilir PLTU	103° 47' 53.1"	03° 43' 42.6"	23.00	0.66	<0.01	0.916	0.8	0.07
13	Hilir Karang Raia	103° 47' 17.9"	03° 40' 27.1"	20.70	2.00	<0.01	0.308	0.2	0.17
14	Intake PDAM	103° 46' 49.8"	03° 39' 37.0"	29.90	0.66	<0.01	0.232	0.1	3.12
15	Belakang Kop Bintang	103° 46' 49.6"	03° 39' 34.5"	27.60	1.00	<0.01	0.255	<0.1	0.18
	Baku Mutu			Maks 10	Maks 1	Maks 0.5	Maks 0.3	Maks 0.1	Maks 0.2

Baku Mutu : Pergub Sumsel No 16 Th 2005

Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

A. Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Enim Tahun 2007

Titik Pantau Pemantauan Kualitas Sungai Enim pada tahun 2007 mengalami penambahan sebanyak 5 titik dibanding tahun 2006 yaitu sebanyak 3 titik di Sungai Enim dan 2 titik di dua anak sungai yang berada di hulu / asal Sungai Enim yaitu Sungai Enim Tengah dan Sungai Air Beringin, dan juga dilakukan penambahan parameter menjadi 12 parameter. Itu semua dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih akurat mengenai kualitas Sungai Enim.

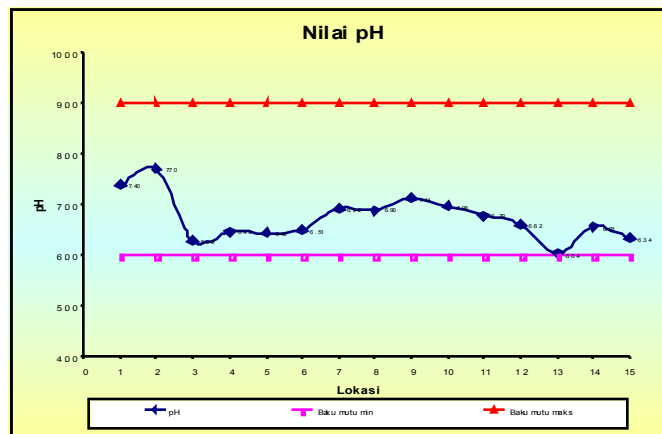
Secara umum dari hasil pengujian di laboratorium kualitas Sungai Enim masih memenuhi Baku Mutu Air Sungai berdasarkan Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan No. 16 tahun 2005, namun ada beberapa lokasi yang melebihi Baku Mutu seperti Hilir PLTU dan Hilir Karang Raja sedangkan parameter yang umumnya tidak memenuhi Baku Mutu yaitu Chemical Oxygen Demand (COD). Secara rinci akan diuraikan dalam bentuk Grafik sebagaimana penjelasan berikut:

1. Derajat Keasaman (pH)

pH menunjukkan jumlah ion H^+ yang ada di dalam air/ cairan, yang menentukan asam / basa cairan tersebut. pH air mumi/ aquades yaitu 7 dan untuk kelangsungan hidup yang baik umumnya makhluk hidup membutuhkan pH sekitar 6-9, sebagaimana juga Baku Mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 tahun 2005.

Dari analisis seluruh sampel di seluruh titik pantau diketahui bahwa pH air Sungai Enim masih memenuhi syarat tersebut yaitu antara 6,04 – 7,70

Gambar 3.2 Grafik Derajat Keasaman Sungai Enim



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

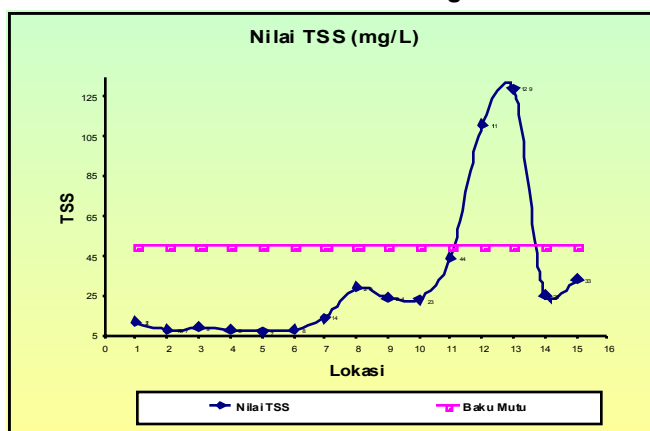
2. Padatan Tersuspensi Total / Total Suspended Solid (TSS)

TSS adalah jumlah keseluruhan zat padat/padatan baik yang berbentuk organik atau non organik yang ada dalam air dalam kondisi terapung, melayang atau mengendap. Padatan yang terapung dapat menghalangi oksigen dan sinar matahari masuk ke dalam air. Padatan terapung dan melayang adalah penyebab utama kekeruhan.

Dari hasil analisis sampel diketahui TSS Sungai Enim berkisar antara 7-129 mg/L, pada umumnya TSS berada di bawah Baku Mutu (**50 mg/l**) yaitu sekitar 7-44 mg/L hanya di dua titik pantau terlihat TSS melebihi Baku Mutu yaitu di Hilir PLTU kadarnya **111 mg/l** dan di Hilir Karang Raja **129 mg/l**. Jika diamati di lapangan tingginya nilai TSS di lokasi Hilir PLTU dapat diduga akibat pemusatan sumber pencemar di lokasi tersebut, karena di dekat lokasi pemantauan ada outlet PT Lingga Djaya (Pabrik Karet), PLTU Bukit Asam, berdekatan dengan tepian mandi tempat penduduk melakukan aktifitas MCK serta juga berdekatan dengan lahan penambangan batubara milik PT Bukit Asam.

Sedangkan lokasi pemantauan Hilir Karang Raja berjarak lebih kurang 2 Km dari titik pantau Hilir PLTU sangat berdekatan dengan Pabrik Tahu skala rumah tangga. TSS juga masih tinggi, ini dapat diduga karena jarak yang tidak terlalu jauh antara dua lokasi tersebut sehingga proses purifikasi belum terjadi secara sempurna, dan TSS tersebut terakumulasi dengan sumber baru. Namun dilihat di titik pantau dekat intake PDAM yang berada cukup jauh dari sumber pencemar sehingga terjadi proses seperti oksidasi, pengendapan ataupun penguraian oleh mikroorganisme yang menyebabkan terjadi penurunan yang signifikan angka TSS tersebut menjadi 25 mg/l.

Gambar 3.3 Grafik Kandungan TSS

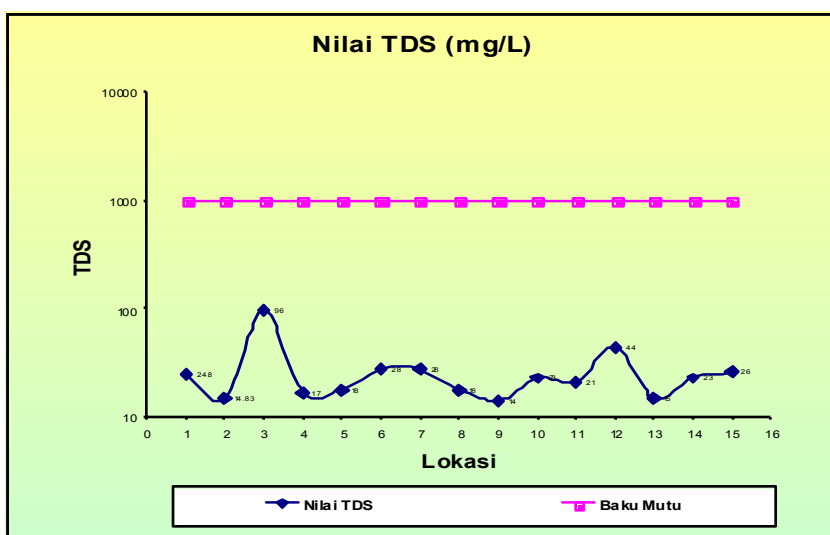


3. Padatan Terlarut Total/ Total Dissolve Solid (TDS)

Selain dalam kondisi tersuspensi zat padat yang berada dalam cairan bisa terlarut, padatan yang terlarut tidak terlihat, namun dampaknya dapat diketahui setelah dikonsumsi atau dimanfaatkan. Inilah yang menimbulkan anggapan bahwa air jernih belum tentu sehat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 tahun 2005 kadar maksimum yang diizinkan yaitu **1000 mg/l**.

Dari pengamatan diketahui bahwa TDS seluruh titik pantau berada di bawah baku mutu yang di syaratkan (**14 – 96 mg/l**).

Gambar 3.4 Grafik Kandungan TDS

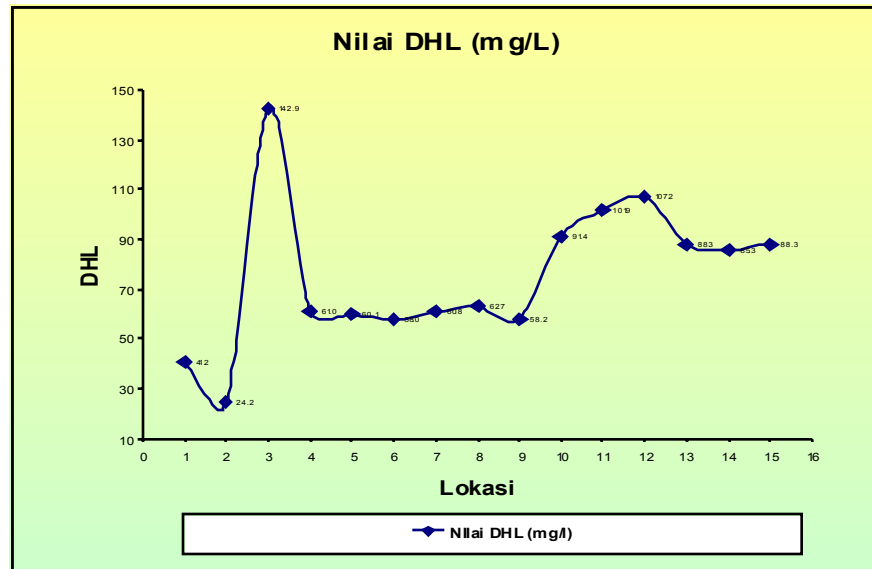


Sumber : Bappedda Kabupaten Muara Enim 2007

4. Daya Hantar Listrik (DHL)

Daya hantar listrik menunjukkan kemampuan cairan untuk menjadi konduktor/ penghantar listrik, biasanya berhubungan dengan jumlah ion atau zat-zat yang dapat berubah menjadi ion dalam larutan tersebut. Belum ada peraturan yang mengatur Baku Mutu kadar DHL air sungai dan dari pengamatan tingkat DHL Sungai Enim yaitu 24,2 – 142,9 mg/l.

Gambar 3.5 Grafik Kandungan DHL

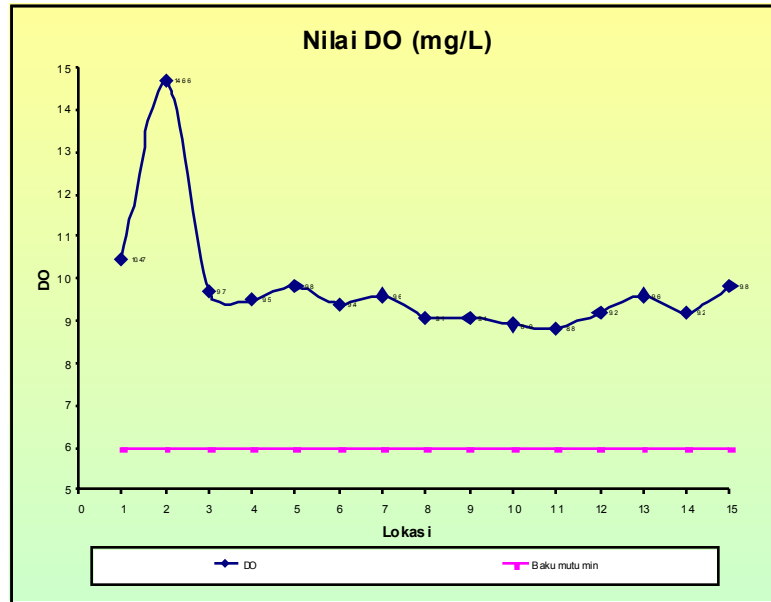


5. Oksigen Terlarut/ Dissolve Oxygen (DO)

Kehidupan makhluk hidup di perairan sangat tergantung dengan jumlah Oksigen yang ada/ terlarut dalam air tersebut. Faktor terlarutnya Oksigen di perairan ditentukan juga oleh suhu/ temperatur, tekanan dan cahaya matahari. Kadar DO diukur di lapangan, jadi kualitasnya adalah sesaat dan dapat berubah-ubah. Pada kondisi standar (1 atm) pada suhu 0°C Oksigen dapat terlarut di air sebesar 14,6 mg/L pada suhu 35 °C 7 mg/L. Sedang sesuai peraturan Baku Mutu yang dipakai yaitu lebih besar dari **6 mg/l**, maka jika kadarnya lebih besar dari itu akan lebih baik. Rendahnya kadar Oksigen terlarut membatasi kemampuan sungai untuk menjemihkan/ purifikasi air dari polutan-polutan yang terdapat di dalamnya.

Dari seluruh titik pantau diketahui bahwa kadar DO Sungai Enim yaitu 8,8 – 14,66 mg/L dan seluruhnya memenuhi Baku Mutu yang di syaratkan.

Gambar 3.6 Grafik Kandungan DO



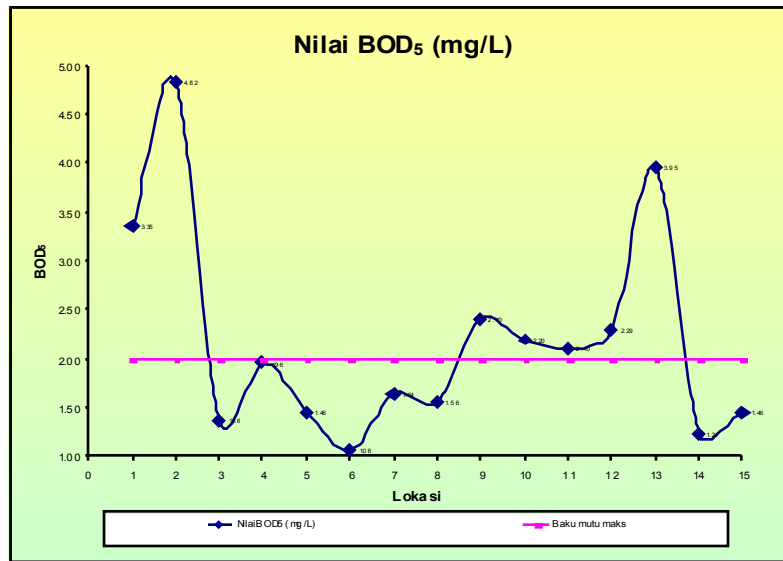
Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

6. Kebutuhan Oksigen Biokimia/Biochemical Oxygen Demand (BOD)

Beberapa senyawa yang ada dalam air terdiri zat-zat yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk keperluan hidupnya sehingga terurai menjadi bahan yang lebih sederhana dan kemudian dapat dimanfaatkan oleh makhluk autotrof dalam proses fotosintesis.

Proses perombakan/ penguraian tersebut dilakukan dengan reaksi biokimia yang membutuhkan oksigen, jumlah Oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa – senyawa tersebut lah yang disebut BOD. Ini dijadikan parameter bahwa jika makin banyak dibutuhkan Oksigen artinya makin banyaklah senyawa-senyawa yang terdapat diperairan, atau makin tercemarlah kondisi perairan tersebut, berdasarkan Baku Mutu kadar BOD yang di syaratkan yaitu **2 mg/l**.

Gambar 3.7 Grafik Kandungan BOD



Sumber : Bappeda Kabupaten Muara Enim, 2007

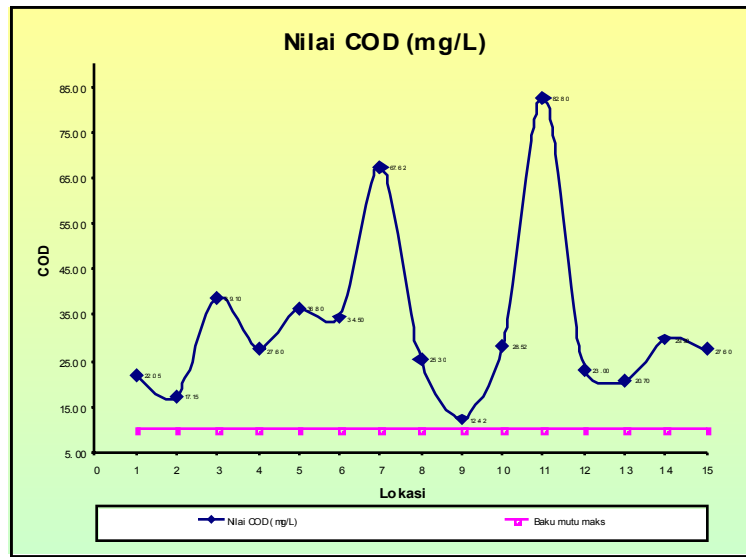
Hasil analisis sampel dari 15 titik pantau diketahui bahwa nilai BOD Sungai Enim berkisar antara **1,06 – 4,82 mg/l**, dan terdapat 7 titik yang melampaui Baku Mutu yaitu di Sungai Enim Tengah (**3,35 mg/l**), Sungai Air Beringin(**4,82 mg/l**), Jembatan PTBA(**2,40 mg/l**), Hilir Tanjung Enim(**2,20 mg/l**), Hilir Lingga Jaya (**2,10 mg/l**), Hilir PLTU (**2,29 mg/l**), Hilir Karang Raja (**3,95 mg/l**). Selain di Sungai Enim Tengah dan Sungai Air Beringin dapat diduga tingginya BOD karena dekat sekali dengan sumber pencemar, yang berpotensi menyumbangkan berbagai polutan diperairan.

7. Kebutuhan Oksigen Kimia/ Chemical Oxygen Demand (COD)

Penguraian senyawa-senyawa/ polutan yang terdapat dalam air tidak hanya dapat diketahui dengan melihat kebutuhan Oksigen dalam reaksi biokimia oleh mikroorganisme saja, tapi kebutuhan Oksigen untuk mengoksidasi seluruh zat-zat yang terdapat dalam air secara keseluruhan yang disebut dengan COD merupakan parameter yang juga sangat perlu. Biasanya COD jauh lebih tinggi dibanding BOD.

Dari analisis terhadap seluruh titik pantau di ketahui COD Sungai Enim cukup tinggi yaitu **12,42 – 82,80 mg/l** sedangkan Baku Mutu maksimal **10 mg/l**.

Gambar 3.8 Grafik Kandungan COD

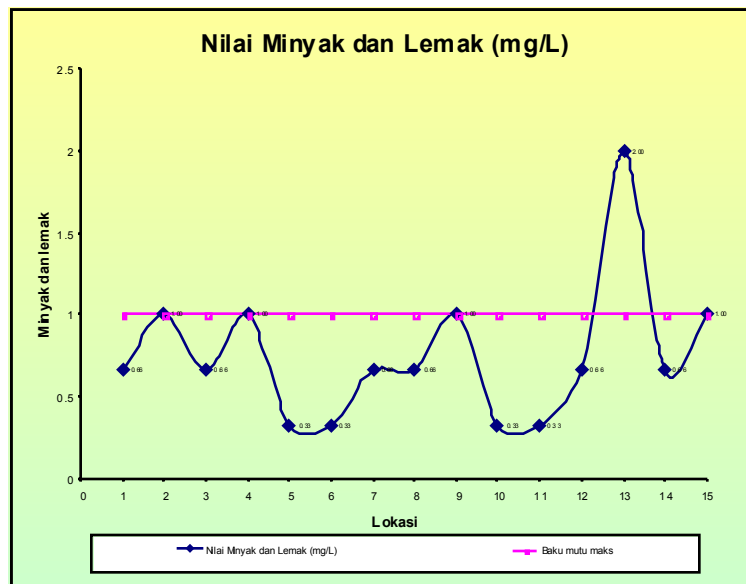


Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Pemantauan ini dilakukan pada musim kemarau yaitu ketika debit sungai yang cenderung kecil dapat diduga juga sebagai faktor yang mempengaruhi tingginya COD, dikarenakan jumlah zat-zat pencemar yang dibuang lebih tinggi dibanding air sungai yang mengencerkannya.

8. Minyak dan Lemak

Gambar 3.9 Grafik Kandungan Minyak Dan Lemak



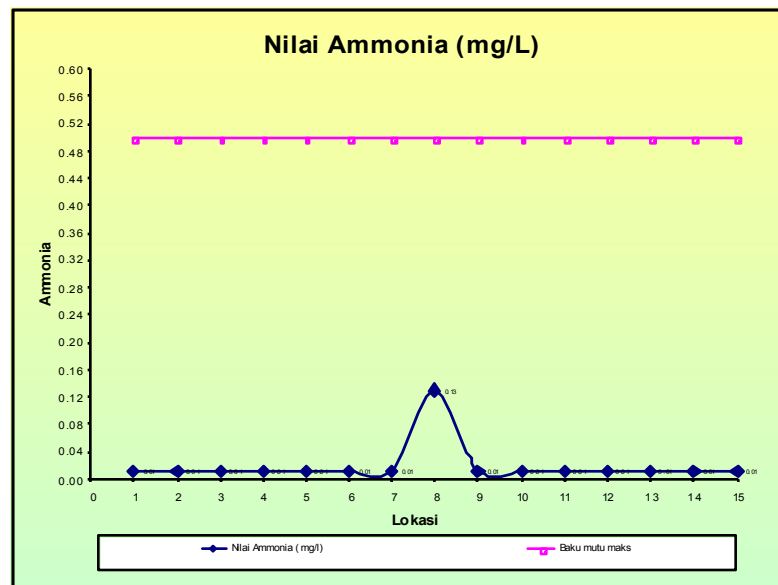
Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Minyak dan lemak biasanya terkandung dalam limbah domestik dan beberapa limbah industri tertentu, selain itu aktifitas rawa juga dapat menghasilkan minyak dan lemak. Minyak dan lemak dianggap satu parameter karena sifatnya yang sama, yaitu sukar terlarut dan cenderung terpisah dari air. Minyak dan lemak yang mengapung dipermukaan air membentuk filamen – filamen yang menghalangi masuknya sinar matahari dan Oksigen ke perairan sehingga mengganggu proses fotosintesis. Selain di permukaan air, minyak dan lemak juga bisa terperangkap dalam endapan/ lumpur, minyak dan lemak biasanya mempunyai ikatan yang sangat kuat sehingga sangat sulit diuraikan mikroorganisme, namun dapat terurai oleh senyawa alkali/ deterjen.

Baku mutu yang ditetapkan untuk minyak dan lemak yaitu **1 mg/l** dan dari hasil analisis nilai minyak dan lemak Sungai Enim yaitu **0,33 mg/l - 2 mg/l** pada umumnya nilai minyak dan lemak masih sesuai dengan Baku Mutu maksimum yang dibolehkan yaitu dari 0,33 – 1 mg/l, hanya satu titik yang melebihi Baku Mutu yaitu di Hilir Karang Raja (**2 mg/l**).

9. Amonia

Gambar 3.10 Grafik Kandungan Amonia



Sumber : Bapedal da Kabupaten Muara Enim, 2007

Amonia (NH_3) adalah senyawa dalam bentuk gas yang biasanya terjadi sebagai aktifitas dekomposisi bahan – bahan organik yang mengandung Nitrogen seperti Protein. Di dalam air, oleh bakteri Amonia dapat dirubah menjadi senyawa Nitrit dan Nitrat. Nitrit dan Nitrat adalah senyawa yang dibutuhkan untuk kesuburan tanaman. Makanya diperairan yang

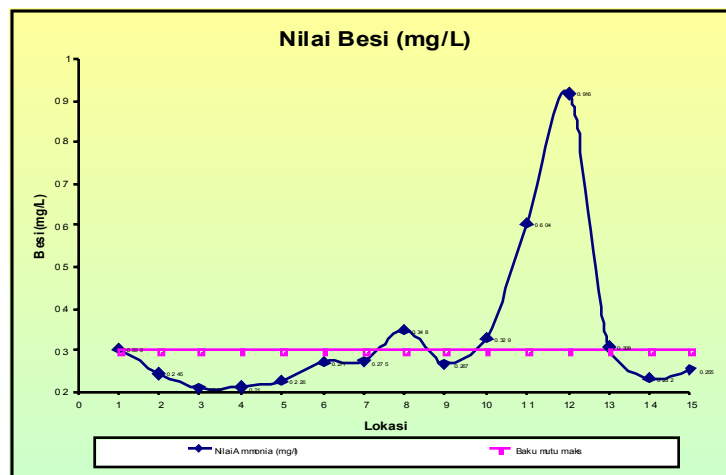
tercemar dijumpai enceng gondok dalam jumlah yang banyak. Nitrat dalam jumlah yang besar masuk ke air tanah melalui peristiwa perkolas, karena tanah tidak mampu mengikatnya. Sehingga jumlah Nitrat yang tinggi di suatu tempat, mempengaruhi air tanah di sekitarnya.

Dari hasil analisis terhadap seluruh titik pantau jumlah Amonia masih dibawah Baku Mutu maksimum (**0,5 mg/l**), nilainya berkisar antara **<0,01 – 0,13 mg/l**.

10. Besi (Fe)

Besi biasanya terikat dalam tanah dalam bentuk Feri Oksida dan Iron Sulfida (pyrit) yang bersifat tidak larut serta dalam bentuk Feri Karbonat (siderit) yang sangat tinggi kelarutannya. Di dalam air, karena proses penguraian aerob, senyawa besi dalam tanah tadi akan lepas menjadi Ion Fe^{2+} , yang dapat berikatan dengan zat-zat lain, sehingga pada perairan yang tinggi Carbon Dioksida biasanya mengandung Feri Carbonat yang cukup tinggi. Sejauh ini, tidak ada efek yang berbahaya jika meminum air yang mengandung Besi, hanya saja air mengandung Besi biasanya keruh, sehingga dibutuhkan biaya untuk menghilangkan kekeruhan ini dengan penambahan koagulan. Kandungan Besi pada air juga berpengaruh pada rasa air yang di konsumsi bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah di bawah 0,3 mg/l dapat menimbulkan cita rasa yang tidak enak. Selain itu air yang mengandung besi jika digunakan untuk mencuci akan menyebabkan pakaian berwarna kekuning-kuningan.

Gambar 3.11 Grafik Kandungan Besi



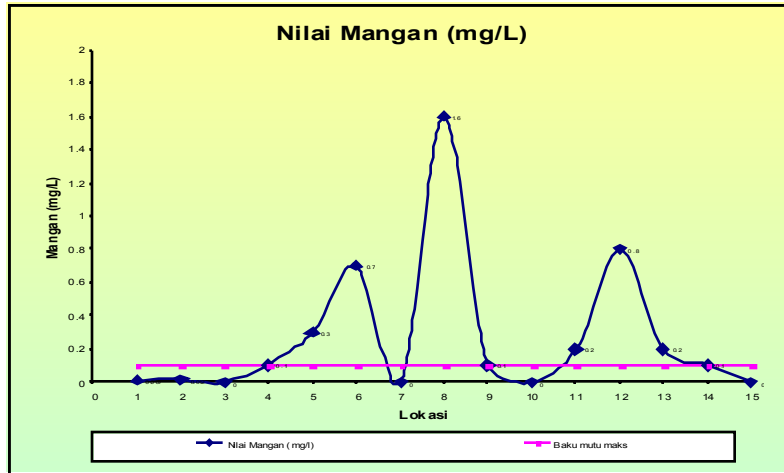
Sumber : Bappeda Kabupaten Muara Enim 2007

Dari hasil pemantauan ada enam lokasi yang Besinya Melebihi Baku Mutu (**0.3 mg/l**) yaitu: Sungai Enim Tengah (**0,303 m g/l**), Delat Rumah makan Kartika (**0,348 m g/l**),

Hilir Tanjung Enim (0,329 mg/l), Hilir Lingga Jaya(0,604 mg/l), Hilir PLTU (0,916 mg/l), Hilir Karang Raja (0,308 mg/l). Karena umumnya Besi Berasal dari Batuan yang ada dalam tanah dapat diduga tingginya kandungan Besi yang tinggi karena terbawa aliran limpasan dari lahan terbuka/ tambang batubara.

11. Mangan

Gambar 3.12 Grafik Kandungan Mangan



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

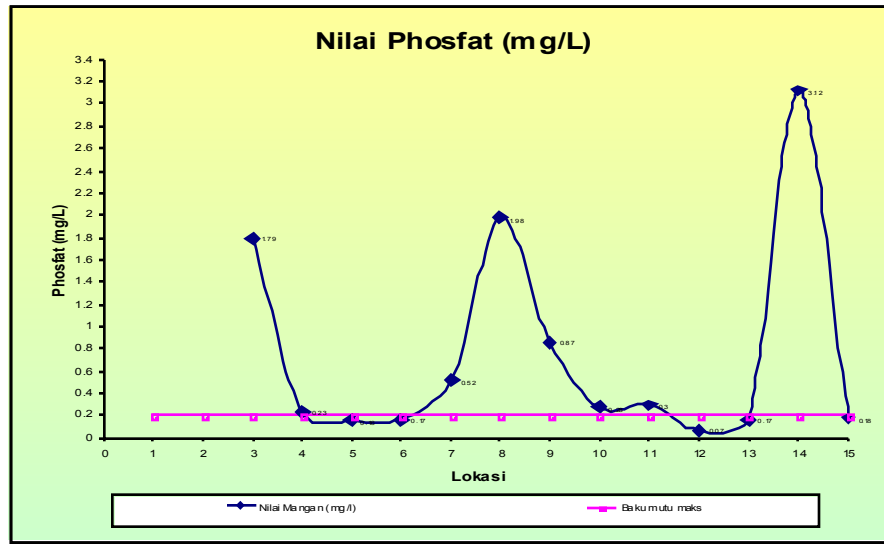
Mangan mempunyai sifat yang hampir sama dengan Besi, hanya saja jika besi bisa teroksidasi pada pH di bawah 6, Mangan dapat teroksidasi di pH dibawah 9. Efek yang ditimbulkan sama yaitu kekeruhan dan rasa yang tidak enak pada air.

Dari hasil analisis diketahui Nilai Mangan pada Sungai Enim yaitu: 0,007 – 1,6 mg/l, ada 6 lokasi yang kandungan Mangannya melebihi Baku Mutu (0,1 mg/l) lokasi-lokasi tersebut hampir sama dengan lokasi dimana Besi juga tinggi dan di seluruh titik pantau yang berada di sepanjang lokasi penambangan batubara.

12. Fosfat

Keberadaan Fosfat berpengaruh hampir sama dengan Nitrat, karena senyawa ini termasuk yang dibutuhkan oleh tanaman, maka pada air yang banyak mengandung Phofat biasanya akan menimbulkan *blooming* enceng gondok dan tanaman lainnya yang hidup di air. Fosfat biasanya terkandung dalam limbah domestik terutama deterjen diperkirakan 2 sampai 3 mg/l, dan juga bisa berasal dari senyawa protein dari aktifitas makhluk hidup.

Gambar 3.13 Grafik Kandungan Phosfat



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Pada Sungai Enim, Phosfat yang terkandung antara 0.07 sampai dengan 3.12 mg/l kebanyakan titik pantau mengandung senyawa Phosfat yang melebihi Baku Mutu (0.2 mg/l) dapat diduga ini disebabkan oleh pengaliran limbah domestik ke sungai serta pemanfaatan Sungai Enim untuk kegiatan MCK.

B. Penetapan Titik Pantau

Penetapan titik pemantauan dilakukan dengan mengisikan data titik pantau ke dalam pencitraan udara dengan *login* ke internet *Soft ware* yang disebut *Google Earth*. Program ini memungkinkan kita melihat citra visual dari udara, penyebaran titik pantau di sepanjang aliran Sungai Enim, dan beberapa kondisi lahan di sekitar titik tersebut.

Alasan penentuan titik pantau :

1. Penentuan titik pantau di bagian hulu (Titik pantau 1,2), yaitu lokasi yang belum banyak aktifitas yang dapat menurunkan kualitas air sungai.
2. Penentuan titik pantau 3,4,5 dengan alasan di lokasi ini kualitas air sungai baru dipengaruhi oleh kegiatan domestik saja.
3. Penentuan titik pantau 6,7 dengan pertimbangan di lokasi ini air sungai mungkin terpengaruh kualitasnya selain oleh kegiatan domestik juga oleh kegiatan pertambangan batubara.

4. Titik pantau 10 dan 15 diambil, karena lokasi ini adalah pertemuan aliran air/ anak sungai yang bermuara ke sungai Enim, dimana aliran air tersebut melalui perkotaan sehingga membawa beban pencemar terutama dari aktifitas domestik. Di titik tersebut diperkirakan terjadi pencampuran antara air anak sungai dengan air sungai Enim. Titik 15 yang merupakan muara anak sungai Aur dengan Sungai Enim, dimana sungai Aur membelah kota Muara Enim dan menjadi badan penerima dari limbah perkotaan. Titik 10 adalah muara anak Sungai Kiahaan ke Sungai Enim, dimana Sungai Kiahaan melewati kawasan padat penduduk di Desa Lingga dan Saringan Kecamatan Lawang Kidul.
5. Penentuan titik pantau 9,11,12 dan 13 berdasarkan pertimbangan bahwa titik berada di lokasi yang sangat rawan dan diduga kandungan pencemar yang diterima sangat tinggi (titik ekstrim), karena terdapat dua atau lebih sumber pencemar. Titik-titik ini berdekatan dengan industri karet, kegiatan PLTU dan pertambangan batubara.
6. Titik pantau 8, berada di dekat Rumah Makan Kartika, Tanjung Enim. Rumah makan yang cukup besar ini membuang limbah ke anak sungai yang berada di dekat lokasi rumah makan, dari titik tersebut hanya sekitar 5 (lima) meter anak sungai tersebut masuk ke Sungai Enim.
7. Titik pantau 13, berada Desa Karang Raja di dekat rumah penduduk yang juga pabrik tahu yang berpotensi mencemari sungai.
8. Titik pantau 14 berada di kawasan lokasi Intake PDAM, guna mengetahui kualitas air yang dijadikan air baku PDAM.

C. Hasil Pemantauan Kualitas Sungai Lematang

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Tim dari Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan terhadap air Sungai Lematang (Tabel 3.4) menunjukkan secara keseluruhan kualitas air Sungai Lematang masih memenuhi Baku Mutu Air Sungai yang ditetapkan menurut Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2005.

Tabel 3.2

**Rekapitulasi Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai Lematang
Tahun 2007**

No.	Parameter	pH	TDS (mg/l)	TSS (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	Amonium (mg/l)	Nitrat/NO ₃ (mg/l)	Nitrit/NO ₂ (mg/l)
	Lokasi								
1	Teluk Lubuk	6.46	215	14.3	0.82	2.9	0.08	4.07	0.0355
2	Banu Ayu	6.20	238	15.6	0.71	1.3	0.05	1.86	0.121
3	Suka Merindu	6.32	290	18.3	1.3	2.27	0.04	3.95	0.0274
	Baku Mutu	6-9	Maks 1000	Maks 50	Maks 2	Maks 10	-	-	0.06

No.	Parameter	Phenol (µg/l)	Krom (mg/l)	Mnyak lemak (mg/l)	Klorida (mg/l)	Pospat (mg/l)	Sulfat (mg/l)	Fecal Coly (i ml/100m)	Total Coliform (i ml/100m)
	Lokasi								
1	Teluk Lubuk	0,060	<0,0001	< 0,5	10	0,33	13	100	2.900
2	Banu Ayu	0,023	<0,0001	< 0,5	15	0,16	27	100	6.000
3	Suka Merindu	0,015	<0,0001	< 0,5	0,0412	0,08	11	<100	100
	Baku Mutu	1	0,02	1000	600	0,2	400	100	10.000

Sumber : Bapedal da Provinsi Sumatera Selatan, 2007

D. Sumber Air Bersih RumahTangga

Kebutuhan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Muara Enim dipenuhi oleh pihak PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Lematang Enim dengan cara berlangganan langsung. Mengingat besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan air bersih, maka sumber daya air di Kabupaten Muara Enim sangat vital. Kegunaan air bersih bagi manusia dan sebagian besar penduduk terutama untuk kepentingan rumah tangga, industri, pertanian dan lainnya.

Terbatasnya sarana air bersih dari PDAM keluar wilayah perkotaan dikarenakan besarnya biaya yang diperlukan untuk membangun instalasi pengolahan air bersih, sehingga masyarakat yang belum dapat dilayani oleh PDAM memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih dengan membuat sumur bor dan sumur gali.

Instalasi air bersih yang dimiliki PDAM Lematang Enim sebanyak 2 unit WTP (*Water Treatment Plant*). Sementara itu jumlah pelanggan yang telah dilayani selama tahun 2006 untuk kelompok rumah tangga tercatat 11.436 rumah tangga dengan total kapasitas produksi air sebanyak 2.715.725 m³, untuk industri/hotel dengan produksi air 8.354 m³, untuk rumah sakit sebanyak 431.608 m³ dan untuk keperluan lainnya sebanyak 3.179.953 m³.

Sumber Air Baku PDAM Lematang Enim berasal dari air sungai dengan volume 4/104.534,69 m³/thn , dari air tanah sebanyak 179.860,01 m³/thn, dari Mata Air sebanyak 66.867,48 m³ sehingga total keseluruhan produksi 4.261.262,27 m³. Pelayanan air bersih dari PDAM sudah hampir menjangkau seluruh kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim, namun masih di lingkup ibukota kecamatan dan beberapa kota kecil. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat telah dilaksanakan sarana penyediaan air bersih melalui Program WSLIC (*Water Supply Sanitation for low Income Communities*).

2. TEKANAN TERHADAP SUMBER DAYA AIR

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Muara Enim, maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan pembangunan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa mendatang. Untuk itu air perlu di kelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan khususnya masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumberdaya alam (*natural resources depletion*).

Perubahan kualitas sungai merupakan indikator kondisi sungai apakah masih dalam keadaan baik atau tercemar. Pencemaran sungai didefinisikan sebagai perubahan kualitas suatu perairan akibat kegiatan manusia, yang pada gilirannya akan mengganggu kehidupan manusia itu sendiri ataupun makhluk hidup lainnya. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh senyawa yang masuk kealiran sungai yang bergerak ke hilir bersama aliran air atau tersimpan di dasar, berakumulasi (khususnya pada endapan) dan suatu saat dapat juga terjadi pencucian atau pengenceran. Senyawa tersebut utamanya yang beracun berakumulasi dan menjadi suatu konsentrasi tertentu yang berbahaya bagi mata rantai kehidupan.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Air adalah

a. Adanya beberapa jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran sungai Enim dan Lematang antara lain:

(1) Kegiatan domestik; termasuk di dalamnya kegiatan kesehatan (rumah sakit) dan *food additives* (seperti bahan pengawet makanan) serta kegiatan-kegiatan yang berasal dari lingkungan permukiman baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Efluen yang dibuang biasanya berupa pencemar organik, tapi ada juga berupa senyawa anorganik, logam, garam-garaman (seperti deterjen) yang cukup berbahaya karena bersifat patogen.

(2) Kegiatan industri dan pertambangan; mempunyai banyak sekali variasi; bisa berupa efluen organik dari home industri makanan (tahu tempe) dan dapat juga dari industri pengolahan maupun bengkel-bengkel, workshop. Sedangkan efluen anorganik dihasilkan dari debu dapat dihasilkan oleh kegiatan industri pertambangan. Bisa juga berupa pencemaran panas (thermal), misalnya dari pembangkit tenaga listrik (PLTU)

(3) Pertambangan Batubara; Kegiatan pertambangan batubara dapat berdampak terhadap komponen lingkungan fisik (bentang alam) dan kimia (pH, Fe, Mn, TSS), biologi (kehidupan ekologi perairan seperti plankton dan benthos), sossebud (persepsi masyarakat serta konflik pemanfaatan lahan). Pencemaran air yang bersumber dari pertambangan batubara dapat berasal dari air limpasan atau air buangan yang dihasilkan baik melalui atau tanpa proses Kolam Pengendap Lumpur (KPL).

Kegiatan eksploitasi tambang batubara yang posisinya terletak pada sisi Timur dan Barat sungai Enim dan sebelah Timur sungai Lematang dan diperkirakan memiliki cadangan 6.246.804.000 ton (Tahun 2006), saat ini dikelola oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk., PT. Bukit Kendi, dan PT. Prima Mulya Sarana Sejahtera.

(4) Kegiatan Pembangkit Listrik; Pengaruh kegiatan PLTU Sektor Bukit Asam Tanjung Enim terhadap kualitas air Sungai Enim yaitu pada parameter fisik kimia seperti TSS, BOD, COD, pH serta suhu air yang meningkat. Hal ini dapat berdampak pada kualitas air serta kehidupan perairan di Sungai Enim.

(5) Kegiatan Pengolahan Karet dan Industri Crumb Rubber :

Parameter buangan limbah pengolahan karet yaitu parameter Amonia, N, BOD, COD, pH dan residu tersuspensi serta berpengaruh terhadap fisik sungai Enim antara lain terdeteksi secara visual adanya butiran-butiran karet di unit Water Treatment PDAM Kabupaten Muara Enim. Industri pengolahan karet yang ada di Kabupaten Muara Enim yaitu PT. Lingga Jaya di Desa Lingga Jaya Kecamatan Lawang Kidul , PT. Swasthi Parama Mulya di Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai, PTPN VII Unit Usaha Beringin di Desa Karang Agung Kecamatan Lubai dan beberapa perusahaan baru yaitu PT. Mekar Cempiang Rajabrana di Desa Gunung Raja Kecamatan Lubai.

(6) Kegiatan Industri CPO (*Crude Palm Oil*); Parameter buangan limbah pengolahan *Crude Palm Oil* yaitu parameter BOD, COD, pH, residu tersuspensi, Nitrogen serta minyak dan lemak yang berpengaruh terhadap fisik air sungai . Adanya residu yang berasal dari kegiatan *Crude Palm Oil* antara lain terdeteksi secara visual adanya *oil film* dan wama pekat pada beberapa anak sungai seperti di sekitar sungai Enau dan sungai Lagan. Kegiatan Industri CPO yang ada di Kabupaten Muara Enim yaitu PT. Bumi Sawindo Permai di Kecamatan Tanjung Agung, PT. Surya Bumi Agro Langgeng di Kecamatan Talang Ubi, PTPN VII Unit Usaha SUNI, PTPN VII Unit Usaha SULI, dan yang baru akan beroperasi yaitu PT. Golden Blossom Sumatera, PT. Cahya Vidi Abadi dan PT. Pandega Usaha Kahuripan.

(7) Penambangan Galian Golongan C; Dampak penambangan galian C (batu koral dan pasir) terutama pada perubahan bentang alam serta terjadinya penurunan kualitas air pada komponen fisik-kimia seperti, TSS, kekeruhan, dan sedimentasi sehingga turut memperberat beban kerusakan Sungai Enim dan Sungai Lematang. Selain itu aktivitas penambangan ini juga mengganggu kehidupan biota air. Penambangan itu dilakukan oleh perusahaan swasta dan masyarakat.

(8) Kegiatan pertanian; terutama akibat penggunaan pupuk dan pembasmi hama, di mana senyawa-senyawa yang terdapat di dalamnya tidak mudah terurai walaupun dalam jumlah yang sedikit, tetapi justru aktif pada konsentrasi yang rendah. Pengaruh zat hara tanaman (garam-garam nitrat dan fosfat yang larut dalam air), serta yang berasal dari penguraian limbah organik seperti limbah cair atau pelepasan pupuk nitrat, yang jika berlebihan dapat mengakibatkan pengkayaan unsur hara (*eutrofikasi*).

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sungai dengan perilaku membuang sampah ke air sungai/ mengganggu sungai sebagai tempat sampah.
- c. Banyaknya penduduk yang membangun tempat tinggal di bantaran sungai, sehingga buangan limbah domestik langsung mengalir ke sungai.
- d. Perubahan Peruntukan lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat meningkatkan limpasan air permukaan serta memperbesar debit puncak pada waktu musim hujan dan memperkecil aliran sungai pada musim kemarau. Hal ini dapat mempercepat proses kerusakan sumber daya air dan mengancam ketersediaan air yang berkelanjutan

3. DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP PERAIRAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

Gambar 3.14
Endapan di Hilir Sungai Enim



Sumber : Bappedalda Kab. Muara Enim, 2007

1. Peningkatan sedimen di bagian hilir sungai

Penelitian untuk mengetahui peningkatan sedimen di Sungai Enim memang belum pernah dilakukan penelitian yang khusus, namun jika diperhatikan sumber – sumber yang berpotensi menimbulkan peningkatan dampak peningkatan sedimen di sungai cukup banyak, selain itu juga telah terjadi berbagai dampak yang diduga akibat peningkatan sedimen di sungai seperti luapan air sungai dan

terbentuknya delta sungai di daerah hilir.

Penyebab peningkatan sedimentasi di Sungai Enim:

a. Aktifitas penambangan terbuka

Kegiatan penambangan batubara di Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan sistem terbuka, yaitu dengan mengupas lapisan atas tanah hingga ditemukan cadangan batubara, lokasi penambangan berada di sisi Barat dan Timur Sungai Enim dan sebelah timur Sungai Lematang dan diperkirakan cadangan batubaranya mencapai 6 Milyar Ton. Pertambangan dekat Sungai Enim dikelola oleh PT Batubara Bukit Asam

(persero), Tbk dan PT Batubara Bukit Kendi, luas Kuasa Penambangan yang dimiliki oleh PT Bukit Asam yaitu 7.700 Ha.

Dampak pengupasan tanah pada kegiatan tambang, menyebabkan habisnya vegetasi sehingga mudah sekali terjadinya erosi/ pengikisan lapisan tanah, dalam kegiatan penambangan juga menimbulkan lubang lebar dan dalam sehingga tempat terkumpulnya air larian di lokasi penambangan. Air kemudian dipompakan dan dialirkan Kolam Pengendap Lumpur (KPL), untuk diolah dan kemudian baru dilepas ke media perairan terdekat. Sehingga dapat diduga, semakin luas areal pembukaan lahan pertambangan maka akan semakin besar debit air yang masuk ke sungai.

Jadi kualitas air yang dialirkan ke sungai akan dipengaruhi oleh kapasitas pengolahan dalam KPL, hal ini sangat erat kaitannya dengan lamanya waktu tinggal/ *retention time* dalam KPL sehingga partikel – partikel yang terbawa oleh air limpasan bisa terendapkan dalam secara maksimal sampai memenuhi Baku Mutu yang di syaratkan.

- b. Longsoran dinding sungai dan longsoran di tebing yang berpotensi terbawa ke sungai. Beberapa penyebab terjadinya longsoran di dinding sungai yaitu tingginya debit air pada waktu hujan menyebabkan terkikisnya dinding sungai. Debit air sungai yang besar tersebut diduga akibat makin berkurangnya tutupan lahan yang menjadi media resapan air hujan.

Gambar 3.15. Longsoran dinding Sungai Enim



Sumber : Bapedda Kabupaten Muara Enim 2006

Selain longsor di dinding sungai, pada daerah-daerah yang longsor dan berbatasan dengan sungai, sedimennya berpeluang masuk dan terkumpul di sungai.

Gambar 3.16 Longsor tebing yang masuk ke sungai



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

- c. Pembukaan lahan oleh petani tradisional di sekitar bantaran sungai.

Pembukaan lahan pertanian dilakukan dengan cara dibakar, ataupun dengan penebasan vegetasi awal. Pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan pada daerah yang relatif kecil ini umumnya dapat dikendalikan tidak meluas karena berada di dekat sungai. Namun dampak berkurangnya vegetasi penutup di bantaran sungai sampai tanaman yang dikembangkan cukup kuat perakarannya adalah meningkatnya limpasan air permukaan yang membawa sedimen ke sungai.

Gambar 3.17 Lahan Pertanian di Bantaran Sungai



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

- d. Pembukaan lahan untuk perumahan, bengkel/ cucian mobil, rumah makan, industri kecil di sepanjang bantaran Sungai Enim

Meskipun pemanfaatan lahan untuk kegiatan – kegiatan tersebut relatif kecil, namun kebiasaan masyarakat yang membuka usaha di dekat/ di bantaran sungai menyebabkan dampak pencemar akan langsung masuk ke sungai, jika jumlahnya banyak dan terus meningkat maka akumulasi sedimen serta pencemar lain yang diterima sungai juga akan meningkat. Industri – industri rumah tangga yang ada dekat aliran sungai di Kabupaten Muara Enim umumnya yaitu:

1. Rumah makan/ restoran
2. Bengkel dan cuci mobil
3. Pabrik Tahu
4. Pabrik Tempe
5. Pabrik kerupuk makanan kecil, termasuk warung makan.

1. Berkurangnya sumber air bersih untuk kebutuhan domestik masyarakat

Penurunan kualitas air permukaan berdampak pada ketersediaan air bersih yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Sehingga masyarakat semakin menggantungkan kebutuhan air bersih melalui PDAM. Sedangkan PDAM juga harus meningkatkan anggaran biaya pengolahan air, karena umumnya sumber air baku PDAM juga berasal dari sungai yang semakin lama semakin turun kualitasnya.

2. Berkurangnya keanekaragaman dan jumlah biota perairan akibat tingkat pencemaran yang tinggi

Tingginya nilai beberapa parameter yang terkandung dalam air sungai berpengaruh terhadap kemampuan biota air untuk bertahan hidup.

4. RESPON / UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Upaya – upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam pengendalian pencemaran air agar kualitas air sungai tetap terjaga yaitu :

1. *Pengdolaan Perizinan*

a. Penerapan Izin Pembuangan Limbah Cair

Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 38 Tahun 2001 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair telah mewajibkan setiap kegiatan yang menggunakan media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair. Dengan dasar Perda tersebut maka setiap perusahaan yang membuang limbah ke media lingkungan harus mendapat izin tertulis dari Bupati. Perusahaan-perusahaan baru bisa mendapatkan izin apabila kualitas buangan limbah cairnya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sesuai baku mutu air sungai berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakt, Domestik dan Pertambangan Batubara. Selama limbah cairnya masih melebihi baku mutu maka perusahaan tersebut belum boleh membuang limbahnya ke media lingkungan dan belum bisa mendapat Izin Pembuangan Limbah Cair. Bagi perusahaan yang belum mendapat izin diwajibkan menanggulangi secara teknis dengan memperbaiki kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah dan proses perlakuan (*treatment*) agar dapat menurunkan kadar polutan sehingga memenuhi standar Baku Mutu.

Melalui Tim Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pembuangan Limbah Cair yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 41/KPTS/BAPEDALDA/2007, Pemkab Muara Enim melakukan pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair pada beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim setiap 3 bulan sekali agar kualitas buangannya selalu memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Tata cara dan syarat pemberian izin limbah cair diatur dalam Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 70 Tahun 2001 sedangkan dalam Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 491/KPTS/BAPEDALDA/2005 dimuat tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penelitian Lapangan Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair. Setiap Izin yang dikeluarkan berlaku selama tiga tahun dan setiap tahun perusahaan yang telah mendapat izin diwajibkan untuk melakukan perpanjangan izin ke Bupati Muara Enim melalui Bapedalda

Tabel 3.3
DAFTAR PERUSAHAAN YANG TELAH DIBERIKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
Tahun 2007

No	Nama Perusahaan	Keputusan Bupati Nomor / Tanggal	Max Debit Limbah yang Dibuang	Jenis Usaha / Kegiatan	Daftar Ulang (Berlaku 1 Tahun)
1.	PT. Tanjung Enim Lestari	100/KPTSBapedalda/2005 Tgl. 3 Januari 2005	100.000 m ³ /Hari 3.000.000 m ³ /Bln	Pembuatan Bubur Kertas (Pulp)	01/Bapedalda-III/2007 Tgl. 21 Januari 2007
2.	PT. Cipta Futura	314/KPTSBapedalda/2005 Tgl. 14 Maret 2005	250 m ³ /Hari 7.500 m ³ /Bln	Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)	02/Bapedalda-III/2007 Tgl. 12 April 2007
3.	PTPN VI (Persero) Urit Usaha Beringin	315/KPTSBapedalda/2005 Tgl. 14 Maret 2005	105 m ³ /Hari 3.150 m ³ /Bln	Pengolahan Karet Remah	03/Bapedalda-III/2007 Tgl. 2 April 2007
4.	PTPN VI (Persero) Urit Usaha SUNI	588/KPTSBapedalda/2005 Tgl. 27 Mei 2005	200 m ³ /Hari 6.000 m ³ /Bln	Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)	05/Bapedalda-III/2007 Tgl. 5 Juni 2007
5.	PT. Surya bumi Agrolangge ng	589/KPTSBapedalda/2005 Tgl. 27 Mei 2005	125 m ³ /Hari 3.750 m ³ /Bln	Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)	06/Bapedalda-III/2007 Tgl. 5 Juni 2007
6.	PTPN VI (Persero) Urit Usaha SJLI	590/KPTSBapedalda/2005 Tgl. 27 Mei 2005	350 m ³ /Hari 10.500 m ³ /Bln	Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)	04/Bapedalda-III/2007 Tgl. 5 Juni 2007
7.	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Air Laya	837/KPTSBapedalda/2005 Tgl. 20 Agustus 2005	86.596,83 m ³ /Hari 2.597.905.000 m ³ /Bln	Tambang Batubara	10/Bapedalda-III/2007 Tgl. 5 September 2007
8.	PT. Swasthi Parama Mulya	773/KPTSBapedalda/2006 Tgl. 13 Juli 2006	40 m ³ /Hari 1.200 m ³ /Bln	Pengolahan Karet Latex Pekat	Masih Diproses
9.	PT. Lingga Djaja	893/KPTSBapedalda/2006 Tgl. 28 Agustus 2006	16.695 m ³ /Bln	Pengolahan Crumb Rubber	Masih Diproses
10.	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Banko Barat	772/KPTSBapedalda/2006 Tgl. 13 Juli 2006	490.915,56 m ³ /Bln	Tambang Batubara	08/Bapedalda-III/2007 Tgl. 25 Juli 2007
11.	Rumah Sakit PTBA	772/KPTSBapedalda/2006 Tgl. 13 Juli 2006	4.350 m ³ /Bln	Rumah Sakit Umum PT. Tambang Batubara Bukit Asam	07/Bapedalda-III/2007 Tgl. 5 September 2007
12.	PLTU Bukit Asam	1309/KPTS/Bapedalda 2006 Tgl. 7 Desember 2006	38.065 m ³ /Bln	PLTU Bukit Asam	Masih Dalam Proses

Sumber: Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Perusahaan-perusahaan yang telah mendapat Izin Pembuangan Limbah Cair tetap mendapat pengawasan dari Bapedalda Kabupaten Muara Enim dan jika dikemudian hari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut melebihi baku mutu yang ditetapkan maka izin tersebut akan dicabut dan apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka akan dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan – perusahaan yang telah mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dari Bupati Muara Enim dapat dilihat pada tabel 3.3. Sedangkan permohonan izin pembuangan limbah cair yang masih dalam proses yaitu Rumah Sakit H.M. Rabain, JOB Pertamina Lekom Maras, PT. Tambang Batubara Bukit Kendi, PT. Vista Agung Kencana, PT. Multi Adirama Indonesia, JOB Pertamina Indelberg, Unit Bisnis Pertamina EP Limau dan PT. Indralaya Farm.

b. Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Tanah

Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengendalian terhadap pengelolaan air permukaan dan air tanah agar dapat digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan azas kemanfaatan, keseimbangan, ketersediaan air bawah tanah dan air permukaan beserta lingkungan sekitarnya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan Dalam Kabupaten Muara Enim setiap kegiatan pengambilan air permukaan dan air bawah tanah untuk kebutuhan industri, pertambangan, irigasi pertanian, air bersih, peternakan, perikanan dan keperluan lainnya wajib mendapatkan izin pemanfaatan/pengambilan air tanah atau air permukaan dari Bupati Muara Enim melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim.

Tabel 3.4
DAFTAR PERUSAHAAN/ KEGIATAN YANG MENDAPAT SURAT IZIN
PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN MUARA
ENIM TAHUN 2007

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR TANGGAL SIPA	MASA BERLAKU IZIN	LOKASI	JENIS SIPA
1.	PTPN VII (Persero) SUNI	Kep. 687 Tahun 2004	17 Juli 2004 s/d 17 Juli 2007	Sungai Niru, Kec R. Dangku	Air Permukaan
2.	PTPN VII (Persero) Beringin	Kep. 688 Tahun 2004	17 Juli 2004 s/d 17 Juli 2007	Sungai Lubai, Kec Lubai	Air Permukaan

3.	PTPN VII (Persero) SULI	Kep. 689 Tahun 2004	17 Juli 2004 s/d 17 Juli 2007	Sungai Lematang, Kec Ranbang Dangku	Air Permukaan
4.	PT. Tanjung Enim Lestari	Kep. Bupati Nomor 343/KPTS/TAMBEN Tahun 2006	21 Maret 2006 s/d 21 Maret 2008	Sungai Lematang Desa Banuayu, Kec Ranbang Dangku	Air Permukaan
5	PT. Ranbang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Kep. Bupati Nomor 359/KPTS/TAMBEN/2006 Kep. Bupati Nomor : 859/KPTS/TAMBEN/2007	27 Maret 2006 s/d 27 Maret 2008 5 Sept 2007 s/d 5 Sept 2009	Sungai Enim Kampung Sidomulyo Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawal Kidul Karang Tina h Kec Lawang Kidul	Air Permukaan
6	PT. Pertamina Geothermal Energ (PT PGE)	Kep. Bupati Nomor 739/KPTS/Tamben/2007	22 Juli 2007 s/d 22 Juli 2009	Dsa Penindaian Kec Serende Darat Laut	Air Permukaan

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, 2007

Tabel 3.5

**DAFTAR PERUSAHAAN / KEGIATAN YANG MEMANFAATKAN
AIR BAWAH TANAH (SUMUR BOR)
DI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007**

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR TANGGAL SIPA	LOKASI	KEDALAMAN (m)	JENSTIPA
1.	PT. Tambang Batu bara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Kep. 858/KPTS/TAMBEN/2 007	Mata Air Brangau Bukit Munggu, Kec. Lawang Kidul	-	Mata Air
2	PT. Meppo Gen	Kep. Bupati Nb. 126/KPTS/TAMBEN/2 007	Ds. Panang Jaya Kec Gn Megang	-	Sumur Bor
3	PT. Multi Breder Adiama Indonesia	Belum ada	Desa Segayar Kec Kelumbang	110	Sumur Bor
4.	PT. Karisma Damai Cemerlang	Belum ada	Ds. Segayam Kec. Gelumbang	24	Sumur Bor
5.	PT. Swasthi Parama Mulya	Belum ada	Ds. Suka merindu Kec Lubai	100	Sumur Bor
6	PDAM	Belum ada	Desa Gelumbang Kec Gelumbang	80	Sumur Bor
7.	PT. Vista Agung	Belum ada	Ds Talang Talang	100	Sumur Bor

	Kencana		Kec Gelumbang		
8.	Ma syara kat	Belu mada	Ds Karang Endah Kec Gelumbang	105	Su mur Bor
9.	Ma syara kat	Belu mada	Ds. Gaung Telang Kec Gelumbang	110	Su mur Bor
9.	Ma syara kat	Belu mada	Desa Lembak Kec. Lembak	100	Su mur Bor
10	Desa Trans	Belu mada	Ds. Bangsar Kec Gn. Megang	60	Su mur Bor
11	Ma syara kat	Belu mada	Ds. Tj. Terang Kec. Gunung Megang	86	Su mur Bor
12	PPSAB (FDAM)	Belu mada	Desa Air Itam Kec. Penukal	115	Su mur Bor
13	PPSAB (FDAM)	Belu mada	Ds. Tlg. Tempira Kec Penukal Abab	105	Su mur Bor
14	PPSAB (FDAM)	Belu mada	Ds Simpang Babat Kec Penukal Abab	110	Su mur Bor
15	Ma syara kat	Belu mada	Ds. Suka merindu Kec Lubai	36	Su mur Bor
16	PDAM	Belu mada	Ds Ujan Mas Baru kec. Ujan Mas	87	Su mur Bor
17	STM Pembangun an	Belu mada	Ds Talang Talang Kec Gelumbang	106 dan 60	Su mur Bor
18	Ko mp le k ABRI	Belu mada	Ds Karang Endah Kec Gelumbang	120	Su mur Bor
19	Ma syara kat	Belu mada	Ds. Tjg Raman Kec. Ujan Mas	150	Su mur Bor
20	Ma syara kat	Belu mada	Ds Negeri Agung Kec Rb. Lubai	115	Su mur Bor
21	Ma syara kat	Belu mada	Ds Putak Kec. Gelumbang	120	Su mur Bor

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, 2007

2. Pembangunan Gedung Laboratorium

Mengingat banyaknya industri dan kegiatan pertambangan serta Migas di Kabupaten Muara Enim dan jarak Kabupaten Muara Enim ke Palembang lebih kurang 180 Km, Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran air dan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dunia usaha, merasa perlu membangun laboratorium lingkungan di Bapedalda Kabupaten Muara Enim. Pembangunan gedung laboratorium telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2001 dan pada akhir tahun 2003 yang lalu sudah mulai dapat dioperasikan, yang pada tahap pertama ini khusus untuk pemeriksaan limbah cair.

Melalui Surat Edaran Bupati Muara Enim Nomor 223/Bapedalda-IV/2003 Tanggal 6 Oktober 2003, setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim diwajibkan untuk memeriksakan sampel air limbahnya di Laboratorium Lingkungan Bapedalda Kabupaten Muara Enim. Biaya analisa limbah cair dari perusahaan merupakan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium yang direvisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair.

Untuk memaksimalkan kinerja laboratorium lingkungan Bapedalda telah dibentuk personalia laboratorium (Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 780/KPTS/BAPEDALDA/2005 yang kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 1240/KPTS/BAPEDALDA/2006) dan para analis telah diikutkan dalam kegiatan magang dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam menganalisa dan dalam proses pra akreditasi di bawah bimbingan Laboratorium Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan dan Pusarpedal Jakarta.

3. Melaksanakan Program Kali Bersih (PROKASIH).

Prokasih adalah Program pengendalian pencemaran air sungai dengan tujuan untuk menjaga kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Kegiatan Prokasih juga merupakan kegiatan yang dapat mengendalikan kualitas air sungai agar senantiasa bersih dan terhindar dari semua bahan pencemar. Prokasih yang dilaksanakan pada Tahun 2007 berupa kegiatan pembersihan Sungai Enim dan Lematang beserta anak-anak sungai yang ada di Kota Muara Enim. Kegiatan pembersihan sungai dilakukan dari jembatan Sungai Enim II jembatan Sungai Enim I (± 3 Km), kanan kiri jembatan Lubuk Empelas (± 1 Km), Sungai Aur (total ± 800 m), Sungai Pelawaran (kanan kiri jembatan pelawaran ± 100 m), dan Sungai Bemban (kanan kiri jembatan Bemban ± 100 m). Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel air Sungai Enim di 10 (sepuluh) titik pantau untuk dianalisa kualitasnya di laboratorium Bapedalda Kabupaten Muara Enim. Pengambilan sampel dilakukan 3 (tiga) kali setahun yaitu pada waktu musim hujan, musim pancaroba dan musim kemarau.

4. Melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Prinsip dasar pelaksanaan PROPER adalah mendorong pihak perusahaan agar taat dalam pengelolaan lingkungan melalui INSENTIF REPUTASI/CITRA bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang BAIK dan DISINSENTIF REPUTASI/CITRA bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang BURUK.

Peringkat kinerja perusahaan dalam PROPER dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat warna, yaitu:

- a. PERINGKAT EMAS, untuk usaha dan atau kegiatan yang TELAH BERHASIL MELAKSANAKAN UPAYA pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan atau MELAKSANAKAN PRODUKSI BERSIH dan telah mencapai HASIL YANG SANGAT MEMUASKAN.
- b. PERINGKAT HIJAU, untuk usaha dan atau kegiatan yang TELAH MELAKSANAKAN UPAYA pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan MENCAPAI HASIL LEBIH BAIK dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PERINGKAT BIRU, untuk usaha dan atau kegiatan yang TELAH MELAKSANAKAN UPAYA pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai HASIL yang SESUAI dengan PERSYARATAN MINIMUM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. PERINGKAT MERAH, untuk usaha dan atau kegiatan yang TELAH MELAKSANAKAN UPAYA pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi BELUM MENCAPAI PERSYARATAN MINIMUM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. PERINGKAT HITAM, untuk usaha dan atau kegiatan yang BELUM MELAKSANAKAN UPAYA pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berarti.

Kriteria perusahaan yang dinilai peringkat kinerja dalam pengelolaan lingkungan antara lain adalah:

- a. Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan
- b. Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sangat besar.
- c. Perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan dan atau yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan.
- d. Perusahaan publik yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri.
- e. Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Tabel 3.6
DAFTAR HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KELOLA
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (PROPER)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007

No	Peringkat	Nama Perusahaan	Unit Usaha
1.	Hijau	PT. Tanjung EnimLestari	Industri Pulp
2.	Biru +	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tambang Batubara
		PT. Cipta Futura	Industri Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)
3.	Biru	PT. Batubara Bukit Kendi	Tambang Batubara
		PTPN VII Unit Usaha SUNI	Industri Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)
		PTPN VII Unit Usaha SULI	Industri Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)
		PTPN VII Unit Usaha Beringin	Industri Crumb Rubber
		PL TU Sektor Bukit Asam	Pembangkit Listrik
		PT. Lingga Jaya	Industri Crum Rubber
4.	Merah	-	-

Sumber: Bapedda Provinsi Sumatera Selatan, 2007

5. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan ke Perusahaan –perusahaan dan industri kecil

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim antara lain dengan mewajibkan setiap penanggung jawab kegiatan untuk memeriksakan sampel limbah cairnya ke Laboratorium Lingkungan Bapedalda Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan swapantau dalam rangka mengimplementasikan janji-janji perusahaan dalam dokumen RKL/RPL (bagi kegiatan wajib AMDAL). Sedangkan bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL diharuskan menerapkan upaya kelola lingkungan yang tertera dalam dokumen UKL/UPL.

Diharapkan dengan adanya upaya pengendalian terhadap limbah cair dari sumber-sumber kegiatan tersebut maka beban limbah yang akan di buang ke badan air akan berkurang.

Industri kecil yang tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan dalam di Kabupaten Muara Enim berjumlah 136 industri dan sebagian besar masih belum mempunyai IPAL atau tempat pengolahan limbah.

Pemkab Muara Enim melalui Bapedalda Kabupaten Muara Enim menghimbau industri-industri kecil tersebut untuk membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan membuat IPAL Komunal secara sederhana. Berdasarkan hasil inventarisasi

Bapedalda Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2007, sudah ada 49 Industri kecil yang membuat SPPL

6. *Membuat Billboard Pelestarian Lingkungan Hidup*

Billboard merupakan salah satu sarana/ papan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan media lingkungan (tanah/air/sungai), tidak menebang pohon dan membuang sampah sembarangan serta tidak menangkap/meracuni ikan dengan putas sehingga lingkungan tetap lestari sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pada Tahun 2007 ini, melalui Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membuat 20 buah Billboard pelestarian lingkungan yang akan dipasang di bantaran sungai dalam Kota Muara Enim. Sampai Tahun 2007 sudah ada sekitar 50 buah Billboard Pelestarian Lingkungan yang dibuat dan dipasang pada lokasi sepanjang bantaran Sungai Enim dan Lematang di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung dan juga di dalam kota Muara Enim yaitu di Taman Kota, Komplek Kantor Pemda, Hutan Kota, batas kota arah Palembang dan Batas kota arah Kabupaten Lahat

BAB IV

UDARA

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah yaitu; Iklim dan Meteorologi, Kondisi Geografis, Karakteristik Sumber Pencemar Udara dan Upaya Pengendalian Pencemaran udara.

Ketika suatu zat pencemar/ polutan diemisikan dari suatu sumber pencemar maka secara alami di udara akan terjadi proses dispersi/ penyebaran, dilusi/ pengenceran, difusi/ penggabungan antar molekul dan transformasi kimia/ fisika. Proses dispersi atau penyebaran zat pencemar dan proses dilusi atau pengenceran zat pencemaran dengan massa udara dapat menyebabkan turunnya konsentrasi zat pencemar udara di dekat sumber emis, namun jumlah zat pencemar yang ada di atmosfer cenderung tidak berkurang bahkan akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah sumber pencemar. Itulah yang kemudian menjadi wacana di dunia internasional bahwa seluruh dampak yang mungkin akan timbul dari menurunnya kualitas udara akan bersifat global.

Proses difusi molekul zat pencemar dengan zat – zat lain yang ada di udara serta proses transformasi zat – zat tersebut secara fisika ataupun kimia diduga dapat menimbulkan masalah baru seperti terbentuk zat-zat baru yang bersifat radikal, terjadinya deposisi asam kering ataupun hujan asam.

1. KONDISI METEOROLOGI KABUPATEN MUARA ENIM

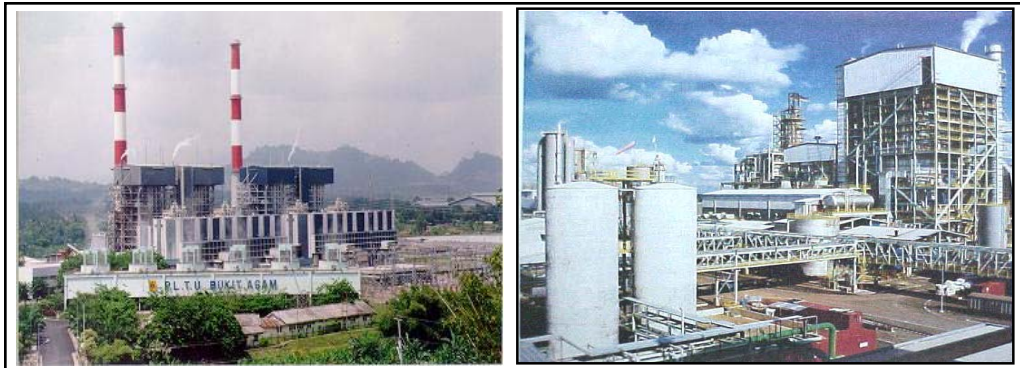
Sebagaimana umumnya daerah di Indonesia iklim di Kabupaten Muara Enim adalah iklim tropis, namun karena kondisi geografis yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya maka terdapat perbedaan yang antara unsur – unsur iklim seperti temperatur udara, kecepatan dan arah angin, kelembaban serta curah hujan.

A. Temperatur Udara

Temperatur udara di Kabupaten Muara Enim berkisar antara: 26,5°C s.d. 27°C pada musim kemarau dan 25,7°C s.d 27,8°C pada musim hujan. Untuk daerah yang berada di sekitar Pegunungan Bukit Barisan seperti Semende Darat Ulu, Semende Darat Laut dan

Semende Darat Tengah hingga Tanjung Agung bisa terjadi perbedaan sampai 4 °C dengan Kecamatan lain yang berada di lokasi yang lebih rendah karena daerah tersebut berada di ketinggian > 500 dpl sehingga temperatur udaranya juga cenderung lebih sejuk.

Gambar 4.1 Aktivitas Industri Yang Berpotensi Mencemari Udara



Sumber :
Bappedada
Kabupaten
Muara
Enim

Enim, 2007

Perbedaan Temperatur akan menyebabkan terjadinya aliran udara/ angin dari suatu wilayah yang kemudian mempengaruhi penyebaran zat – zat pencemar dari suatu sumber emisi ke wilayah lain. Jika demikian sangat menguntungkan jika memang polutan keluar dari kegiatan / usaha yang umumnya berada di daerah Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Ujan Mas ataupun Kecamatan Rambang Dangu yang posisinya lebih rendah dari Kecamatan Semende Darat Ulu, Semende Darat Laut dan Semende Darat Tengah, maka polutan – polutan tersebut akan terdispersi ke daerah tersebut dimana daerah tersebut masih memiliki tutupan vegetasi yang cukup rapat.

Namun Dinamika yang demikian tidak mutlak dapat diramalkan akan terjadi, karena Muara Enim sebagai bagian teritorial Indonesia yang juga dipengaruhi oleh pergerakan Angin Muson Barat ataupun Muson Timur maka arah penyebaran zat zat pencemar di Kabupaten Muara Enim juga akan berpengaruh atas pergerakan kedua angin Muson tersebut sepanjang tahun.

B. Kecepatan dan Arah Angin

Muara Enim tidak mempunyai stasiun pemantau meteorologi dan geofisika sendiri, sehingga data kecepatan dan arah angin biasanya diperoleh dari stasiun terdekat yang dimiliki Badan Meteorologi Geofisika (BMG) yaitu di Stasiun Klimatologi Kenten Palembang serta diperoleh dari beberapa studi yang dilakukan pihak swasta/ perusahaan yang berkepentingan. Stasiun yang ada di Kabupaten Muara Enim hanya Stasiun Pemantau Curah Hujan yang ada di 16 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.

Dari data tersebut diketahui bahwa kecepatan angin di Muara Enim berkisar antara 2,26 km/jam sd 3,62 km/jam

Dan arah angin sepanjang tahun dapat dilihat dalam tabel berikut

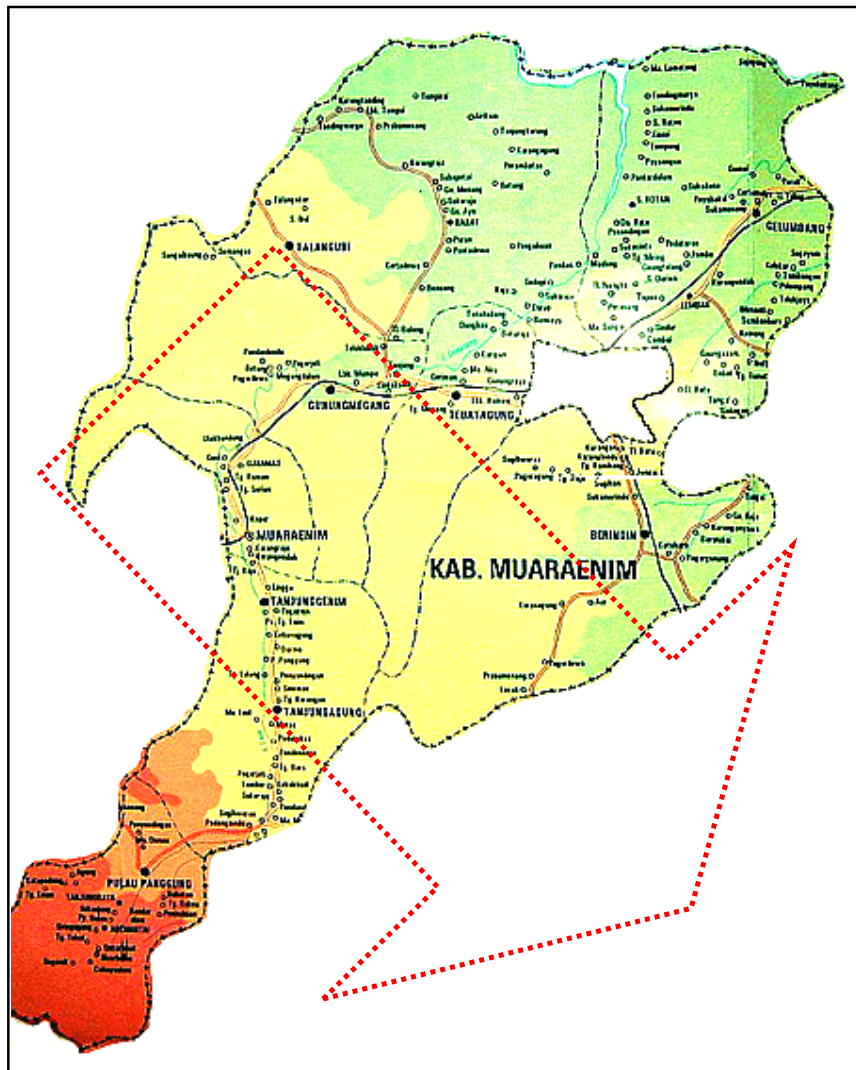
Tabel 4.1
Arah dan Kecepatan Angin di Wilayah Kabupaten MuaraEnim Tahun 2005

Arah Angin	Frekuensi (%) pada kecepatan angin (km/jam)			Jumlah (%)
	< 2,50	2,5 – 3,5	> 3,5	
Utara	-	-	-	-
Timur Laut	-	-	-	-
Timur	6,66	-	-	6,60
Tenggara	-	33,69	20,60	54,20
Selatan	-	-	-	-
Barat Daya	-	-	-	-
Barat	-	-	-	-
Barat Laut	7,00	32,30	-	39,30
Jumlah	13,60	65,80	20,60	100

Sumber : ANDAL PLTU Sektor Bukit Asam, 2007

Dari persentase diatas dapat diketahui umumnya arah angin di Kabupaten Muara Enim menuju Arah Tenggara sehingga daerah – daerah yang berada di tenggara cenderung akan menerima penyebaran polutan – polutan yang terbawa angin. Jika Dilihat dari Gambar 4.2 Peta Wilayah Muara Enim, maka dapat diperkirakan pergerakan angin yang kemungkinan membawa sumber – sumber pencemar akan secara dominan akan cenderung jatuh di bagian tenggara wilayah Muara Enim yaitu sekitar daerah Beringin sampai dengan daerah Sekitar daerah Tanjung Agung dan Semende Darat Ulu (seperti yang ditunjukkan panah merah pada Gambar 4.2).

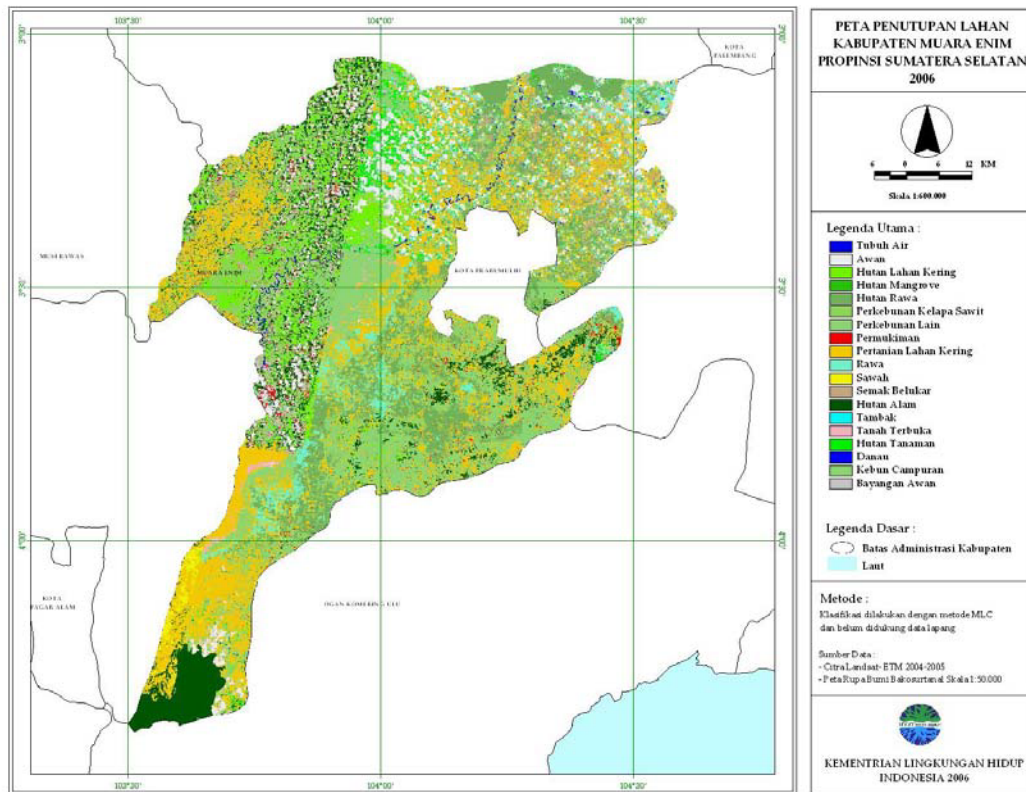
Gambar 4.2 Arah Angin Dominan di wilayah Kab. Muara Enim



Sumber : Bapedal da Kabupaten Muara Eri m, 2007

Jika dibandingkan dengan Peta Tutupan Lahan sebagaimana Gambar 4.3 terlihat wilayah jatuhnya zat pencemar adalah wilayah yang umumnya merupakan daerah pertanian lahan kering, perkebunan sawit, hutan alam dan kebun campuran, dimana umunya ketinggiannya adalah 0-25 m dpl. Diharapkan pergerakan angin tersebut memungkinkan terjadi reduksi zat pencemar melalui aktifitas alami tumbuhan seperti; kegiatan fotosintesi sda penyerapan melalui akartan aman.

Gambar 4.3 Peta tutupan lahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2006



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2006

C. Kelembaban dan Curah Hujan

Kelembaban di daerah Muara Enim sangat bervariasi yaitu antara 81,0% s/d 87,6%. Sedangkan curah hujan berkisar antara 83,1 mm s/d 352,3 mm/bulan.

Data kelembaban dan curah hujan tersebut berasal dari stasiun pengamatan BMG di Kenten, untuk membandingkannya kita dapat lihat dari data pengamatan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam, yaitu perusahaan yang berada di wilayah Muara Enim dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Curah Hujan Wilayah Kabupaten Muara Enim 2007

	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3
Koordinat stasiun Pemantau (Lintang :Bujur)	03,7391 ; 103,789	03,7159 ; 103,773	03,7685 ; 103,83153
Data Curah Hujan (mm/bln)			
Bulan	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3
Januari	401,0	560,7	375,6
Februari	375,5	331,5	363,10
Maret	162,7	162,7	148,0
April	543,5	466,1	514,0
Mei	151,8	107,8	88,90
Juni	100,8	67,8	70,70
Juli	89,5	76,8	146,3
Agustus	69,3	83,6	49,8
September	184,4	145,5	104,30

Sumber: PT BukitAsam (Persero), Tbk

Dari Tabel tersebut diketahui tinggi curah hujan di lokasi pemantauan pada ketiga stasiun adalah 49,8 - 560 mm/bulan terlihat perbedaan yang cukup jauh terhadap stasiun lain. Hal ini sangat dimungkinkan karena luas dan bentuk geografi yang berbeda antara satu stasiun pantau dengan yang lainnya.

Curah hujan akan berpengaruh pada peristiwa hujan asam jika di udara terdapat Oksida Nitrogen, Oksida Sulfur, Oksida Fosfat dan Oksida lainnya yang akan menimbulkan reaksi pembentukan asam dengan air hujan

Pada tanggal 28 November 2007 Bapedalda Kabupaten Muara Enim melakukan uji kadar hujan terhadap air pada ketiga stasiun pemantau hujan yang dimiliki oleh PTBA seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Kualitas Air Hujan
Tahun 2007

Parameter	Satuan	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3
DHL	µS	39.2	55.9	29
pH		6.02	7.31	7.59
SO ₄	mg/L	46,9	12,4	12,1
NO ₃	mg/L	0.2	0.6	0.2
Cr	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
NH ₄	mg/L	2.9	0.16	<0.01
Mg ²⁺	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1

Sumber :
Kabupaten Muara Enim, 2007

Bapeda

Dari hasil pemantauan tersebut diketahui bahwa tingkat keasaman air hujan masih dalam batas normal. Meskipun salah satu stasiun yaitu Stasiun 3 berada dalam lokasi yang memungkinkan tempat jatuhnya gas-gas yang berpotensi menimbulkan hujan asam yang berasal dari PLTU dengan bahan – bakar batubara, namun tidak terlihat adanya hujan asam.

Gambar 4.4
Pengambilan sampel air Hujan di Stasiun Pemantau PTBA



Kabupaten Muara

Sumber : Bapeda
Enim 2007

Secara Geografis Muara Enim terletak antara 104^oBT sampai 106^oBT dan 4^oLS sampai dengan 6^o LS dengan Topografi yang beragam seperti dataran rendah (<250 m dpl) yaitu sekitar 85,49% dan 14,51% berada di dataran tinggi (>250 m dpl).

Kondisi geografis juga berpengaruh pada proses pendispersian zat – zat pencemar udara, misalnya pembangunan suatu pabrik yang berdekatan dengan perbukitan, menyebabkan terjadinya suatu tumbukan angin yang membawa zat – zat pencemar yang diemisikan dari cerobong dengan punggung bukit sehingga zat – zat pencemar tersebut jatuh lagi disekitar lokasi pabrik.

Proses terperangkapnya zat pencemar di dekat sumber juga dapat terjadi karena ketinggian cerobong yang lebih rendah dari gedung atau bangunan di sekitar cerobong, sehingga udara yang keluar dari cerobong akan terhalang bangunan dan polutannya akan jatuh di lokasi tersebut.

2. KARAKTERISTIK SUMBER PENCEMAR UDARA YANG ADA DI KABUPATEN MUARA ENIM

1. Sumber Pencemar Udara Bergerak

A. Kendaraan Bermotor

Seperti daerah – daerah lain di Indonesia, dengan pesatnya industri kendaraan bermotor, maka pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Muara Enim ikut meningkat pesat pada tahun – tahun terakhir ini. Pada tahun 2006 Jumlah kendaraan yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kendaraan Bermotor di Muara Enim Tahun 2006

No.	Jenis Kendaraan	Bahan Bakar		Jumlah
		Bensin	Solar	
1.	Mobil Penumpang	2.375	2.475	4.850
2.	Bus	-	400	400
3.	Truk	-	5.437	5437
4.	Sepeda Motor	491.660	-	491.660

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim, 2007

Kendaraan bermotor tersebut berbahan bakar bensin dan solar. Penggunaan kedua bahan bakar tersebut mengancam kualitas lingkungan seperti bahan timbal/ Pb yang dicampur dalam bensin serta kadar Sulfur yang terdapat di dalam solar. Sejauh ini bahan bakar bensin yang dijual di SPBU – SPBU di Muara Enim belum bebas Timbal (Pb) sedangkan kadar Sulfur dalam Solar belum pernah dilakukan kajian.

a. Kereta Api

Kereta api yang beroperasi/ melintas di Kabupaten Muara Enim untuk beberapa tujuan, diantaranya:

- Kereta Penumpang
- Kereta pengangkut batu bara
- Kereta pengangkut minyak

Seluruh kereta api yang beroperasi di Muara Enim adalah diesel yang dengan bahan bakar solar. Pemakaian bahan bakar jenis solar akan berpotensi menimbulkan peningkatan jumlah zat - zat seperti Oksida Sulfur, Oksida Nitrogen , Oksida Karbon dan Debu.

b. Alat Berat

Alat – alat berat biasanya dimiliki oleh perusahaan dan beberapa dimiliki oleh Pemerintah Daerah, proyeksi peningkatan pencemaran udara karena pemakaian alat berat juga akan meningkat seiring meningkatnya kegiatan pembangunan. Sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan serta kegiatan penambangan adalah pengguna alat berat yang cukup signifikan mengemisiikan sumber pencemar di Kabupaten Muara Enim.

2. Sumber Pencemaran Udara Tidak Bergerak

Gambar 4.5 Pembakaran Cangking di Pabrik Kelapa Sawit



Sumber : Bapedda Kabupaten Muara Enim 2007

1. Usaha Pabrik Pengolah Kelapa Sawit (PPKS)

Perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Muara Enim yang sudah beroperasi sampai tahun 2007 sebanyak 9 buah, sedangkan PPKS yang sudah beroperasi yaitu 5 buah; yaitu; PTPN VII Unit Usaha Suli, PTPN VII Unit Usaha Suni, PT Cipta Futura, PT Bumi Sawindo Permai dan PT Surya Bumi Agro Langgeng.

Bahan bakar yang umumnya digunakan dalam pabrik yaitu bensin dan solar, selain itu pemanfaatan cangkang sebagai bahan bakar dengan tujuan mengurangi jumlah limbah padat dan menghemat pemakaian bahan bakar fosil.

Potensi bahan pencemar yang terdapat dalam pemakaian bahan bakar tersebut adalah

- Uap air yang menimbulkan asap putih dari pembakaran cangkang.
- Hidrokarbon yang berasal dari pembakaran cangkang yang tidak sempurna ataupun bahan bakar lainnya.
- Karbon Monoksida dan Karbon Dioksida.
- Pb jika menggunakan bensin bertimbal.
- Oksida Sulfur dari Pemakaian Solar.
- Oksida Nitrogen.
- Oksida Posfor dari kandungan alami cangkang.
- Debu.

2. Usaha Pembuatan Briket Batubara

Pabrik pembuat briket adalah salah satu unit usaha milik PT Bukit Asam, (persero) Tbk, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kadar karbon (meningkatkan nilai kalori) yang terdapat di batubara dan menurunkan gas-gas yang menjadi sumber pencemar udara.

Potensi bahan pencemar :

- Uap air yang menimbulkan asap putih dari proses karbonasi batubara
- Hidrokarbon yang berasal dari pembakaran tidak sempurna batubara
- Karbon Monoksida dan Karbon Dioksida
- Pb jika menggunakan bensin bertimbal
- Oksida Sulfur dari Pemakaian Solar
- Oksida Nitrogen
- Debu
- Jelaga

3. Usaha Pabrik Karet menjadi Bahan Olah Karet (BOKAR)

Di Muara Enim terdapat 3 buah pabrik pengolahan karet, yaitu: PT Lingga Djaya, PTTPN VII Unit Usaha Beringin dan PT Swasthi Parama Mulya, pabrik ini merupakan industri hulu dimana hasil akhirnya hanya berupa bahan olah karet (*crumb rubber*) yang akan digunakan oleh industri lain. Pencemaran udara yang terjadi dan umumnya menjadi keluhan masyarakat adalah bau dari aktifitas pengolahan karet tersebut.

4. Usaha Perminyakan dan Gas Bumi

Muara Enim juga kaya akan sumber minyak bumi, eksplorasi dan produksi minyak bumi yang dikelola Pertamina bersama dengan kontraktor ataupun perusahaan lain: PT. Pertamina EP Lapangan Prabumulih, JOB Pertamina Golden Spike, JOB Pertamina Golden Spike, JOB Pertamina Lekom Maras, UB Pertamina EP Limau, PT. Medco Energi dan PT Pilona Tanjung Lontar.

Potensi bahan pencemar:

- Hidro Carbon (HC)
- Karbon Monoksida dan Karbon Dioksida
- Debu

5. Usaha Pertambangan Batubara

Sejauh ini perusahaan yang sudah aktif dalam penambangan batubara yaitu PT. Bukit Asam (persero) Tbk, PT. Bukit Kendi dan PT. Prama Mulia Sarana Sejahtera. Penambangan yang dilakukan adalah dengan sistem terbuka. Potensi utama pencemaran udara berasal dari meningkatnya debu yang berasal dari aktifitas pergerakan kendaraan dan aktifitas pembukaan lahan. Namun peningkatan debu tersebut menjadi lebih besar dampaknya karena berkurangnya tutupan vegetasi di lahan – lahan sekitar tambang. Zat pencemar udara lainnya yaitu gas – gas seperti CO, NO_x, SO_x, Pb dan H₂S berasal dari kendaraan dan alat – alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan yang menggunakan bahan bakar minyak

6. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU yang aktif sampai sekarang di Kabuapten Muara Enim berbahan bakar batubara. Potensi pencemar udara yang paling utama adalah debu, NO_x, SO_x, CO_x dan N₂O.

7. Usaha Pencampuran Aspal

Usaha pencampuran aspal di Kabupaten Muara Enim ada dua buah PT Bania Rahmat Utama dan PT Mawar Persada Bakti. Produk yang dihasilkan berupa aspal cair yang dapat dipakai pada kegiatan – kegiatan pembangunan.

Potensi bahan pencemar udara:

- Karbon Monoksida dan Karbon Dioksida
- Oksida Sulfur
- Bau
- Pb
- Oksida Nitrogen
- Debu

8. Usaha Pemecah batu (stone crusher)

Di Muara Enim terdapat satu perusahaan pemecah batu PT. Bania Rahmat Utama, mesin yang digunakan berbahan bakar solar.

Gambar 4.6 Mesin Pemecah batu PT Bania Rahmat



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Potensi bahan pencemar udara dalam kegiatan ini yaitu:

- Karbon Monoksida dan Karbon Dioksida
- Oksida Sulfur
- Metil Merkaptan
- Oksida Nitrogen
- Debu

9. Rumah Sakit

Rumah Sakit yang ada di Muara Enim ada dua buah, yaitu RSUD HM Rabain dan RS Bukit Asam. Kedua Rumah sakit tersebut mempunyai instalasi pembakar sampah (*incenerator*) terutama digunakan untuk sampah medis yang berasal dari Rumah sakit tersebut dan dari beberapa puskesmas.

Gambar 4.7 Insenerator RSUD Rabain Muara Enim



Sumber: Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Bahan bakar yang digunakan di incenerator adalah solar, potensi Zat Pencemar yang mungkin timbul selama pemakaian insenerator yaitu:

- Karbon Monoksida dan Karbon Dioksida
- Oksida Sulfur dari Pemakaian Solar pada genset
- Metil Merkaptan
- Oksida Nitrogen
- Debu
- Dioksin

3. DAMPAK PENCEMARAN UDARA

Kejadian Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Selain perilaku hidup dan kondisi lingkungan tempat tinggal (sanitasi perumahan) penurunan kualitas udara akibat peningkatan sumber pencemar meningkatkan faktor resiko terjadinya penyakit – penyakit terutama penyakit saluran pernafasan.

Berikut dapat dilihat jumlah kejadian penyakit ISPA di kecamatan- kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim

Tabel. 4.5 Jumlah Kejadian Penyakit ISPA di Kabupaten Muara Enim Tahun 2006

No.	Kecamatan	Jumlah Penderita ISPA
1.	Semende Darat Ulu	275
2.	Semende Darat Tengah	527
3.	Semende Darat Laut	1.430
4.	Tanjung Agung	5.505
5.	Lawang Kidul	11.203
6.	Muara Enim	12.565
7.	Ujan Mas	2.355
8.	Gunung Megang	2.641
9.	Rambang Danguku	5.787
10.	Talang Ubi	1.041
11.	Tanah abang	603
12.	Penukal Utara	4.354
13.	Rambang	3.260
14.	Lubai	4.106
15.	Lembak	4.706
16.	Gelumbang	3.936
17.	Sungai Rotan	1.047

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Catt: Jumlah Penderita ISPA tersebut berdasarkan penderita yang berobat ke Puskesmas, tidak termasuk penderita yang tidak berobat.

Terlihat jumlah penderita ISPA yang dilayani berobat di Kecamatan Muara Enim dan Lawang Kidul sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Semende Darat Ulu. Walaupun data ini tidak dapat menggambarkan secara pasti pengaruh lingkungan yang menurun terhadap penyakit karena dimungkinkan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat berobat ke Puskesmas yang masih rendah, sehingga jumlah penderita tidak tercatat. Namun kondisi ini dapat menggambarkan bahwa di Kecamatan Lawang Kidul dan Muara Enim kejadian ISPA cukup tinggi. Jika dilihat relasinya dengan aktifitas pencemaran udara terutama yang bersumber dari lalu lintas di kedua kawasan tersebut memang lebih tinggi dari daerah-daerah lain di Kabupaten Muara Enim.

4. UPAYA PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Pemantauan Kualitas Udara

1. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

a. Pemantauan Kualitas Udara Ambien oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2007 ini Bapedalda Kabupaten Muara Enim telah melakukan 2 kali pemantauan kualitas udara ambien di dua titik.

Tabel.4.6 Lokasi Titik Pantau Kualitas Udara Ambien Tahun 2007

Koordinat Titik Pantau	Lokasi	Tanggal pengambilan Sampel
S. 01 ^o .39'.089" E 103 ^o .46'.31"	Dekat Stasiun Kereta Api Kota Muara Enim	1. 23 Juli 2007
S. 03 ^o .45'.06" E 103 ^o .47'.479"	Simpang empat pasar Kota Tanjung Enim	2. 3 Oktober 2007

Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Dasar Pemilihan titik pantau:

1. Lokasi tersebut termasuk yang paling ramai aktifitas yang berpotensi menimbulkan polusi udara
2. Berdekatan dengan sarana publik yang sering diakses masyarakat dan pemukiman penduduk sehingga perlu diketahui kualitas udaranya.

Dari hasil kedua pemantauan tersebut seluruh parameter masih berada di bawah Ambang batas yang disyaratkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2005 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 4.7 Rekapitulasi hasil analisa Kualitas Udara Ambien
Kota Muara Enim dan Kota Tanjung Enim Tahun 2007**

No.	Parameter Uji	Satuan	Standar	Hasil Uji			
				Lokasi I		Lokasi II	
				I	II	I	II
1.	Karbon Monoksida (CO)	$\mu\text{g}/\text{nm}^3$	Maks 30.000	5,65	14,84	6,23	11,72
2.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	$\mu\text{g}/\text{nm}^3$	Maks 900	0.2470	4,20	tt	6,52
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	$\mu\text{g}/\text{nm}^3$	Maks 400	1,562	10	1,042	15
4.	PM 2,5	$\mu\text{g}/\text{nm}^3$	Maks 65	15,151	27,89	0,278	40
5.	Timbal (Pb)	$\mu\text{g}/\text{nm}^3$	Maks 2	tt	0,7	tt	0,8
6.	Kebisingan	dB (A)	Maks 70	55-65	67	57-60	64

Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Kualitas Udara Ambien yang sekarang masih dalam kondisi baik disebabkan karena beberapa hal:

1. Sumber pencemar tidak bergerak seperti cerobong pabrik berada di lahan yang dekat dengan tutupan vegetasi yang cukup rapat, seperti pabrik kelapa sawit berada dekat dengan perkebunan kelapa sawit.
2. Sumber pencemar tidak bergerak/ cerobong berada dalam jarak yang tersebar atau tidak terpusat seperti kawasan industri sehingga tidak terjadi pengakumulasi bahan pencemar udara.
3. Sumber pencemar bergerak / kendaraan bermotor memang jumlahnya sudah cukup banyak di Kabupaten Muara Enim, namun pemakaian kendaraan bermotor dengan aktifitas masyarakat yang beragam menyebabkan tidak terjadi pemusatan jalan pada jam – jam tertentu sehingga jarang sekali terjadi kemacetan yang sangat berpotensi sebagai penyumbang polusi yang cukup besar.

b. Pemantauan Kualitas Udara Ambien yang dilakukan Perusahaan

Hampir seluruh perusahaan yang ada di Muara Enim sudah melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas udara ambien, berikut ini ditampilkan beberapa Perusahaan yang mewakili unit kegiatan yang ada di Muara Enim.

1. PT Bukit Asam (Perseor) Tbk (Kegiatan pertambangan)

Dari laporan pihak Perusahaan pada Semester I, umumnya seluruh parameter yang dipantau belum melebihi Ambang Batas kecuali kebisingan di beberapa lokasi seperti di Jalan Produksi untuk baku mutu kawasan industri serta CDP dan Komplek PLN untuk baku mutu pemukiman yang melebihi ambang batas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2005, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien PTB A 2007

Bulan	Lokasi	Parameter Yang diukur					
		Debu	CO	SO ₂	NO ₂	O ₃	Kebisingan
		(µg/nm ³)					(dB)
Jan	Kantor Besar Lama	56	802	204	225	-	54
	Pemukiman Karantina	62	573	51	35		51
	CDP	108	2.863	213	127		67
	Kompleks PLN	13	1.397	187	312		66
	Jalan Produksi	137	1.268	105	112		71
Februari	Kantor Besar Lama	156	1.718	394	173		68
	Pemukiman Karantina	25	229	38	163		50
	CDP	121	1.145	220	244		69
	Kompleks PLN	25	2.863	71	118		66
	Jalan Produksi	185	718	159	125		70
Maret	Kantor Besar Lama	65	1.145	115	203		68
	Pemukiman Karantina	33	1.145	110	105		53
	CDP	75	4.351	315	268		67
	Kompleks PLN	58	1.397	105	85		58
	Jalan Produksi	131	2.290	260	256		69
April	Kantor Besar Lama	13	1.145	411	129	175	54
	Pemukiman Karantina	72	573	130	128	180	51
	CDP	72	1.603	113	263	177	59
	Kompleks PLN	54	1.603	143	237	177	57
	Jalan Produksi	29	3.435	241	254	176	72
Mei	Kantor Besar Lama	38	573	109	75	138	50
	Pemukiman Karantina	49	344	45	25	153	50
	CDP	102	3.436	295	215	154	68
	Kompleks PLN	15	2.863	105	112	85	51
	Jalan Produksi	50	2.290	301	250	102	67
Juni	Kantor Besar Lama	15	2.863	263	205	122	54
	Pemukiman Karantina	30	229	60	105	151	51
	CDP	75	1.145	225	193	135	68
	Kompleks PLN	20	2.290	115	170	103	50
	Jalan Produksi	75	3.436	205	194	85	67
	BM Udara Ambien	230	30.000	900	400	235	55 (pemukiman), 70 (industri)

Sumber : Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan PTBA Triwulan I Tahun 2007

2. PLTU Sektor Bukit Asam

Dari laporan pihak perusahaan, tidak terdapat parameter udara ambien yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2005, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Kualitas Udara ambien PL TU Sektor Bukit Asam
Tahun 2007

NO	Nama Lokasi	Parameter ($\mu\text{g}/\text{nm}^3$)			
		CO	SO ₂	NO ₂	HC
1.	Dalam pagar PLTU 700 m	652	43	31	TTd
2.	Dalam Pagar PLTU 500 m	669	47	47	TTd
3.	Dalam Pagar PLTU Depan Coal Storage	776	49	49	TTd
4.	Perumahan karyawan PLN dekat PLTD	910	57	51	TTd
5.	Perumahan karyawan PLN	612	43	39	TTd
6.	Pemukiman Desa lingga II	527	34	33	TTd
	Baku Mutu	30.000	900	400	

Sumber : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL PLTU Sektor Bukit Asam, 2007

3. PT Lingga Djaya (Pengolah Karet)

Dari laporan pihak perusahaan, tidak terdapat parameter udara ambien yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2005, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien PT. Lingga Jaya Tahun 2007

NO	Nama Lokasi	Parameter						
		CO ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	H ₂ S ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	NO _x ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	NH ₃ ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Debu ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Bising dB
1.	± 150 m arah Tenggara (atas arah angin)	625	0.003	40	44	0.011	157	46
2.	± 75 m arah Tenggara (bawah arah angin)	871	0.009	51	53	0.058	163	51
3.	200 m arah barat laut, bawah arah angin	720	0.005	45	46	0.017	158	48
	Baku Mutu	10.000	0.02	365	150	2	230	55

Sumber : Laporan Pengelolaan Lingkungan PT Lingga Djaya, 2007

4. PTPN VII Unit Usaha SULI (perkebunan kelapa sawit)

Hasil pemantauan kualitas udara di PTPN VII Unit Usaha masih di bawah Baku Mutu Lingkungan yang di syaratkan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel. 4. 11
Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambien PTPN VI SULI
Tahun 2007

No.	Parameter	Satuan	Hasil Pemantauan	BML
1	NO ₂	(µg/N m ³)	26	150
2	CO	(µg/N m ³)	568	10.000
3	Oksidan	(µg/N m ³)	30	365
4	CO	(µg/N m ³)	Ttd	235
5	HC	(µg/N m ³)	Ttd	160
6	Pb	(µg/N m ³)	Ttd	2
7	Tot. Florida	(µg/N m ³)	Ttd	3
8	Debu	(µg/N m ³)	162	230
9	PM ₁₀	(µg/N m ³)	54	150
10.	PM _{2,5}	(µg/N m ³)	20	65
11.	Kebisingan	dBA	48.5	Max 58

Sumber : Laporan Kualitas Udara PTPN VII SULI, 2007

Ket: Lokasi berada ± 150 m dari lokasi, BML yang digunakan PPNo.41 tahun 1999

2. Pemantauan Kualitas Udara Emisi

a. Pemantauan Kualitas Udara Emisi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Pemantauan Kualitas Udara Emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, hasilnya sebagaimana terlihat dalam tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Kabupaten Muara Enim
Tahun 2007

NO	JENS KENDARAAN	JUMLAH	BAHAN BAKAR	PENGUJIAN PARAMETER RATA-RATA			KET
				CO (%)	HC ppm	ASAP (%)	
1.	MOBL PICK UP	51	Bensin	1,81	-	-	Standar Baku Mutu (Kep menL H No. 35/MNL H 10/1993)
2.	MOBL BUS UMUM	49	Solar	-	-	25	
3.	MOBL BUS T. UMUM	134	Bensin/Solar	2,00	716	27	
4.	M. BARANG UMUM	443	Bensin/Solar	1,93	674	28,6	
5.	MOBL BARANG T. UMUM	2301	Bensin/Solar	1,89	728	30	CO = 4,5 %
6.	KEND. KHUSUS	168	Solar	-	-	25	HC = 1200 ppm
7.	KERETA GANDENGAN	31	-	-	-	-	Asap = 50 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, 2007

b. Pemantauan Kualitas Udara Emisi oleh Perusahaan

Dari hasil pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gas buang kendaraan bermotor masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

Pemantauan Kualitas Udara Emisi yang dilakukan perusahaan dilaporkan secara rutin kepada Bapedalda Kabupaten Muara Enim, umumnya masih memenuhi baku mutu yang disyaratkan berikut ini ditampilkan kualitas udara emisi di beberapa kegiatan yang ada di Kabupaten Muara Enim.

1. PLTU Sektor Bukit Asam

Tabel. 4.13
Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi PLTU Sektor Bukit Asam
Tahun 2007

No Stack	Hasil Pengukuran			
	SO ₂ (mg/m ³)	NO ₂ (mg/m ³)	Total Partikulat (mg/m ³)	Opasitas (%)
1	168.7	309.11	92.11	17
2	257.83	345.41	91.63	18
BML	750	850	150	20

Sumber : Laporan Hasil Pelaksanaan RKL dan RPL PLTU Sektor Bukit Asam, 2007

Ket: BML berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 15 Tahun 2005

2. PTPN VII Unit Usaha SULI

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Kualitas Udara Emisi PTPN VII SULI
Tahun 2007

No.	Parameter	Satuan	Hasil Pemantauan		BML
			Boiler	Genset	
1.	Partikulat	(µg/Nm ³)	170.26	169.22	350
2.	Amonia	(µg/Nm ³)	0.13	0.06	0.5
3.	Clorin	(µg/Nm ³)	ttd	ttd	10
4.	Hidroclorida	(µg/Nm ³)	ttd	ttd	235
5.	Hidro Florida	(µg/Nm ³)	ttd	Ttd	160
6.	Nitrogen Dioksida	(µg/Nm ³)	248.74	306.12	1000
7.	Sulfur doksida	(µg/Nm ³)	20.06	68.24	800
8.	Hidrogen Sulfida	(µg/Nm ³)	1.23	0.84	35
9.	Timah Hitam	(µg/Nm ³)	ttd	0.05	12
10.	Opasitas	%	20	18	35

Sumber : Laporan Pemantauan Kualitas Udara PTPN VII SULI, 2007

B. Pengendalian Kualitas Udara

1. Pengendalian Kualitas Udara Ambien Perkotaan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam melakukan pengendalian pencemaran udara:

- a. Pengawasan dan Pembinaan kepada usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari udara, setiap triwulan.
- b. Peningkatan kegiatan penghijauan dan terus mengajak masyarakat untuk mencintai kegiatan penanaman pohon
- c. Melakukan uji petikemisi bagi kendaraan secara berkala.

2. Pengendalian Kualitas Udara di Sumber Pencemar

Meskipun kualitas udara di Kabupaten Muara Enim umumnya masih baik, namun guna menyikapi berbagai dampak pencemaran udara, selama ini telah mulai dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara yang terbaik adalah mengendalikan semenjak dari sumbernya. Berikut disampaikan upaya yang dilakukan beberapa perusahaan dalam mengendalikan pencemar, yang mewakili beberapa sektor kegiatan/ usaha.

1. PT Bukit Asam (persero) Tbk, merupakan sumber pencemar udara yang cukup signifikan dan perlu dikendalikan oleh perusahaan yaitu debu naik/ debu terbang. Debu terbang berasal dari lapisan atas tanah yang tidak ada penutup (berupa vegetasi atau pengerasan dengan aspal/ semen) yang tergesek roda ataupun alat berat ataupun terbawa oleh angin selama kegiatan penambangan. Debu ini sebenarnya adalah partikel yang cukup besar ukurannya, secara gravitasi biasa dapat terendapkan. Namun karena kegiatan pergesekan ataupun tekanan udara yang terjadi terus menerus selama proses penambangan menyebabkan debu ini terus terangkat, bahkan menjadi semacam area luas yang seperti berkabut, sehingga untuk pencegahannya jalanan yang dilalui alat – alat berat ataupun kendaraan operasional tambang dilakukan penyiraman secara rutin. Upaya yang dilakukan selama ini yaitu dengan penyiraman secara terus menerus. Penyiraman akan lebih sering dilakukan pada musim – musim kemarau di banding musim hujan. Debu di tambang juga berasal dari aktifitas penimbunan batubara di *stock pile*, debu ini timbul dari gesekan antara batubara pada waktu penerimaan dari *belt conveyor*.

Di sini digunakan sprayer untuk usaha percepatan pengendapannya, mencegah terhirup ke dalam pernafasan.

Upaya – upaya lain yang dilakukan perusahaan:

- i. Pembuatan green barrier
- ii. Percepatan revegetasi lahan yang sudah tidak ditambang lagi
- iii. Pemasangan cerobong di setiap genset.

Untuk unit Usaha Briket, dalam mengendalikan debu perusahaan memakai alat *dust collector*

2. PLTU Bukit Asam

Alat yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran udara di PLTU yaitu *Electrostatic Precipitator* (EP) dan untuk pemantauan perusahaan juga sudah memiliki *Continuous Emission Monitoring* (CEM). Guna memanfaatkan abu dari EP, PLTU Bukit Asam bekerja sama dengan PT Semen Baturaja untuk dijadikan pencampur semen. Kerjasama ini akan memanfaatkan 35 % PLTU dari EP.

3. Pabrik Pengolah Kelapa Sawit (PPKS)

Dalam mengendalikan pencemaran udara seluruh PPKS yang ada di Muara Enim menggunakan *wet scrubber*.

4. PT Lingga Djaya

Permasalahan bau yang ditimbulkan dalam pengolahan karet terasuk yang sering dikeluhkan masyarakat, terutama bagi PT Lingga Djaya yang berada dekat sekali dengan pemukiman. Sejauh ini minimalisasi bau dilakukan dengan menambahkan deorub pada waktu proses produksi, dan menambahkan vegetasi yang mengeluarkan bau yang lebih wangi.

5. PT Mawar Persada Bakti

Untuk mengendalikan pencemaran udara dalam kegiatan pencampuran aspal perusahaan menggunakan *cyclone*.

5. PEMANASAN GLOBAL (GLOBAL WARMING)

Meningkatnya isu *Global warming* menjadi semacam Fenomena yang harus dilakapi dengan bijak oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Peningkatan harga minyak dunia dan peningkatan kebutuhan akan listrik, serta cadangan sumber daya alam Kabupaten Muara Enim yang kaya akan sumber bahan bakar fosil seperti batubara dan minyak bumi menjadi kontradiksi terhadap peningkatan gas – gas rumah kaca seperti CO₂, CFC, CH₄ dan NO_x di Kabupaten Muara Enim. Sebagai wilayah dari Propinsi yang dinyatakan sebagai lumbung energi, tahun – tahun ke depan Muara Enim akan menjadi tujuan investor untuk membuka mega proyek seperti PLTU, eksplorasi minyak dan gas bumi. Sedangkan belum satupun perusahaan di Muara Enim yang masuk daftar perusahaan yang dibina ataupun didanai proyek *Qean Development Mechanism* (CDM). Perhatian yang lebih dari pihak Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk proyek – proyek besar tersebut diharapkan membantu pengendalian polutant penyebab pemanasan global.

6. PENGENDALIAN BAHAN PERUSAK OZON (BPO)

Dari Laporan yang disampaikan perusahaan masih ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan bahan – bahan perusak Ozon yaitu CFC pada alat pendingin ruangan. Hal ini merupakan agenda Bapedalda Kabupaten Muara Enim ke depan untuk membina dan terus mendorong perusahaan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan.

BAB V

LAHAN DAN HUTAN

1. PENGERTIAN LAHAN DAN HUTAN

A. Lahan

Lahan merupakan suatu kesatuan sejumlah sumber daya alam (SDA) yang secara vertikal mencakup mulai dari atmosfer sampai dengan lapisan pelapukan litosfir. Sumber daya alam utama yang membentuk lahan adalah iklim, geomorfologi, tanah, vegetasi, fauna dan air.

Sumber daya lahan adalah potensi dan sistem ruang yang mengandung unsur-unsur lingkungan fisik, ekologi, kimia dan biologis yang saling berinteraksi terhadap tataguna lahan. Sumber daya lahan menurut penggunaannya diklasifikasikan yaitu sarana pemukiman/sosekbud, pertanian lahan kering, pertanian lahan sawah, perkebunan, perikanan, industri, pertambangan terbuka dan perairan. Lahan

pemukiman/sosekbud adalah tempat tinggal/halaman sekitarnya dan tempat kegiatan penduduk serta fasilitas pelayanan jasa seperti perdagangan, perkantoran, perpasarannya, peribadatan, pendidikan, olahraga, pemakaman dan taman. Sedangkan menurut status pemilikannya, penggunaan lahan digolongkan menjadi 6 jenis, yaitu Tanah Negara, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan Tanah Milik.

Peranan lahan sebagai ruang untuk tempat tinggal, media atau tempat tumbuh tanaman serta wadah bahan galian/mineral menunjukkan bahwa lahan mempunyai kedudukan yang sentral dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Khusus di Kabupaten Muara Enim, tingginya nilai lahan sebagai akibat pertumbuhan sektor bisnis yang cukup pesat mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan yang cukup berarti dari pemanfaatan awal yang cenderung homogen seperti pertanian dan perkebunan tradisional ke sektor-sektor lainnya yang lebih menguntungkan, seperti sarana pemukiman, perdagangan, industri, perkebunan besar, pertambangan, perkantoran, pariwisata dan lain-lain. Hal ini membawa permasalahan yang cukup kompleks sehingga arah perencanaan di bidang sumber daya lahan sering mengalami pergeseran.

B. Hutan

Sumber daya hutan adalah segala potensi yang terkandung dan dapat dimanfaatkan dari hutan. Hutan dengan penyebarannya yang sangat luas dengan struktur dan komposisinya yang beragam diharapkan mampu menyediakan manfaat lingkungan yang amat besar bagi kehidupan manusia antara lain jasa peredaman terhadap banjir, erosi dan sedimentasi serta juga pengendalian daur air (*Suara Bumi, 2007*). Peran hutan dalam pengendalian daur air dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sebagai pengurang atau pembuang cadangan air di bumi melalui proses evapotranspirasi dan pemakaian air konsumtif untuk pembentukan jaringan tubuh vegetasi.
- b. Menambah titik-titik air di atmosfer
- c. Sebagai penghalang untuk sampainya air di bumi melalui intersepsi.
- d. Sebagai pengurang atau peredam energi kinetik aliran air lewat tahanan permukaan dari bagian batang di permukaan dan tahanan aliran air permukaan karena adanya seresah di permukaan.
- e. Sebagai pendorong ke arah perbaikan kemampuan watak fisik tanah untuk memasukkan air lewat sistem perakaran, penambahan bahan organik ataupun adanya kenaikan kegiatan biologik dalam tanah.

Selain bermanfaat sebagai penyedia sumber daya air yang baik, Hutan memberikan perlindungan terhadap kestabilan tanah dan menjadi habitat (tempat) hidup bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hutan juga dapat menyerap karbondioksida (CO_2) di atmosfer sehingga mengurangi pemanasan global. Dan dilihat dari sudut ekonomi, hutan tidak saja menghasilkan kayu industri dan kayu bakar melainkan juga obat-obatan dan tanaman bermanfaat lainnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan mengelola hutan dengan baik agar fungsinya terjaga.

2. KONDISI SUMBER DAYA LAHAN DAN HUTAN

A. Jenis Tanah

Tanah sebagai bagian dari komponen pembentuk lahan yang ada di Kabupaten Muara Enim terdiri dari berbagai jenis sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel. 5.1
Jenis dan Sebaran Tanah di Kabupaten Muara Enim

No.	Jenis Tanah	Luas Area		Persebaran
		Km ²	Persentase (%)	
1.	Alluvia	2.4004,85	26,03	Tg. Agung, Muara Enim, Talang Ubi dan Gelumbang
2.	Regosol	242,98	2,63	Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu
3.	Podsolik Merah Kuning	3.901,53	42,23	Tanjung Agung, Muara Enim, Talang Ubi dan, Gelumbang.
4.	Latosol	705,58	7,64	Tanjung Agung, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu
5.	Andosol	511,83	5,54	Tanjung Agung, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut dan Semende Darat Ulu
6.	Asosiasi Gley	627,31	6,79	Talang Ubi, dan Gelumbang
7.	Asosiasi Latosol dan Litosol	54,51	0,59	Tanjung Agung
8.	Asosiasi Podsolik Coklat Kekuningan dan Hydromorf Kelabu	701,22	7,59	Talang Ubi dan Gelumbang
9.	Komplek Podsolik dan Latosol	88,69	0,96	Semende Darat Tengah, Semende Darat laut dan Semende Darat Ulu

Sumber : Muara Enim Dalam Angka, 2005

Dilihat dari jenis dan sebaran tanah di Kabupaten Muara Enim, jenis tanah yang paling banyak adalah Podsolik Merah Kuning. Jenis tanah ini cocok untuk perkebunan dan Hutan Tanaman Industri. Walaupun tanah ini miskin bahan organik dan unsur hara tetapi sangat reaktif terhadap pupuk fosfat. Dengan teknologi yang tepat, tanah ini mempunyai potensi yang besar. Jenis tanah Asosiasi podsolik coklat kekuningan dan hidromorf kelabu. Tanah ini kaya akan unsur hara dan basa. Sifat fisik tanahnya sedang dan agak peka terhadap erosi. Wilayahnya baik digunakan untuk kebun kopi, teh, sayuran, tumbuhan hutan dan belukar. Latosol adalah tanah dengan kadar liat lebih dari 60%, remah sampai gumpal, dan gembur. Tanah ini berkembang dari bantuan vulkan. Kesuburan tanah tergantung dari tingkat pelapukan. Pada tingkat pelapukan lanjut, tanah ini miskin bahan organik tapi sangat reaktif terhadap pupuk fosfat. Tanah ini biasanya banyak diusahakan untuk pemukiman dan perkebunan (karet, kelapa sawit, dan lain-lain). Tanah yang masih muda cukup subur dan daya menahan air sedang. Cocok dijadikan pusat tanaman pangan.

Tanah Andosol cukup baik dan berudara dingin, banyak diusahakan untuk tanaman hortikultura (sayuran, bunga dan buah-buahan), tanaman industri (teh, tembakau, kopi) dan tempat rekreasi .

Tanah alluvial terbentuk dari hasil sedimentasi bahan yang diendapkan oleh sungai, danau atau lautan. Ciri tanah ini berlapis-lapis dan umumnya berdrainase buruk, air tanahnya tinggi atau bahkan berawa rawa . Sifat tanah tergantung dari bahan yang diendapkan dan tempat pengendapan. Tanah Alluvial yang memiliki kesuburan cukup baik, cocok untuk produksi tanaman pangan. Sedangkan tanah regosol bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60% Regosol terbentuk dari abu atau pasir vulkan hasil erupsi. Sebagian dari tanah ini peka sekali terhadap erosi air ataupun angin, mudah kekeringan dan beberapa tempat berbatu sehingga lebih cocok untuk hutan. Sebagian lainnya mempunyai kesuburan yang cukup baik untuk tanaman tahunan. Jadi hampir seluruh lahan/tanah di Kabupaten Muara Enim sangat baik untuk dikembangkan menjadi areal sentra agribisnis

B. Penggunaan Lahan

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan telah memberikan warna dalam pola penggunaan lahan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Muara Enim sekitar 288 ribu Ha (33,09%) digunakan untuk perkebunan, 231 ribu Ha merupakan areal hutan (26,48%) , untuk sawah seluas 36,5 ribu Ha (4,17%) dan tegalan/kebun/ladang seluas 78,6 ribu Ha (9,01 %). Penggunaan lahan untuk Bangunan seluas 15,4 ribu Ha (1,76%) dan lahan sementara yang tidak diusahakan seluas 75,5 ribu Ha (8,66%). Penggunaan lahan yang masih relatif kecil adalah untuk kolam/tebat/empang seluas 1,2 ribu Ha (0,14%) dan sisanya untuk penggunaan lainnya.

Dilihat dari data penggunaan lahan di atas ini berarti luas lahan yang telah dibuka untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Muara Enim sudah lebih dari 50% dan luasan areal hutan yang merupakan

penyangga berbagai kehidupan di bumi hanya 26,48% dan dari tahun ke tahun luasan hutan semakin menurun dan dialihkan untuk penggunaan lain. Akibatnya di beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim kondisi lahan yang ada telah berubah menjadi lahan kritis.

Menurut informasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim luasan lahan kritis yang ada di Kabupaten Muara Enim sekitar \pm 132.454,08 Ha atau 14,34% dari luas Kabupaten Muara Enim.

C. Luas Kawasan Hutan

Sesuai dengan karakteristik/ciri khasnya dan untuk kepentingan masyarakat lokal maupun nasional, berdasarkan peruntukan/fungsi utamanya, hutan di Kabupaten Muara Enim diklasifikasikan menjadi:

1. *Hutan Produksi*, adalah hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sebagai penghasil komoditi kayu serta hasil hutan lainnya.
2. *Hutan Lindung*, adalah hutan yang karena sifat alamnya diperuntukan secara khusus untuk melindungi tata air, pencegahan erosi, banjir, serta pelindung terhadap tiupan angin.
3. *Hutan Konservasi atau Suaka*, adalah hutan yang karena sifat-sifatnya diperuntukan sebagai pelindung dan pelestarian bagi flora dan fauna, atau untuk pelindung suatu ekosistem.
4. *Hutan Konversi*, adalah hutan produksi yang dicadangkan untuk dilepas guna memenuhi kepentingan diluar kehutanan seperti untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, industri atau pemukiman

Tabel 5.2

**LUAS KAWASAN HUTAN MENURUT FUNGSI
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2007**

No	Jenis Hutan Menurut Fungsi	Luas (Ha)
1	SUAKA ALAM	\pm 10.191
2	HUTAN LINDUNG	\pm 94.813
3	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	\pm 36.795
4	HUTAN PRODUKSI TETAP	\pm 168.782
5	HUTAN PRODUKSI KONVERSI	\pm 72.497
	JUMLAH	\pm 383.078

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, 2007

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, diperoleh informasi mengenai luas kawasan hutan di Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada Tabel 5.5

Gambar 5.1
Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Muara Enim



Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

Luas kawasan hutan yang telah dikonversi menjadi kawasan perkebunan dan kawasan pertambangan adalah seluas 44.361 Ha yang terdiri dari 41.262 Ha untuk kawasan perkebunan dan 3.099 Ha untuk kawasan Pertambangan.

Data tersebut sesuai dengan izin lokasi yang diberikan dari Bupati Muara Enim maupun dari Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang diberikan kepada perusahaan –perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Hutan Produksi Konversi (HPK) Sungai Rotan - Sungai Belida yaitu :

1. PT. Cahya Vidi Abadi seluas 6.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan
2. PT. Pandega Usaha Kahuripan seluas 11.000 Ha yang berlokasi di Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Sungai Rotan
3. PT. Roempoen Enam bersaudara sudah ada izin pelepasan kawasan hutan seluas 9.512 ha dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia
4. PT. Indralaya Agro Lestari yang izin lokasinya dari Gubernur Sumatera Selatan karena antar/lintas kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim, dimana luas menurut izin lokasi dari Gubernur Sumatera Selatan \pm 13.000 Ha (di Kabupaten Muara Enim seluas 9.750 ha)

5. PT. Sumatera Asia Mandiri, baru mengajukan izin lokasi ke Bupati Muara Enim seluas \pm 5.000 Ha

Kawasan Hutan produksi yang telah dikonversi menjadi kawasan pertambangan adalah seluas 3.099 ha, dimana perusahaan yang sudah keluar izin penggunaan kawasan hutan/izin prinsip dari Menteri Kehutanan yaitu :

1. PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim seluas + 2,602 ha
2. PT. Prima Mulia Sarana Sejahtera seluas \pm 497 hektar.

D. Ruang Terbuka Hijau

Lahan selain mempunyai fungsi sebagai sarana penghasil komoditi bahan makanan dan produk pertanian lainnya, juga bermanfaat sebagai ruang terbuka hijau yang sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Tabel 5.3
DAFTAR AREAL RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MUARA ENIM
Data Tahun 2007

Taman Kota			
No	Nama Taman Kota	Lokasi/Alamat	Luas (Ha)
1.	Taman Kota Serasan	Jl. Jend. Sudirman	\pm 0,25
2.	Taman PT BA	Jl. Jend. Sudirman	\pm 0,25
3.	Taman Jembatan Enim II	Jl. A. Yani	\pm 0,25
4.	Taman Batas Kota Arah Palembang	Jl. Jend. Sudirman	\pm 0,25
5.	Taman Jembatan Lubuk Empelas (Bapedda & BKBD)	Jl. Cut Nyak Dien	\pm 0,10
6.	Taman Puyang Bujang	GOR Pancasila	+ 0,50
7.	Taman Parkir GOR	Jl. Jend. Sudirman	\pm 0,25
8.	Taman Pertamina	Jl. Jend. Sudirman	\pm 0,25
9.	Taman Baca / Stase	Jl. HP. Danal	+ 0,50
10.	Taman Dekat SDN 18	Jl. SMB II	+ 0,10
11.	Taman PNGAS	Jl. Jend. Sudirman	+ 0,15
12.	Taman SDN I	Jl. A.K. Gani	\pm 0,10
Hutan Kota			
No	Nama Hutan Kota	Lokasi / Alamat	Luas (Ha)
1.	Hutan Kota Sungai Aur	Jl. Bambang Utuyo	+ 1
2.	Hutan Kota Terminal Regional	Jl. SMB II	+ 1,5
3.	Hutan Kota SMAN 1 Unggulan	Jl. Pelita Sari	+ 1,1
4.	Hutan Kota Perkuburan Umum	Jl. Pemuda	+ 3
5.	Hutan Kota GOR Pancasila	GOR Pancasila	+ 2
Median Jalan			
No	Nama Median Jalan	Lokasi/Alamat	Panjang (m)
1.	Median Jalan Jend. Sudirman	Jl. Jend. Sudirman	+ 1.000
2.	Median Jalan Jl. Jend. A. Yani	Jl. Jend. A. Yani	+ 700

3	Medan Jalan GOR Pancasila	GOR Pancasila	± 500
Pulau – Pulau Jalan			
Nb	Nama Pulau Jalan	Lokasi/Alamat	Luas (Ha)
1.	Taman Tugu Jam	Jl. Jend. A Yani	± 0,10
2	Air Mancur	Depan Stasiun KA Jl. Jend. Sudirman	
3	Taman Meppo Gen	Jl. Jend. Sudirman	± 0,15
4	Tugu Juang	Simpang Jl. Cut Nyak Dien dan Jl. Jend. Sudirman	± 0,15

Sumber : UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim dan Bapedalda Kab. Muara Enim, 2007

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman (*Bulletin Kalpataru, 2004*). Pembentukan RTH di wilayah perkotaan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan.
- b. Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan kenyamanan dan suasana sejuk, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan upaya guna menjadikan Kota Muara Enim dan tempat lainnya yang sejuk, teduh, indah dan asri untuk itu dibutuhkan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas guna mengurangi dampak polusi, memelihara daerah resapan air, serta memelihara cadangan air tanah.

Beberapa lokasi di Kota Muara Enim yang dijadikan areal Ruang Terbuka Hijau yaitu berupa Taman Kota , Hutan Kota, Pulau-pulau Jalan, Median Jalan dan di Bantaran Sungai dapat terlihat dalam Tabel 5.3 .

Pemmasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target RTH antara lain :

1. Keterbatasan alokasi lahan bagi peruntukan RTH.
2. Perubahan atau penyimpangan fungsi RTH.
3. Kerusakan RTH karena ulah masyarakat dan pencemaran lingkungan.
4. Keterbatasan dana dan fasilitas bagi pengelolaan dan pemeliharaan RTH.

Upaya – upaya pemerintah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selama tahun 2007 antara lain :

- Melakukan pembersihan di lokasi, penyiraman, pemupukan, penyulaman tanaman, pemberian nama jenis pohon.
- Pengkayaan jenis tanaman dan memperbaiki taman-taman yang sudah ada.
- Membuat taman-taman baru pada lokasi-lokasi : sisi-sisi jembatan Enim II, Taman Makam Pahlawan, Taman Serasan Sekundang, Lapangan Merdeka, sepanjang Jalan Utama Gedung Olahraga dan Taman simpang BPN, depan kantor Bupati.
- Melakukan kegiatan penghijauan di daerah bantaran sungai dan hutan kota antara lain dengan menanam pohon jenis Angsana, Mahoni, dan Bunga Tanjung.
- Menanami sudut-sudut kota yang masih kosong.
- Pembuatan pagar pada hutan kota, membuat tempat pembibitan tanaman.
- Pemasangan Billboard atau papan himbauan
- Melibatkan partisipasi dunia usaha dalam pembuatan dan pemeliharaan taman kota.

3. TEKANAN TERHADAP LAHAN DAN HUTAN

Peningkatan aktivitas ekonomi, akan mendorong meningkatnya kebutuhan akan bahan baku dan bahan mentah, sehingga konversi penggunaan lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya hampir tak terelakkan. Berikut ini berbagai aktivitas manusia yang dapat menimbulkan dampak terhadap lahan dan hutan antara lain yaitu :

a. Kegiatan eksploitasi tambang terbuka

Kegiatan eksploitasi tambang terbuka merupakan salah satu penyebab meluasnya lahan kritis. Penambangan dan penggalian batubara maupun bahan galian Golongan C bersinggungan dengan bentangan tanah di dalam perut bumi. Bekas-bekas galian telah menimbulkan lubang galian yang cukup luas dalam jumlah cukup banyak. Secara ekologis, hal ini akan mengganggu kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pendataan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim kegiatan penambangan bahan galian golongan C (tanah liat, bangsal batu, pasir, koral/kerikil) umumnya banyak tersebar di Kecamatan Tanjung Agung (23 pengusaha), Kecamatan Ujan Mas (92 pengusaha), Kecamatan Gunung Megang (25 pengusaha) dan Kecamatan Rambang Dangku (9 pengusaha).

Para pengusaha penambang bahan galian golongan C sebagian besar belum memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan mereka mengenai kegunaan perizinan yang harus dimiliki setiap usaha penambangan.

Perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim ada 3 perusahaan yaitu PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Batubara Bukit Kendi dan PT. Prima Mulya Sarana Sejahtera. Sedangkan yang masih dalam tahap eksplorasi yaitu PT. PT. Tansri Madjid Energi, PT. Lion Power Energi dan PT. Pendopo Energi Batubara.

Gambar 5.2 Kegiatan Pertambangan Batubara



Sumber : Bapedalda Kabupat en Muara Enim, 2006

b. Kegiatan Pertanian

Kegiatan Pertanian tidak lepas dari penggunaan pupuk dan pestisida, dimana unsur-unsur tersebut bersifat reaktif dalam jumlah/konsentrasi yang rendah. Namun kenyataannya pengaplikasiannya kepada lahan pertanian ataupun pekebunan cenderung dalam jumlah yang berlebih dan sulit untuk di uraikan secara alami. Kelebihan zat-zat tersebut membentuk semacam sedimen pada lapisan tanah yang menimbulkan ketidak seimbangan pada unsur-unsur alami tanah, ketidakseimbangan tersebut dapat berupa penurunan porositas tanah, pengurangan mikroorganisme penguraian, gangguan pada unsur kimia tanah dan lain sebagainya. Inilah gejala awal lahan dinyatakan mulai tercemar / rusak.

Pengkayaan unsur kimia tanah dengan pupuk yang tidak seluruhnya dimanfaatkan oleh akar tanaman akan menjadi sumber pencemaran air yang cukup besar ketika di atasnya dilakukan kegiatan penebasan pohon, pembuatan palet, perambahan hutan yang meningkatkan laju erosi sehingga zat-zat tersebut terbawa ke perairan. Di perairan zat-zat tersebut menyebabkan blooming jumlah tanaman enceng gondok yang menutup permukaan air.

Belum ada penelitian khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui instansi terkait tentang jumlah perairan yang mengalami blooming namun hal tersebut sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diteruskan ke tiap kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penanggulangan akibat makin banyaknya tanaman enceng gondok di lokasi perairan yang bersumber melalui aktifitas pertanian ataupun perkebunan. Himbauan melalui surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 611/1729/Dis.PU.Air/2007 tanggal 23 April 2007 mengenai kebersihan sungai diteruskan melalui Surat Bupati Muara Enim Nomor 611/0709/VII/2007 tanggal 5 Mei 2007 kepada camat se Kabupaten Muara Enim agar mengingatkan para petani pengguna pupuk.

c. Pembakaran hutan dan Lahan

Kegiatan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan masyarakat dalam memulai kegiatan dengan alasan biaya murah dan tidak memerlukan peralatan yang mahal juga menjadi salah satu penyebab kerusakan lahan. Menurut informasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, pada Tahun 2007 lokasi kebakaran hutan terjadi di wilayah Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu dengan luas \pm 15 Ha. Lahan yang terbakar merupakan kebun dan lahan yang tidak produktif

Sebaran Hot Spot atau titik api yang terjadi di Kabupaten Muara Enim terjadi di bulan Agustus sebanyak 378 titik api, bulan September sebanyak 141 titik api dan bulan Oktober 22 titik api. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 luas areal kebakaran hutan dan jumlah sebaran titik api pada Tahun 2007 ini cenderung menurun.

Tabel 5.4
Data Sebaran Hot Spot Di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2004 – 2007

Tahun	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des
2004*	1	-	-	1	2	27	10	281	45	175	12	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	259	263	381	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	378	141	22	-	-

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim

- Majalah Hotspot No.3/April 2005

d. Perluasan areal pemukiman

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan lahan untuk mencari nafkah. Pembukaan hutan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya areal tangkapan air. Di perkotaan dimana lahan untuk pemukiman terus berkurang dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk sarana publik seperti kantor, toko, pasar dan lain-lain menyebabkan beberapa masyarakat membuat tempat tinggal di bantaran sungai.

e. Konversi hutan menjadi areal perkebunan dan pertambangan

Kegiatan konversi hutan menjadi areal perkebunan dan pertambangan juga dapat menjadi penyebab kerusakan lahan, untuk itu pemerintah melalui Departemen Kehutanan sangat selektif dalam pemberian izin pinjam pakai lahan.

f. Limbah Padat Domestik (Sampah)

Sampah terutama sampah organik dapat merusak tanah/lahan. Sifat sampah yang tidak bisa diuraikan menutupi tanah dan vegetasi yang ada di atasnya sehingga proses-proses alami tanah yang melakukan daur dekomposisi bahan-bahan organik menjadi unsur yang bermanfaat bagi tanaman menjadi terhambat.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pemanfaatan sampah, mulai dari kesadaran untuk mengurangi sampah yang dihasilkan, memanfaatkan kembali suatu barang, memilih produk isi ulang, membuang sampah pada tempatnya sampai dengan melakukan pemisahan sampah kering dan sampah basah. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan meningkatnya pola konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula timbulan sampah yang dihasilkan.

Operasional persampahan atau limbah padat domestik ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Muara Enim. Sampai saat ini UPTD Kebersihan dan Pertamanan baru ada di tiga kota yaitu Kota Muara Enim, Kota Tanjung Enim, dan Kota Pendopo. Pada dasarnya operasional persampahan terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1. Tahap pengumpulan, umumnya dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat (dari rumah sampai Tempat Pembuangan Sementara).
2. Tahap pengangkutan, dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dilaksanakan oleh UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muara Enim.
3. Tahap pengolahan akhir, dilaksanakan oleh masing-masing UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muara Enim.

Tabel 5.5
SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2007

Wilayah/ Kota	TPA		Jumlah TPS								Jumlah Truk Sampah		
	Jh	Luas (Ha)	Pemerintah								Swadaya	Pem	Swadaya
			Flat			Kayu	Beton	Container	Gerobak				
			Kotak Besar	Kotak Kecil	Kerucut								
Muara Enim	1	19	4	12	8	9	8	2	15	22	7(+1 ArmRoll)	-	
Tanjung Enim	2	5	-	-	-	-	-	-	5	-	3	1	
Pendopo	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	

Sumber : UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim, 2007

Lokasi TPA Kota Muara Enim berada di Bukit Kancil yang jaraknya \pm 5 Km dari Kota Muara Enim dengan luas \pm 19 Ha. TPA Pendopo berlokasi di PT. Musi Hutan Persada I, Stasiun 5 pur 6, TPA Tanjung Enim berlokasi di Banko dan Banko Barat PTBA

Selama Tahun 2007, diperkirakan 142,91 M³ timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Muara Enim per hari dan yang terangkut oleh UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim sebanyak 99,62 M³ atau 69,71% sisanya ada yang dibakar, ditanam dan dibuang ke lahan-lahan kosong atau sungai. Kendala yang dihadapi Kabupaten Muara Enim dalam pengelolaan sampah yaitu belum adanya alat berat berupa buldozer yang berguna untuk mengolah sampah di TPA, yang ada saat ini dozer kecil (*Skid Stear Loader*) yang selalu rusak.

g. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 yang dimaksud dengan limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan kesehatan manusia.

Apabila Limbah B3 tidak dikelola secara tepat dan benar dapat menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan yang daya dukungnya terbatas. Pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut, yang semua tahapan kegiatan tersebut harus mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta

Limbah B3 berasal dari kegiatan rumah sakit, industri baik skala kecil, menengah maupun besar. Hasil identifikasi dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Muara Enim, bahwa perusahaan sektor pertambangan minyak, gas bumi dan batubara termasuk proses utilitas pendukung lainnya, pembangkit listrik, serta bengkel atau *workshop* pada tiap proses pengolahan industri pulp, karet dan kelapa sawit yang semuanya memiliki potensi sebagai penghasil limbah B3. Mengingat banyaknya jumlah jenis kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3, penanganan limbah B3 sangat spesifik serta membutuhkan biaya yang relatif mahal maka sampai saat ini belum seluruh kegiatan penghasil limbah B3 melaksanakan pengelolaan dengan baik, terutama industri kecil yang pada umumnya masih mengelola limbah B3 secara konvensional. Beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim masih ada yang belum mengelola limbah B3 yang dihasilkannya secara tepat dan benar. Kebanyakan langsung membuangnya ke tanah, misalnya menimbunnya di lokasi pabrik atau membuangnya ke tempat pembuangan akhir sampah. Hal ini apabila dibiarkan saja secara terus menerus dapat mengganggu kesehatan manusia dan mencemari lingkungan.

Tabel 5.6

**Daftar Perusahaan Pengelola Limbah B3
Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2007**

No	Nama Perusahaan	Bidang / Jenis Usaha	Jenis Limbah B3	Izin	Keterangan
1	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Tambang Batubara	Olie Bekas, Baterai Basah Bekas, Filter Olie Bekas	Izin MENLH Nomor 421 Tahun 2006	Izin Penyimpanan Sementara
2	PT. PLN Sektor Bukit Asam	PLTU	Olie Bekas, Glass Wool, Lampu TL Fly Ash, Bottom Ash	Izin MENLH Nomor 215 Tahun 2006	Izin Penyimpanan Sementara
3	PT. Tanjung Enim Lestari	Industri Pulp	Ass Grit/Dreg, Screen Reject, Sludge Brine, Sand	Izin MENLH nomor : 49 Tahun 2002	Izin Penimbunan (Landfill) dan proses perpanjangan
4	Rumah Sakit PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	Rumah Sakit	Limbah Klinis (Medis)	Izin MENLH Nomor 395 Tahun 2006	Izin Pengoperasian Alat Pengolah Limbah B3 (Incenerator)
5	PTPN VII Unit Usaha SUNI	Pabrik CPO	Oli Bekas		Izin penyimpanan sementara
6	PTPN VII Unit Usaha SULI	Pabrik CPO	Oli Bekas	Kepmen LH Nomor 337 Tahun 2005	Izin Penyimpanan Sementara
7	PTPN VII Unit Usaha Beringin	Industri Lateks	Oli, Aki dan Terpentin Bekas	Kepmen LH No. 72 Tahun 2006	Izin Penyimpanan Sementara
8	PT. Batubara Bukit Kend	Tambang Batubara	Olie Bekas, Aki Bekas, Filter	Belum Ada	Dalam Proses Pengajuan izin ke KLH
9	Pertamina EP Pendopo	Eksplorasi Minyak	Oli, Aki dan Filter Bekas	Belum Ada	Dalam Proses Pengajuan izin ke KLH
10	PT. Pertamina (Persero) UB	Eksplorasi Minyak	Sludge Minyak, Oli & Baterai Bekas, Majun dan Lampu TL	Izin MENLH Nomor 425	Izin Penyimpanan

	Pertamina EP Limau			Tahun 2006	Sementara
11.	PT. Swas thi Parama Mulya	Industri Lateks	Olie Bekas	Belum Ada	
12.	PT. Lingga Jaya	Industri Lateks	Oli Bekas	Belum Ada	Volume sedikit dan digunakan untuk mesin
13.	PT. Cipta Futura	Pabrik CPO	Oli Bekas	Kepmen LH No. 342 Tahun 2005	Izin Penyimpanan Sementara
14.	JOB Pertamina Indelberg Indonesia	Eksplorasi Minyak	Oli – Filter Bekas	Belum Ada	Dalam Proses Pengajuan ke KLH

Sumber: Bapedalda Kabupaten Muara Enim 2007

h. Pencemaran lahan/tanah

Tekanan terhadap lahan/tanah juga bisa disebabkan oleh adanya pencemaran oleh limbah yang dihasilkan oleh industri/perusahaan. Misalnya saja adanya kebocoran pipa saluran pengangkutan minyak pada perusahaan pertambangan minyak. Minyak yang terecer dapat merusak lahan/tanah disekitarnya terutama perusahaan yang berlokasi berdampingan dengan lahan perkebunan penduduk. Hal ini tentu saja dapat merugikan dan meresahkan masyarakat sekitar pabrik. Selama Tahun 2007 tercatat ada sebelas pengaduan masyarakat mengenai kasus pencemaran tanah/lahan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.

4. DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP LAHAN DAN HUTAN

Adanya berbagai aktivitas pembangunan telah menimbulkan tekanan terhadap hutan dan lahan yang menimbulkan dampak berupa :

a. Meningkatnya luasan lahan kritis

Aktivitas masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada telah membuat tanah kehilangan unsur hara dan bahan organis dari lapisan tanah atas dan daerah perakaran yang merupakan kebutuhan untuk menyangga pertumbuhan tanaman terutama akibat aktivitas pertambangan dan pembukaan lahan dengan pembakaran, akibatnya lahan menjadi kritis. Luasan lahan kritis yang ada di Kabupaten Muara Enim sekitar \pm 132.454,08 Ha atau 14,34% dari luas Kabupaten Muara Enim.

b. Terjadinya erosi atau terkikisnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat yang diangkut oleh air atau angin ke tempat lain sehingga dapat menyebabkan terjadinya pendangkalan pada badan-badan air seperti sungai, saluran air dan lainnya.

c. Terjadinya bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Pada Tahun 2007, banjir besar telah terjadi di wilayah Kota Pendopo Kecamatan Talang Ubi dan bencana longsor di Kecamatan Semende Darat Tengah.

- d. Adanya kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) bagi masyarakat
- e. Berkurangnya keanekaragaman hayati.
- f. Banyaknya masyarakat yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhannya mengakibatkan flora dan fauna kehilangan tempat tinggalnya.

5. UPAYA-UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN DAN HUTAN

Mengingat jumlah luasan lahan yang bersifat statis dan semakin langkanya luasan lahan dan hutan yang subur dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan produksi pangan guna mengimbangi pertumbuhan penduduk, upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melestarikan hutan dan lahan antara lain :

1. Melaksanakan rehabilitasi dan konservasi tanah/lahan kritis antara lain dengan cara :
 - a. Program Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2004. Luasan tutupan yang telah dicapai \pm 1.700 Ha.
 - b. Melaksanakan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan bagi lahan bekas tambang. Salah satu areal yang sedang diupayakan untuk direklamasi dan direhabilitasi adalah lahan bekas tambang batubara. Di Kabupaten Muara Enim, usaha penggalan bahan tambang Batubara dilakukan oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT. Batubara Bukit Kendi beserta kontraktor-kontraktornya. Untuk memacu kegiatan revegetasi agar sejalan dengan lajunya pembukaan lahan pada tahun 2004 Pemkab Muara Enim meminta pihak PTBA untuk dapat memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi **Taman Hutan Raya** agar apabila proses penambangan telah selesai, maka pada daerah tersebut masih ada kegiatan ekonomi lainnya. Guna melegitimasi keinginan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tersebut kemudian disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) Enim. Guna mengimplementasikan perda dimaksud, dibuatlah Master Plan TAHURA Enim yang dirancang sebagai dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pembuatan TAHURA Enim dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan kegiatan penambangan. MASTER Plan ini disahkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 889/KPTS/BAPEDALDA/2005 Tanggal 16 September 2005.

Kemudian dibentuk juga Badan Pelaksana Pembuatan TAHURA Enim sesuai Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 941/KPTS/BAPEDALDA/2005 Tanggal 12 Oktober 2005. Badan Pelaksana ini bertugas menyusun rencana induk dan rencana detail TAHURA Enim, melaksanakan pembuatan TAHURA Enim dan menyampaikan laporan kemajuan pembuatan TAHURA Enim secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Muara Enim.

Rencana Induk (Master Plan) kemudian dijabarkan secara lebih rinci lagi menjadi Rencana Detil Pembangunan Zona-zona TAHURA Enim yang disahkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 656/KPTS/BAPEDALDA/2007 tanggal 25 Juni 2007. Dokumen ini memuat deskripsi detil dari setiap zona, tata letak dan rencana teknis untuk bangunan-bangunan tertentu, serta kegiatan tahunan untuk rencana jangka pendek termasuk biaya dan pelaksana kegiatan. Luas bekas tambang PTBA yang akan dijadikan TAHURA Enim adalah 5.394,6 ha, yang terdiri atas 3.350,5 ha di KP Air Laya dan 2.044,1 ha di KP. Bangko Barat.. Luas Bukaan sampai tahun 2004 akibat penambangan dan penimbunan di KP Air Laya adalah 2.458 ha dan di KP. Bangko Barat adalah 640,5 ha, atau total bukaan mencapai 3.098 ha. Sebagian dari bukaan tersebut telah mulai direklamasi dan pada Tahun 2005 luas lahan timbunan yang telah direklamasi adalah 839 ha di KP. Air Laya dan 307 di KP Bangko Barat. Pemanfaatan alih fungsi lahan bekas tambang dalam kawasan TAHURA Enim akan dibagi menjadi zona-zona yaitu zona penerima, zona hutan tanaman, zona kebun koleksi (konservasi flora lokal), zona penelitian produktif, zona kebun buah, zona wisata air, zona pertanian, zona peternakan, zona perikanan, zona bumi perkemahan, zona satwa dan zona sarana dan prasarana kelengkapan TAHURA Enim.

Keberadaan TAHURA Enim di kawasan lahan bekas tambang batubara PTBA di Kota Tanjung Enim diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan kawasan terutama kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Enim. Selain itu keberadaan TAHURA Enim diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan.

2. Melaksanakan kegiatan penghijauan
- a. Kegiatan penghijauan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan masyarakat desa. Pada Tahun 2007 kegiatan penghijauan dilaksanakan di 14 Desa dengan 20 kelompok tani yaitu Desa Kepur, Desa Paduraksa, Desa Tanjung Agung, Desa Sleman, Desa Penyandingan, Desa Keban Agung, Desa Perangiran, Desa Pandan Enim, Desa Purun, Desa Prambatan, Desa Betung, Desa Air Limau, Desa Menanti dan Desa Pagar Agung. Masing-masing kelompok tani mengelola 25 ha lahan untuk ditanami 400 batang pohon, sehingga total keseluruhan pohon yang ditanam adalah 10.000 batang pohon.
 - b. Melaksanakan kegiatan penghijauan pada peringatan –peringatan Hari Nasional antara lain :
 - Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 dengan menanam bibit-bibit pohon seperti mahoni, jati dan lain-lain di sepanjang bantaran sungai. Bibit-bibit pohon ini merupakan sumbangan dari beberapa perusahaan dalam Kabupaten Muara Enim yaitu PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk sebanyak 1000 batang dan PT. Cipta Futura sebanyak 150 batang
 - Pada saat pencanangan Gerakan Perempuan Tanam dan Pemeliharaan Pohon (GPTPP) tingkat Kabupaten yang puncaknya dilaksanakan tanggal 28 November 2007 di Gedung Olahraga (GOR) Pancasila Kabupaten Muara Enim yang kemudian dilanjutkan oleh organisasi perempuan pada tanggal 1 Desember 2007 di 22 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim dengan jumlah pohon yang ditanam

Gambar 5.3

**Kegiatan Penanaman Bibit Pohon oleh Bupati Muara Enim
Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia**



Sumber : Bapeda Kabupaten Muara Enim, 2007

3. Pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim. Saat ini RTRW Kabupaten Muara Enim sedang direvisi untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada.
4. Mengikuti program Bangun Praja yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI untuk mewujudkan Kota Muara Enim sebagai kota yang bersih dan hijau. Sejak Tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara sukarela berpartisipasi dalam **Program Bangun Praja** yang merupakan salah satu Program Strategis Kementerian Lingkungan Hidup yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juni 2002 di Denpasar Bali. Program Bangun Praja bertujuan untuk mendorong kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*Good Environmental Governance*) sekaligus dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Sasaran dari program ini adalah peningkatan kesadaran seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, pihak swasta dan masyarakat warga kota secara keseluruhan guna menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan dan kenyamanan kota dan berkat kerjasama semua pihak, pada tahun 2004, Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu dari 10 Kota/Kabupaten yang mendapat Piagam Adipura untuk kategori kota kecil dan pada Tahun 2005 2006 dan 2007, Kabupaten Muara Enim berhasil mendapatkan **Piala Adipura**. Demikian juga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, pada Tahun 2007 Kota Muara Enim juga mendapatkan Piala Adipura dari Gubernur Sumatera Selatan.

Gambar 5.4
Penerimaan Penghargaan dan Piala Adipura Tahun 2004 - 2006

Su
mb
er :
Ba
pe
da
da
Ka
bu
pat
en
Mu
ara
Eni
m,
20
07

5. U
n
t
u



k mengatasi permasalahan persampahan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dengan mengadakan pelatihan pengelolaan sampah organik di kalangan ibu-ibu rumah tangga, organisasi kewanitaan dan perwakilan dari beberapa instansi. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah melalui sumber rumah tangga. Tindak lanjut kegiatan ini adalah diadakannya lomba kebersihan antar kelurahan untuk merangsang masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelurahan yang menjadi pemenang dapat menjadi percontohan bagi kelurahan lainnya.

Kotak 5.1

PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK BAGI IBU RUMAH TANGGA, ANGGOTA ORGANISASI WANITA DAN INSTANSI PEMERINTAHAN DALAM KOTA MUARA ENIM

Muara Enim, 8 September 2007

Materi Pelatihan:

1. Pemanfaatan Kembali Sampah Rumah Tangga (Reuse) oleh: Bapak Mas Ace Puspawinata (Kepala UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim)
2. Pengenalan sampah organik oleh: Ibu Rosmiani Tje' Mat, M.Ed (Kepala Bapedalda Kabupaten Muara Enim)
3. Pengelolaan Sampah Organik skala rumah tangga, dan skala usaha kecil oleh: Bapak Sukarna beserta tim (Penerima Anugerah Kapataru Tingkat Propinsi Sumatera Selatan untuk Kategori Perintis Lingkungan)
4. Pemutaran Video Pembuatan Kompos dari sampah organik
5. Praktek langsung pembuatan Kompos dari sampah organik

Galeri Foto

Pelatihan ini diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari 30 orang warga masyarakat dari 6 kelurahan, 30 orang ibu-ibu PKK, 30 orang dari organisasi kewanitaan (Ibu-ibu Persit, Bhayangkari, PKK Kecamatan, PKK Kabupaten, Dharmawanita Kabupaten) dan 10 orang dari Instansi Pemerintahan dalam Kota Muara Enim.



Penyampaian Sambutan Kepala Bapedalda Kabupaten Muara Enim pada Pembukaan acara pelatihan

kepada seluruh peserta termasuk panitia pelaksana, sebanyak 200 buah, 100 bibit mangga, 100 bibit jambu dan 100 bibit mahoni kepada seluruh peserta untuk

diharapkan mampu menstimulasi peserta agar lebih memahami dan tertarik untuk melaksanakannya. Diakhir acara kepada peserta yang berasal dari warga masyarakat



- Mengadakan kegiatan jum'at bersih.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim selalu mengadakan kegiatan jum'at bersih. Dalam kegiatan ini aparat pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama-sama masyarakat melaksanakan pembersihan di pasar, pertokoan, jalan, areal pemukiman dan areal perkantoran.
 - Memasang papan-papan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
 - Menambah sarana dan prasarana yang ada.
 - Pada Tahun 2007 ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menambah sarana angkutan sampah berupa 2 unit Dump Truck untuk Kota Pendopo dan Kota Tanjung Enim serta 1 unit Arm Roll Truck untuk Kota Muara Enim.
6. Melakukan penilaian kelayakan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) bagi kegiatan yang akan beroperasi di Kabupaten Muara Enim oleh Tim Komisi AMDAL Kabupaten Muara Enim. Dalam kaitannya dengan hutan dan lahan, kewajiban bagi pemrakarsa adalah :
- a. Tidak membuka lahan dengan cara membakar,
 - b. Menyediakan areal yang tidak boleh dibuka atau ditebang, yaitu :
 - kanan kiri sungai 100 m
 - kanan kiri anak sungai 50 m
 - Disekitar mata air (sumber air) radius 100 m
 - c. Memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang
7. Melakukan patroli keamanan hutan oleh Polisi hutan (Polhut) dan Kepala Cabang Dinas Kehutanan (KCDK) serta melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kasus perambahan hutan seperti kegiatan penebangan/penjualan kayu ilegal dan untuk mengantisipasi /mencegah kebakaran hutan dan lahan.
8. Mendukung dan membina kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan. Antara lain dengan cara mengusulkan masyarakat yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat melindungi hutan dan lahan untuk memperoleh penghargaan Kalpataru baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dengan tujuan untuk meningkatkan semangat dan motivasi mereka agar lebih giat dalam melaksanakan kegiatan mereka.

Kotak 5.2

PROFIL PERAIH PENGHARGAAN KALPATARU TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAR KABUPATEN MUARAENIM TAHUN 2006 – 2007

Peraih Penghargaan Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan dari Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2006



Bapak **Mustawi Bin Tohar** warga Desa Lebak Budi Kecamatan Tanjung Agung secara sukarela dan tanpa pamrih sejak tahun 2002 telah menjaga dan melindungi hutan peramuan yang jaraknya ± 2 Km dari Desa Lebak Budi (Ataran Sungai Tarikan dan Kundur) dengan luas ± 100 Ha dengan mencegah adanya penebangan liar oleh masyarakat, menjaga hutan desa dari bencana kebakaran, menanam kembali hutan dengan kayu produktif (jenis Medang, Jelutung dan lain-lain) yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Setiap masyarakat desa yang ingin mengambil atau menebang pohon di peramuan desa, harus ada izin dari pemuka adat dan kepala desa. Dampak kegiatan ini terhadap komponen lingkungan fisik dan alam adalah terjaganya kestabilan ekosistem di Desa Lebak Budi seperti airnya yang masih jernih, udara bersih dan nyaman. Dengan adanya kegiatan ini juga dapat mengurangi potensi bencana banjir dan kebakaran hutan serta memperkaya flora dan fauna lokal. Selain itu kebutuhan masyarakat setempat akan hasil hutan tetap terpenuhi sesuai kebutuhan dan tidak semena-mena.

Perintis Lingkungan dari Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2007



Bapak Sularna warga Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul telah melakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis yaitu di lahan bekas tambang batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam menjadi lahan produktif. Usaha ini telah dilakukannya sejak tahun 2003. Luas lahan yang telah direhabilitasi yaitu sekitar 2,5 Ha. Sekarang lahan tersebut telah ditanami tanaman jati buah-buahan dan sayur-sayuran serta berbagai jenis tanaman hias. Selain itu beliau juga membuat kompos dengan memanfaatkan sampah-sampah organik dan kotoran sapi. Melalui kegiatan ini Bapak Sularna melibatkan masyarakat sekitar lokasi untuk menjadi karyawannya sehingga kesejahteraan meningkat. Di lokasi kegiatannya ia juga membangun pondok pesantren Daarul Yatim Lepas Mandiri yang menampung dan membina anak-anak yatim piatu dan putus sekolah.

ra Enim, 2007

- Mengadakan berbagai kegiatan perlombaan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kepada lingkungan bagi para pelajar. Antara lain lomba lukis lingkungan, lomba menulis artikel tentang lingkungan dan lomba kebersihan sekolah.

10. Berbagai peraturan juga telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim untuk mengendalikan dan menjaga kelestarian hutan dan lahan antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau Pada Tanah Milik.
- c. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 71 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemrosesan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik.
- d. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 72 Tahun 2001 tentang Prosedur Pemrosesan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu.
- e. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 301/Hut/2005 Tanggal 8 Maret 2005 tentang Pembentukan Petugas Patroli Pengamanan Hutan, Hasil Hutan dan Perambahan Hutan dalam Kabupaten Muara Enim.

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Istilah keanekaragaman hayati digunakan untuk merujuk berbagai macam kehidupan di muka bumi ini, yaitu tumbuhan, binatang dan mikroorganisme. Istilah keanekaragaman ini biasanya ditujukan pada tingkat spesies (jenis), tetapi dapat juga dipakai untuk mengungkapkan terdapatnya berbagai ekosistem atau habitat, serta variasi plasma nutfah yang tergantung dalam suatu spesies. (Kualitas Lingkungan Sumatera, 2001). Keanekaragaman hayati merupakan bagian dari komponen ekologis yang berperan sebagai penentu keseimbangan antara tatanan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan masyarakat.

1. KONDISI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Kabupaten Muara Enim yang memiliki hutan seluas 373.078 Ha dan 10.191 Ha diantaranya merupakan Hutan Suaka Alam, juga memiliki keanekaragaman hayati yang perlu dipertahankan keberadaannya. Keanekaragaman hayati merupakan penyedia berbagai keperluan bagi manusia, seperti bahan baku industri, obat-obatan, buah-buahan, dan satwa yang dapat dijadikan sumber pangan seperti kijang, rusa, babi hutan dan berbagai jenis burung seperti burung puyuh, dan merpati. Madu juga banyak diperoleh di hutan.

Munculnya beberapa kegiatan yang membuka lahan baru secara tidak langsung mengakibatkan gangguan terhadap sistem ekologi yang akan berlanjut memberikan dampak negatif terhadap kehidupan flora dan fauna di Kabupaten Muara Enim, bahkan beberapa jenis diantaranya sudah termasuk langka.

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa flora dan fauna yang ada di Kabupaten Muara Enim yang termasuk langka dan dilindungi.

Tabel 6.1
FLORADAN FAUNA YANG DILINDUNGI
TAHUN 2007

No	Nama	Nama Latin	Habitat/Lokasi
SATWA/FAUNA YANG DILINDUNGI			
1.	Gajah	<i>Eliphas maximus sumatraensis</i>	Kec. Semende
2.	Harimau	<i>Panthera tigris sumatraensis</i>	Kab. Muara Enim
3.	Beruang	<i>Helarctos malayamus</i>	Kab. Muara Enim
4.	Rusa, Kijang	<i>Cervus spp</i>	Kab. Muara Enim
5.	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>	Kab. Muara Enim
6.	Siamang		Kab. Muara Enim
7.	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	Kec. Semende
8.	Tapir	<i>Tapirus indicus</i>	Kab. Muara Enim
9.	Berang-Berang Gunung	<i>Lutra sumatrana</i>	Kec. Tj Agung, Kec. Semende
10.	Kancil, Napo	<i>Tragulus spp</i>	Kab. Muara Enim
11.	Orang Utan, Mawas	<i>Pongo pygmaeus</i>	Kec. Tj Agung, Kec. Semende
12.	Kambing Hutan	<i>Capreolus sumatraensis</i>	Kec. Semende
13.	Harimau Dahan	<i>Neofelis nebulosa</i>	Kec. Semende
14.	Buaya Muara	<i>Crocodylus porosus</i>	Kec. Sungai Rotan
15.	Rangkong / Enggang	<i>Aceros cassis</i>	Kec. Semende
TUMBUHAN/FLORA LANGKA YANG DILINDUNGI			
1	Tenam	<i>Anisoptera costata</i>	Kec. Semende

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, 2007

2. TEKANAN TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI

Berbagai kegiatan manusia yang telah menimbulkan dampak langsung terhadap flora dan fauna yaitu :

- a. Penambangan bahan galian akan menghilangkan vegetasi penutup (flora) yang juga akan menimbulkan kerusakan lahan dan habitat dari flora dan fauna dan mengganggu kehidupan biota air.
- b. Eksploitasi hutan yang berlebihan telah menciutkan areal hutan sebagai habitat dari satwa liar sehingga menjadi sempit. Bagi fauna, kerusakan hutan ini telah mengancam kelangsungan hidupnya sehingga banyak jenis hewan yang terancam kepunahannya.
- c. Konversi hutan menjadi areal pemukiman dan perkebunan juga telah menimbulkan dampak terhadap flora dan fauna asli pada area yang dikonversi. Hilangnya flora dan fauna oleh kegiatan ini berlangsung pada saat pembukaan lahan, untuk mengubah ekosistem

alami menjadi ekosistem binaan. Perubahan ini menimbulkan perubahan keanekaragaman hayati dari yang tinggi ke yang rendah.

- d. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas udara, tanah dan air secara tidak langsung akan mempengaruhi lingkungan hayati. Misalnya beberapa kegiatan industri yang menggunakan atau menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3), penggunaan pestisida untuk membasmi hama dan penyakit dalam kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan kontaminasi terhadap flora dan fauna.
- e. Perburuan satwa liar yang tergolong langka oleh penduduk di pinggiran hutan juga telah mempercepat kepunahan jenis atau spesies.
- f. Kebakaran hutan juga menjadi salah satu penyebab hilangnya habitat jenis-jenis flora dan fauna. Berbagai aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan hutan, hampir selalu diawali pembukaan lahan dengan cara membakar dengan alasan murah dan hanya memerlukan peralatan sederhana dan tenaga kerja yang sedikit.

3. DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI

Hampir semua kegiatan pembangunan akan berdampak pada keanekaragaman hayati. Dampaknya dapat berupa perubahan komposisi jenis dan gangguan terhadap flora dan fauna antara lain adalah :

- a. kemungkinan hilang atau punahnya species tertentu baik tumbuhan maupun hewan.
- b. kemungkinan hilang atau berkurangnya lahan atau habitas species tertentu
- c. kemungkinan hilang atau berkurangnya sumber makanan atau putusya rantai makanan dan aliran energi dalam ekosistem tempat dimana flora dan fauna itu hidup.

4. PENGELOLAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu di kelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Usaha pemanfaatan keanekaragam hayati secara lestari pada dasarnya merupakan usaha pengendalian dan pembatasan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati serta berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat di kelola secara terus menerus.

Upaya– upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menjaga kelestarian dan mengembalikan flora dan fauna yang merupakan sumber daya hayati yang tidak ternilai harganya, antara lain :

- a. Menetapkan identitas flora dan fauna yang menjadi ciri khas Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 565 Tahun 2001 yaitu Kayu Tenam (*Anisoptera costata*) untuk jenis flora dan Berang-berang Gunung (*Lutra sumatrana*) untuk jenis fauna. Sesuai dengan surat Dirjen Bangda Depdagri Nomor 660-1/1003/V/ Bangda tanggal 8 Juni 2000, Usulan penetapan identitas flora sudah disetujui, sedangkan untuk fauna statusnya hingga kini masih usulan. (SLHD Provinsi Sumatera Selatan, 2006). Diharapkan dengan penetapan identitas flora dan fauna ini, masyarakat Kabupaten Muara Enim dapat mempertahankan keberadaannya supaya tidak punah.
- b. Melakukan upaya konservasi yaitu membangun kawasan konservasi *ex-situ* atau kawasan konservasi komponen keanekaragaman hayati di luar habitat alamnya yang ada di Kabupaten Muara Enim yaitu Kebun Binatang Sriwijaya yang berada di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang. Kebun Binatang ini dibangun diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 17 Desember 1998 dan dikelola oleh Yayasan Sriwijaya. Luas lahan keseluruhan kebun binatang ini adalah 34 Ha namun yang baru digarap oleh pengurus adalah 10 Ha. Binatang-binatang yang ada di kebun binatang ini adalah Kuda, Beruang, Buaya, Ular Sawo, Monyet, Bintorong (Musang Pandan), Kancil, Rusa, Kangguru, Landak, Angsa, Bangu, Beruk Semuni, dan berbagai jenis burung antara lain Burung Elang, Rajawali, Garuda, Nuri, dan Kaswari. Sedangkan jenis tanaman yang ada yaitu Pohon Akasia, Petai, Beringin, Pelawi, Cemara, Bambu Kuning dan lain sebagainya.
- c. Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilakukan penbrebaran bibit ikan yang dikonsumsi masyarakat yaitu ikan patin, ikan Mas dan ikan Mujair dan penanaman bibit pohon seperti Mahoni, Durian, bunga Tanjung, Bungur dan sebagainya di beberapa lokasi yang agak gersang dan di bantaran sungai.
- d. Melaksanakan kegiatan Reboisasi atau penghijauan dan Gerakan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) Kritis untuk pengembalian hutan yang lestari. Program Gerhan telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dan sampai dengan Tahun 2007 kegiatan ini telah mencapai tingkatan tutupan vegetasi seluas ± 1.700 Ha.
- e. Bekerja sama dengan perusahaan tambang PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Pemerintah Kabupaten Muara Enim sedang menggalakkan kegiatan menghutankan kembali lahan-lahan bekas tambang dengan tanaman-tanaman asli (*specific local*) untuk mengembalikan satwa-satwa yang telah berkurang akibat pembukaan lahan dan eksploitasi

sumberdaya alam untuk dimanfaatkan sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) Enim dimana beberapa zona pemanfaatan lahan nantinya akan berupa zona hutan tanaman, zona kebun koleksi (konservasi flora lokal), zona penelitian produktif, zona kebun buah, zona pertanian, zona peternakan, zona perikanan, dan zona satwa

- f. Pemanfaatan hasil hutan secara terkendali melalui pengawasan perijinan. Beberapa Peraturan Daerah telah dikeluarkan untuk mengendalikan pemanfaatan hasil hutan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik.
- g. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dengan membagikan bibit-bibit pohon kepada masyarakat untuk ditanam di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.
- h. Melaksanakan Penyuluhan tentang Pelestarian lingkungan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran akan arti pentingnya lingkungan serta membudayakannya kepada masyarakat.
- i. Untuk Kota Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membenahi dan menambah koleksi taman – taman kota di berbagai sudut kota dengan melibatkan partisipasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Diharapkan dengan adanya taman-taman ini, Kota Muara Enim dapat menjadi Kota yang Hijau dan Sejuk dan dapat menambah satwa seperti burung dan kupu-kupu.
- j. Membuat papan –papan himbauan pelestarian flora dan fauna
- k. Memajukan budidaya perikanan dan peternakan. Salah satu kegiatan budidaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim yaitu Budi daya Udang Galah.

BAB VII

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Hasil pemantauan kualitas lingkungan memperlihatkan bahwa kualitas air sungai, air tanah, dan udara, masih ada beberapa titik pantau yang belum memenuhi baku mutu sesuai dengan peruntukannya. Kualitas air sungai cenderung menurun ke arah hilir (muara) akibat adanya penambahan beban pencemaran sepanjang aliran sungai dan hal ini juga menyebabkan penurunan kualitas badan air sungai Enim dan sungai Lematang. Berbagai bencana seperti banjir dan longsor juga terjadi hampir setiap tahun merupakan ancaman bagi Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mencari solusi dan mengambil tindakan penanggulangan dan pencegahan agar kerusakan lingkungan tidak menjadi semakin parah. Oleh karena itu agenda pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan ke depan di arahkan kepada :

(a) Konsep pembangunan

Konsep pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim kedepan tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam (*resource based*) dan mengandalkan investor luar daerah saja, namun perlu memberdayakan masyarakat agar masyarakat merasa memiliki tanggungjawab dan kemampuan untuk mengelola serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Agar pembangunan yang berkesinambungan dapat terjaga maka prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu mendapat perhatian serius seperti :

1. Pemikiran aspek lingkungan hidup sedini mungkin dan pada setiap tahap/fase pembangunan
2. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebijaksana mungkin untuk kebutuhan masa kini dan keperluan generasi yang akan datang
3. Pembangunan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan seperti perubahan tata ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.
4. Pembangunan di bawah nilai-nilai ambang batas.

(b) Partisipasi pengelolaan lingkungan

Partisipasi pengelolaan lingkungan dalam masyarakat Kabupaten Muara Enim belum sepenuhnya terbentuk, hal ini disebabkan upaya mengkampanyekan partisipasi pengelolaan lingkungan belum menyentuh masyarakat banyak. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya bersifat seremonial namun juga bersifat operasional dengan selalu mengajak semua *stake holder* berpartisipasi dalam beberapa kegiatan lingkungan, seperti penanaman pohon, pembuatan taman, pengadaan tong sampah, pembersihan lingkungan, atau workshop untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara bijak.

(c) Peningkatan upaya pengawasan lebih antisipatif

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam menangani permasalahan lingkungan seolah-olah masih bersifat reaktif (bertindak ketika permasalahan lingkungan muncul) seperti jika terjadi bencana alam dan pencemaran akibat kebocoran pipa dan lain sebagainya. Namun sebetulnya sudah banyak program-program yang dibuat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan lingkungan, seperti AMDAL, Proper, Prokash, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pembuangan Limbah Cair, Pengembangan Laboratorium, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang semuanya dilaksanakan untuk mengantisipasi tantangan masa depan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Sampai saat ini melalui DiKlat yang telah diikuti, Bapedalda Kabupaten

Muara Enim telah memiliki 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS LH) dan 3 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), agenda utama tahun 2008 adalah meningkatkan pengawasan terhadap kejadian – kejadian yang berpotensi menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan.

(d) Proporsi Anggaran Konservasi dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Anggaran pembangunan pada dasarnya merupakan cerminan kebijakan pemerintah bagaimana mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendanaan bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim masih terbatas. Apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran pembangunan untuk sektor-sektor produktif (industri, pertanian dan pertambangan) yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, maka alokasi anggaran untuk sektor lingkungan relatif kecil tidak memadai untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Perlu kiranya menambah anggaran untuk pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup sehingga proporsional untuk tiga pilar pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi, dan lingkungan).

(e). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM aparat setiap tahun menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan seperti AMDAL Penilai, Pemantauan Lingkungan, Laboratorium, Pengelolaan Limbah B3, Bioremediasi dan lain sebagainya dan untuk masyarakat dilaksanakan melalui kursus-kursus keterampilan pembuatan kompos dan lain-lain dengan harapan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

(f) Pengembangan sistem informasi lingkungan

Dalam upaya penyediaan informasi, jaringan informasi dan jaringan pertukaran informasi secara terstruktur dengan bekerjasama dengan instansi baik secara vertikal maupun horizontal baik media cetak dan elektronik guna mendapatkan informasi yang tepat, cepat, akurat dan berkesinambungan, secara berangsur-angsur akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya.

(g) Penguatan dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan

Penguatan dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mendorong peningkatan efektivitas penegakan hukum lingkungan, untuk itu telah dilatih beberapa PPNS LH dan PPLH dari staf Bapedalda.

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan memecahkan permasalahan isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut :

1. Air

Upaya-upaya yang akan dilakukan pada Tahun 2008 dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas perairan di Kabupaten Muara Enim antara lain :

- a. Pelaksanaan program lingkungan yaitu Program Kali Bersih (Prokash) dan Program Bangun Praja perlu dilaksanakan secara konsisten dan terpadu dengan melibatkan semua “*stake holders*”. Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan Prokash diantaranya melalui pemasyarakatan/sosialisasi tentang produksi bersih dan gerakan hemat air. Bapedalda sendiri akan terus melaksanakan pemantauan kualitas air sungai Enim secara berkala dengan pengambilan sampel air sungai untuk diuji kualitasnya di Laboratorium Bapedalda. Data ini akan digunakan untuk mengetahui kecenderungan kualitas air Sungai Enim dari tahun ke tahun. Selain itu juga akan dilaksanakan pembersihan bantaran sungai Enim, Sungai Lematang dan anak – anak sungai yang ada di Kota Muara Enim.

Upaya ini tidak dapat membawa hasil optimal tanpa peran serta dari masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai karena mereka turut andil dalam mempengaruhi kualitas air dari limbah domestik mereka, termasuk kegiatan-kegiatan di hulu, di luar Kabupaten Muara Enim. Untuk itu pelaksanaan Prokash mendatang perlu dikembangkan ke arah penataan daerah batas pengelolaan sungai dengan mengembangkan *One River- One Plan-One Integrated Management*, terutama untuk Sungai Lematang yang melewati beberapa kabupaten.

- b. Peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemaran antara lain - penerapan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) secara konsisten.

Perusahaan – perusahaan yang belum mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair akan terus dibina kinerja pengelolaan limbahnya agar memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan. Pada Tahun 2008 melalui Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan mengadakan Perahu karet untuk memudahkan tim dalam melakukan pengawasan lebih dekat dengan lokasi titik pantau. Tahun

depan rencananya Bapedalda akan meningkatkan pemantauan kualitas air tidak hanya air sungai saja tapi juga terhadap sumber air lainnya seperti air danau, rawa, dan mata air.

d. Peningkatan Laboratorium Lingkungan

Diharapkan Laboratorium Bapedalda kabupaten Muara Enim dapat menjadi laboratorium lingkungan yang handal dan memberikan informasi lingkungan yang akurat, tepat dan transparan guna dimanfaatkan para pemangku kepentingan melalui :

- peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan berupa penambahan peralatan dan rehab gedung kantor laboratorium.
- Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia analis laboratorium dengan mengikutsertakan dalam program pelatihan atau magang.
- Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium dalam rangka menuju proses akreditasi laboratorium lingkungan.

e. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih bagi masyarakat pedesaan dengan pengembangan sistem instalasi air minum pedesaan.

f. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Udara

Program-program yang akan dilaksanakan untuk menjaga kualitas udara di Kabupaten Muara Enim antara lain melalui :

a. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara

Penambahan titik pantau udara ambien dan penambahan kegiatan pemantauan dengan pemantauan kualitas emisi di beberapa sumber emisi tidak bergerak. Untuk tahun 2008 kegiatan yang akan dipantau adalah pada kegiatan yang diduga signifikan terhadap kualitas udara sebagai dasar penentuan kebijakan pengelolaan kualitas udara di Kabupaten Muara Enim

b. Kegiatan Pemantauan Kualitas dan Kuantitas air hujan

Semakin menglobalnya isu deposisi asam; baik deposisi basah (hujan asam) maupun deposisi kering akibat meningkatnya pencemaran udara, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bapedalda, menargetkan melakukan pemantauan kuantitas (curah hujan) dan kualitas air hujan.

c. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan akan lebih ditingkatkan dengan memonitor aktivitas perusahaan yang berpotensi mencemari udara.

d. Kegiatan Pengendalian

Sebagai lembaga yang bersifat pembinaan dalam melaksanakan fungsi pengendalian terhadap dampak lingkungan, tahun 2008 antara lain melalui menghimbau perusahaan dan masyarakat luas menghentikan penggunaan peralatan yang mengandung bahan perusak ozon (CFC) dan mengganti dengan peralatan yang lebih ramah lingkungan.

3. Tanah dan Lahan

a. Dalam mendukung Program Menuju Indonesia Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah merencanakan program pembuatan peta-peta seperti peta kawasan rawan bencana longsor dan rawan banjir, peta lokasi sumber daya air, peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya.

b. Program Pengendalian dan Pencegahan Dampak Lingkungan

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan peraturan/ketentuan-ketentuan sekaligus untuk meminimalkan gangguan terhadap lingkungan maka ditetapkan AMDAL sebagai salah satu pendekatan pengelolaan lingkungan.

Kegiatan pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut :

- Penilaian dokumen Amdal oleh Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Pemantauan dan Evaluasi hasil implementasi RKL/RPL serta UKL/UPL \

c. Percepatan upaya reklamasi lahan bekas tambang untuk mengurangi tingkat erosi yang mengakibatkan pendangkalan dan kerusakan ekosistem daerah aliran sungai.

d. Meningkatkan kegiatan rehabilitasi lahan kritis.

Upaya peningkatan kegiatan rehabilitasi lahan kritis akan dilakukan melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan.

e. Di bidang Persampahan

Upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mewujudkan lingkungan hidup kota Muara Enim yang bersih, tertib, indah dan sehat melalui : Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan berupa Pengadaan Bin Container untuk taman kota dan pejalan kaki (trotoar), pengadaan Alat Berat (Bulldozer) dan Mesin Pembuat Kompos untuk TPA serta Pembangunan Jalan Operasional di dalam TPA (Lanjutan DED)

f. Program Pengawasan dan Pengendalian Limbah B3

Untuk meningkatkan kepedulian para pengusaha terhadap penanganan limbah B3 maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tentang pengelolaan limbah B3 untuk pengusaha industri , dan sektor kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan limbah B3 dan menghimbau dunia usaha untuk segera meminta izin pengelolaan limbah B3 kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

g. Untuk mengurangi dan mengendalikan banjir dan Longsor, perlu adanya sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan banjir dan longsor. Sedangkan kegiatan fisik akan dilaksanakan kegiatan normalisasi sungai pembuatan talud pada daerah rawan longsor dan pemetaan daerah kawasan rawan bencana banjir dan longsor.

h. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pengembangan sarana Ruang Terbuka Hijau, diarahkan pada visi terwujudnya Tata Ruang Terbuka Hijau dan Keindahan Kota yang melibatkan berbagai stakeholder sehingga mampu meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana ruang terbuka hijau dalam Kabupaten Muara Enim .

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan yaitu:

- Pembangunan tata kota dan jalur hijau kota, serta lingkungan tempat berinteraksi bagi masyarakat kota Muara Enim.
 - Pengembangan dan pemeliharaan taman di Kota Muara Enim, kota Tanjung Enim dan Kota Pendopo untuk memberikan ruang terbuka bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk berinteraksi sosial, sehingga terbentuk lingkungan fisik dan sosial yang lebih sehat danarganya.
 - Penanaman atau penghijauan pohon-pohon untuk tercapainya akselerasi ruang hijau kota dengan berbagai fungsi, baik ditinjau dari segi teknis, fisik, estetisnya, sosial dan ekonomis.
- i. Peningkatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C dengan menghimbau agar pelaksanaan kegiatan memiliki SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah)
- j. Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

Upaya – upaya yang akan dilakukan antara lain :

- Memantau titik api atau hot spot dan melaporkan tingkat kerusakan akibat kebakaran.
- Mengadakan penyuluhan bagi masyarakat mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan dan sanksi bagi pelaku pembakaran.
- Memasang papan peringatan pada lokasi-lokasi rawan kebakaran
- Peningkatan kinerja Petugas Patroli Pengamanan Hutan, Hasil Hutan dan Perambahan Hutan dalam Kabupaten Muara Enim.

5. Keanekaragaman Hayati

- a. Dalam pembangunan Taman Hutan Raya (TAHURA) Enim akan ditanami tanaman khas Kabupaten Muara Enim yang sudah hampir punah seperti gaharu, kayu tenam, dan lain-lain.
- b. Melepaskan kembali satwa-satwa liar yang sudah langka ke habitatnya (TAHURA).

6. Peningkatan Peran serta masyarakat

- a. Mengadakan Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi ibu-ibu Rumah tangga dan organisasi kewanitaan.
- b. Mengadakan Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi Siswa-siswa SMA
- c. Mengadakan lomba kebersihan lingkungan tingkat SMP dan SMA
- d. Mengadakan lomba kebersihan lingkungan tingkat kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim
- e. Mengadakan Lomba Lukis untuk murid-murid tingkat SD dan SMP
- f. Mengadakan Lomba penulisan artikel lingkungan untuk siswa tingkat
- g. Membagikan bibit-bibit pohon kepada masyarakat untuk ditanam di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.
- h. Penyebaran informasi lingkungan melalui penyuluhan masyarakat, leaflet, media massa, dan radio.

LAMPIRAN 1

FLORA DAN FAUNA IDENTITAS KABUPATEN MUARA ENIM

KAYU TENAM

Anisoptera costata

Klasifikasi

Bangsa : *Dipterocarpaceae*

Deskripsi

Tinggi pohon mencapai 65 m atau lebih, batang berbentuk silindris lurus yang ditumbu oleh banir-banir kuat serta bertajuk tinggi dan berwarna coklat keabu-abuan. Tinggi batang bebas cabang mencapai 35 m. Diameter mencapai 150 cm dan tinggi banir dapat mencapai 4 m.

Daun tunggal, tersusun selang-seling, panjang 6 – 18 cm, lebar 7 – 11 cm. Ujung daun runding, pangkal tumpul, daun berwarna hijau muda dan permukaan bawah daun berwarna hijau keabu-abuan atau hijau kecoklatan.

Bunga berwarna putih, tumbuh di ujung atau ketiak daun. Tangkai bunga panjangnya hingga 20 cm dan bunga di tiap cabang berjumlah hingga 5. Kelopak bagian dalam berbulu panjang, bagian luar berbulu pendek, bentuknya segitiga runcing. Mahkota berwarna krem dan berbentuk runcing.

Buah :

Buah berbulu pendek terdiri dari 5 sayap. Dua sayap panjang berukuran panjang sampai 16 cm dan lebar 1,5 – 2 cm. Buah berbentuk pedang, pangkalnya tumpul. Tiga sayap kecil berukuran panjang sampai 20 mm, lebar sampai 4 mm.

Benih :

Diameter benih antara 10 – 11 mm dengan jumlah benih 1500 – 2000 benih per kg.

Habitat

Di daerah dataran rendah yang berbukit kering, dengan ketinggian sampai 700 m dpl. Curah hujan antara 1500 – 2500 mm, suhu rata-rata 27,5^oC. Tumbuh pada tanah berpasir pada tingkat keasaman (pH) 4-5

Penyebaran

Tersebar di seluruh Sumatera kecuali Bengkulu, di seluruh Kalimantan, di seluruh Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Tersebar juga di negara-negara Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Semenanjung Malaysia, Singapura dan Filipina.

Pemanfaatan

Kayunya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sampan dan konstruksi-konstruksi ringan di bawah atap misalnya tiang-tiang kecil dan reng, selain itu dapat juga digunakan sebagai interior, perahu, bangunan, vinir dan plywood.

Sumber : *BPTH Sumatera*



Sumber : *Anisoptera costata* (Dedy - BPTH Sumatera)



Gambar :
BERANG – BERANG GUNUNG
(*Lutra sumatrana*)

BERANG – BERANG GUNUNG

Lutra sumatrana

Klasifikasi

Bangsa: *Mustelids*

Deskripsi

Badan dapat memanjang dan bentuknya agak silindris, panjang badan 55 – 100 cm, tinggi 30 – 55 cm berat 4,5 – 15 kg, kepala datar dan lebar, hidung moncong tumpul, mata kecil, ekor panjang, berotot, fleksibel, tebal dengan ujung yang meruncing, telinga dapat ditutup bulu tahan air dan halus, umur dapat hidup sampai umur 21 tahun, jumlah gigi 32 – 36, kaki berkaki pendek, terdapat selaput diantara 5 jarinya dan mempunyai cakar yang mirip dengan cakar tikus, makanan ikan, burung-burung laut, bebek.

Berang – belang pada umumnya berburu pada malam hari, terutama ketika bulan bersinar terang. Mereka dapat dilihat pada siang hari di daerah-daerah dimana mereka tidak diganggu dan diburu dan berjemur diatas bebatuan dan tunggul diatas air. Mereka biasanya berburu di air dan merupakan perenang dan penyelam yang gesit dengan daya tahan yang hebat. Mereka dapat menyelam selama 6- 8 menit. Pada saat berenang kaki depannya menempel ditubuhnya. Kaki belakang dan ekornya digerakkan terus menerus untuk mengendalikan tubuhnya. Mereka dapat menjejak air, berdiri tegak sehingga kepala, leher dan dadanya berada diatas permukaan air.

Berang – belang dewasa biasanya berburu sendirian tetapi belang- belang betina akan berburu dengan anaknya, atau da dapat bergabung dengan belang- belang betina lainnya dan ketika pada musim kawin mereka bergabung dengan belang- belang jantan. Berang- belang dapat menempuh berkilo-kilo meter dalam semalam untuk berburu, mereka umumnya berenang ke hulu dan memasuki ceruk dan sungai-sungai kecil.

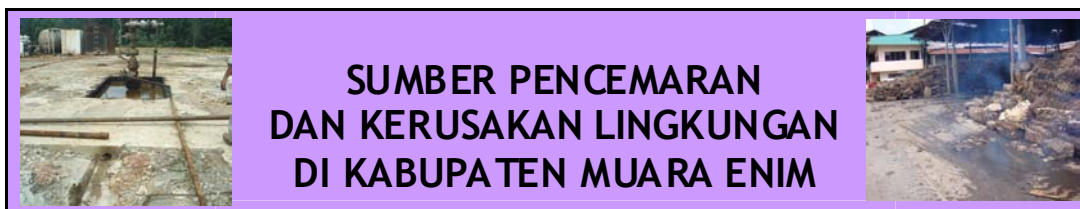
Habitat

sungai, danau. Berang- belang pada umumnya menggali sendiri sarangnya di semak-semak dengan pintu masuk kira-kira 50 cm dibawah permukaan air. Sarang tersebut merupakan saluran udara. Berang – belang juga menggunakan sarang yang dibuat oleh srigala, kelinci atau menghabiskan waktunya dengan bersembunyi di sepanjang tumbuhan dan dang-alang.

Penyebaran

Nepal, Yunan, Sumatera, Kalimantan, Bangka

LAMPIRAN 2



No.	Wilayah Kecamatan	Sumber Potensi Pencemar	Jenis usaha/kegiatan
1	Semende Darat Ulu	-	-
2	Semende Darat Tengah	-	-
3	Semende Darat Laut	- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai - PT. Pertamina Geothermal Energy Lumut Balai	- PLTPB - Geothermal
4	Tanjung Agung	- PT. Batubara Bukit Kendi - PT. Bumi Sawindo Permai - PT. Prima Mulya Sarana Sejahtera - SPBU	- Tambang Batubara - Industri CPO - Tambang Batubara - SPBU
5	Lawang Kidul	- PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) - PT. Lingga Jaya - SPBU PT BA - PT. PLN Sektor Bukit Asam - PT. Bumi Khatulistiwa	- Tambang Batubara - Industri Lateks - SPBU - PLTU - Pengumpul Accu Bekas
6	Muara Enim	- SPBU - TAC Pertamina Pilon Tanjung Lontar	- SPBU - Migas
7.	Ujan Mas	- PT. Cipta Futura - PT. Baniah Rahmat Utama - PT. Mawar Persada Bhakti	- Kebun sawit dan Industri CPO - Stone Crusher (Pemecah Batu) - Asphalt Mixing Plant
8.	Gunung Megang	- PTPN VII SULI - PT. Meta Epsi Pejabe Power Generation - CV. Mega Mas - PT. Musi Lestari Abadi - SPBU	- Kebun sawit dan Industri CPO - PLTG - Industri kayu olahan (vener) - Industri kayu olahan (vener) - SPBU
9.	Rambang Darangku	- PT. Tanjung Enim Lestari - PT. Musi Hutan Persada - PTPN VII SUNI - Urit Bisnis Pertamina EP Limau	- Industri Pulp Hutan Industri - Kebun Sawit dan Industri CPO - Migas

No.	Wilayah Kecamatan	Sumber Potensi Pencemar	Jenis usaha/kegiatan
10.	Talang Ubi	<ul style="list-style-type: none"> - JOB Pertamina Lekom Maras - PT. Surya Bumi Agro Langgeng - - PT. Musi Hutan Persada - PT. Medco E & P Indonesia - JOB Pertamina Lekom Maras - SPBU 	<ul style="list-style-type: none"> - Migas - Kebun Sawit dan Industri CPO - Hutan Industri - Migas - Migas - SPBU
11.	Benakat	<ul style="list-style-type: none"> - JOB Pertamina In delberg Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Migas
12.	Pen ukal	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Golden Blossom Sumatera - PT. Laras Karya Kahuripan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebun Sawit - Kebun Sawit
13.	Abab	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Golden Blossom Sumatera 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlebunan Sawit
14.	Tanah A bang		
15.	Lembak	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Pertamina EP Prabumulih 	<ul style="list-style-type: none"> Migas
16.	Gelumbang	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Vista Agung Kencana - Inderalaya Farm - PT. Multi Breeder Adirama Indonesia - PT. Kharisma Damai Cemerlang PT. Baniah Rahmat Utama SPBU 	<ul style="list-style-type: none"> - Peter nakan - Peter nakan - Peter nakan - Industri karet setengah jadi - Asphalt Mixing Plant - SPBU
17.	Lubai	<ul style="list-style-type: none"> - PTPN VI Beringin - PT. Bumi Sawit Permai - PT. Perkebunan Mitra Ogan - PT. Kirana Permata TAC-Pertamina Retco Prima Energi - PT. Gas Negara - PT. Pertamina Divisi Panas Bumi - PT. Swasthi PM - - PT. Mitra Ogan - PT. Melar Cempiang Raja brana - CVTunas Muda II 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Lateks - Kebun Sawit - Kebun Sawit - Industri pengolahan karet - Migas - Migas - Migas - Industri Pengolahan Karet - Perkebunan - Sawit - Industri Lateks - Pekat - Industri Primer Hail Hutan Kayu (IPHHK)

Sumber : Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007

LAMPIRAN 3

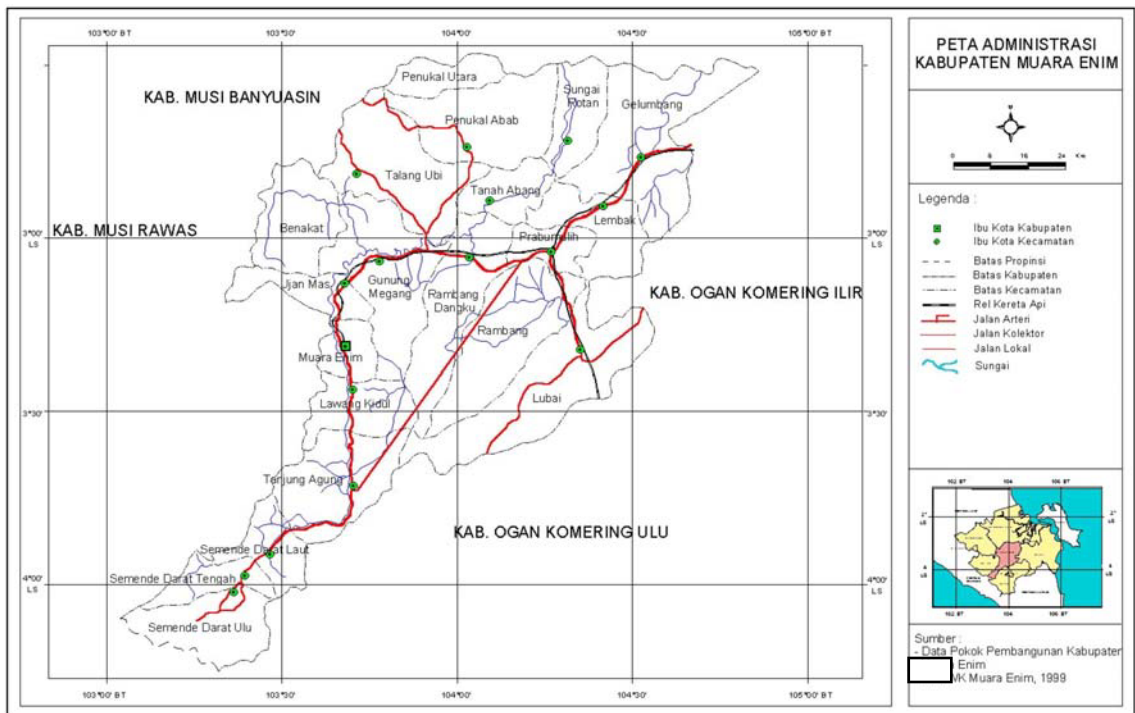
DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD) KABUPATEN MUARA ENIM

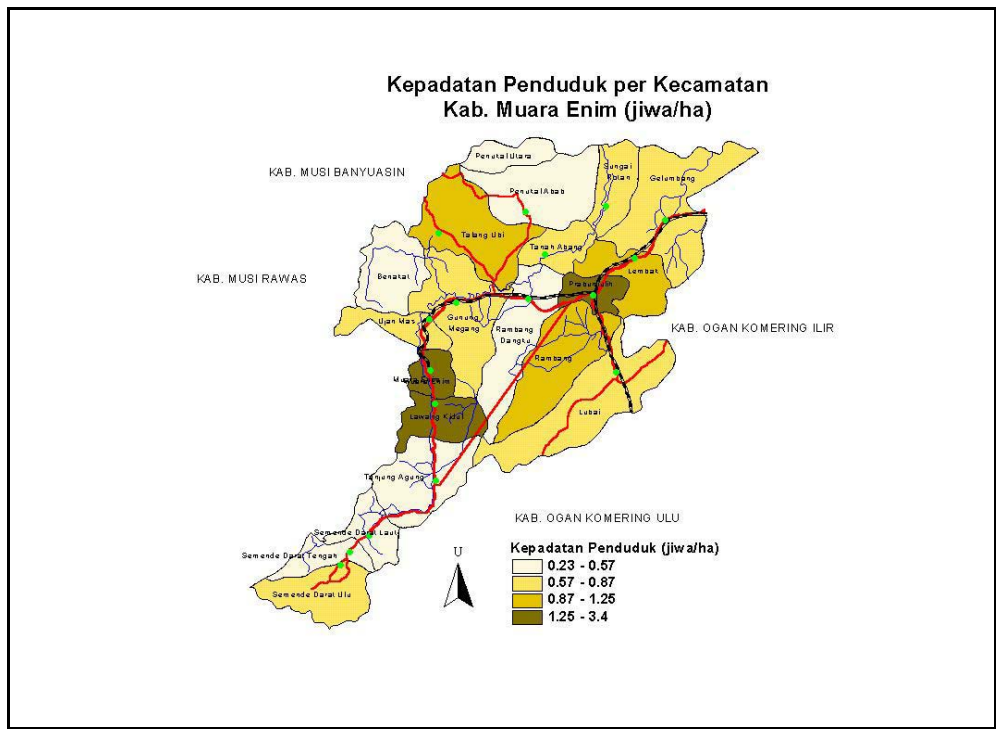
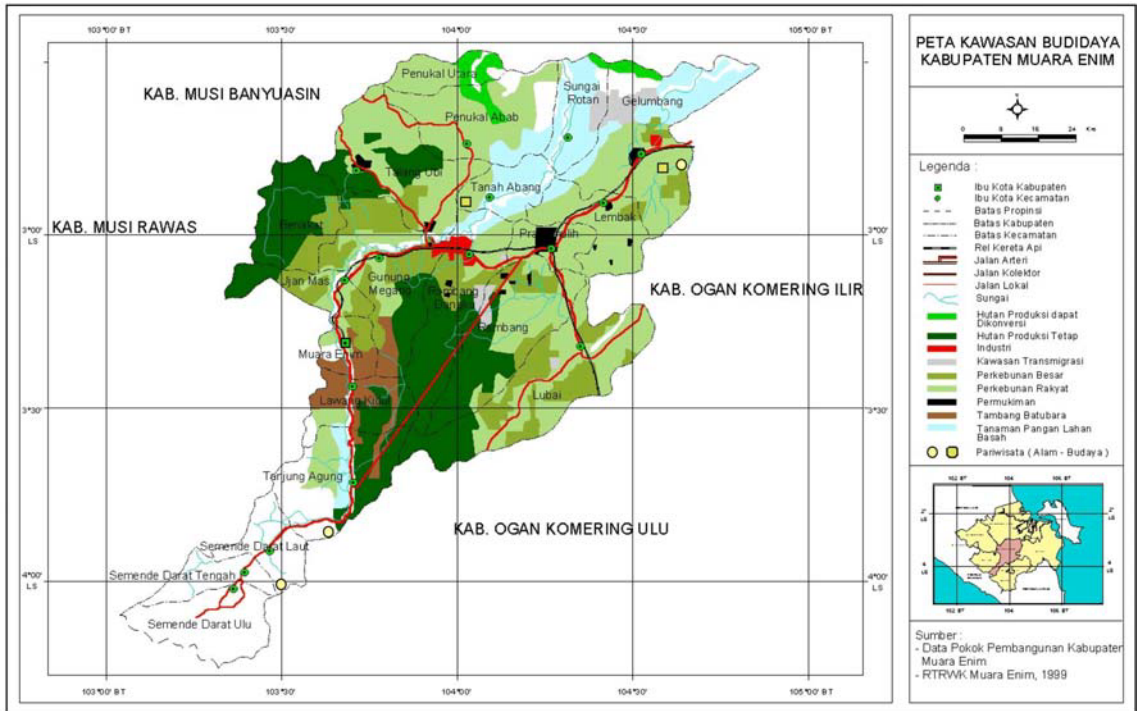
NO	NA MA	JABATAN
1.	Ir. Hj. Rosmiani Tje'Mat, M.Ed	Kepala Bapedalda
2.	Ir. Emawati, M.Si	Sekretaris Bapedalda
3.	Ir. Syamsiah	Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Bapedalda
4.	Bynna Diana, SE	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Bapedalda
5.	Amri Yunus, ST, M.Si	Kasubbid Monitoring dan Evaluasi Bapedalda
6.	Deddy Ruhul Ichsan, S.Hut	Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim
7.	Mona Lisa, ST	Staf Bidang Pemantauan dan Pemulihan Bapedalda
8.	Febri Yanti Putri Utami, ST	Staf Laboratorium Bapedalda
9.	Yulius Ceasar, SH	Staf Sekretariat Bapedalda

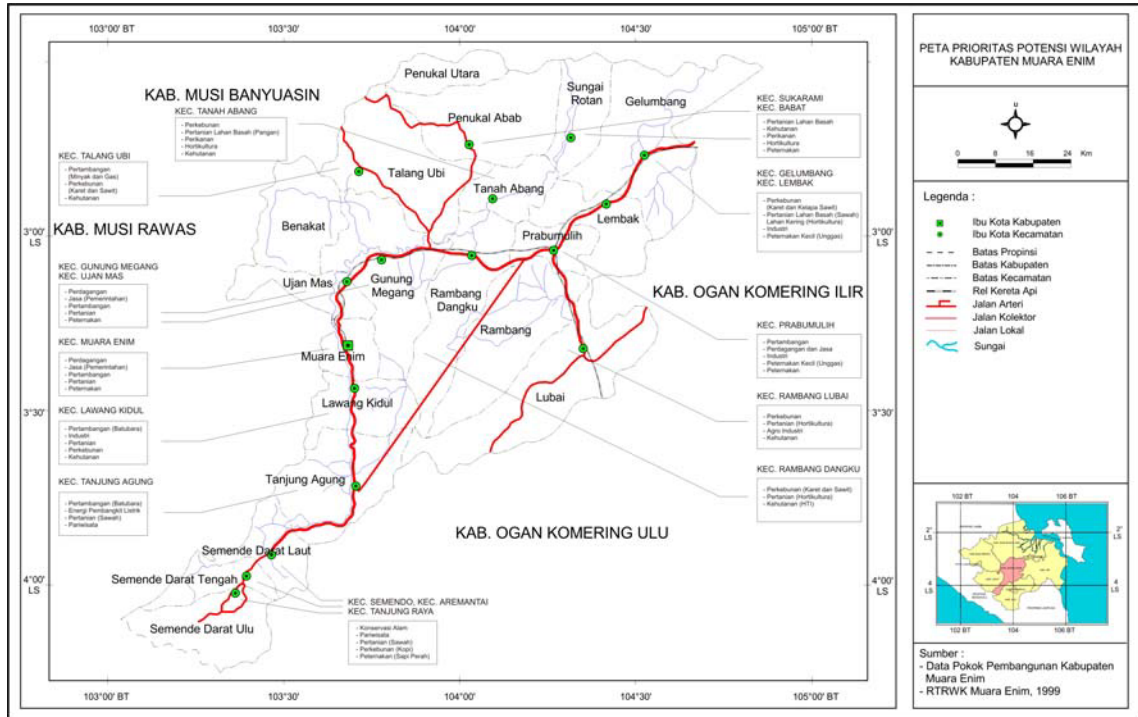
LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

(Peta Kabupaten Muara Enim)







LAMPIRAN 2

(Peta Kabupaten Muara Enim)

DAFTAR PUSTAKA

- Asdep Urusan Data dan Informasi, *Pedoman Umum Penyusunan Laporan dan Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah 2007*, Jakarta, KNLH, 2007.
- Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Sumatera, *Suara Bumi Peduli Lingkungan dan Kehidupan*, Pekanbaru, PPLH Regional Sumatera, 2007.
- Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006*, Palembang, Bapedalda Provinsi Sumatera Selatan, 2007
- Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, *Laporan Bupati Muara Enim tentang Bencana Alam Banjir di Kota Pendopo Kecamatan Talang Ubi Tanggal 17 September 2007*, Muara Enim, Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, 2007
- Bappeda Kabupaten Muara Enim, *Program Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim 2003-2008*, Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2002
- Bapedalda Kabupaten Muara Enim, *Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapedalda Kabupaten Muara Enim Tahun 2006*, Muara Enim, Bapedalda Kabupaten Muara Enim, 2007
- South Sumatra Forest Fire Management Project, *Hot Spot*. Muara Enim, SSFFMP, 2005.
- Bapedal Regional Sumatera. *Kualitas Lingkungan Sumatera 2001*. Pekanbaru, Bapedal Regional Sumatera, 2001
- UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim, *Rencana Strategis Kebersihan dan Keindahan Kota Muara Enim 2003-2008*. Muara Enim, UPTD Kebersihan dan Pertamanan Kota Muara Enim, 2003
- Rusman, Budjang Prof. Dr. Ir.MS, *Dampak Pada Tanah, Penggunaan Lahan dan Tata Ruang (Makalah Kursus Penilai AMDAL)*, Padang, PSLH Universitas Andalas, 2006
- Kemal, Badrul Mustafa Dr. Ir.DEA, *Dampak Pada Iklim dan Atmosfer (Makalah Kursus Penilai AMDAL)*, Padang, PSLH Universitas Andalas, 2006
- PTPN VII Unit Usaha Sungai Lengi, *Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha dan Atau Industri Perkebunan*, Muara Enim, PTPN VII Unit Usaha Sungai Lengi, 2007
- PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, *Laporan Limbah Cair*, Muara Enim, PT. Tanjung Enim Lestari, 2007
- PT. Medco E dan P, *Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II 2006*, Muara Enim, PT. Medco E dan P, 2007

PTPN VII Unit Usaha Sungai Lengi, *Laporan Pemantauan Kualitas Udara Emisi*, Muara Enim, PTPN VII Unit Usaha Sungai Lengi, 2007.

PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, *Laporan Pemantauan Rutin Emisi Udara*, Muara Enim, PT. Tanjung Enim Lestari, 2007

PT. PLN (Persero) Sektor Bukit Asam, *ANDAL Kegiatan Pengoperasian Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bukit Asam 4 x 65 MW*, Muara Enim, PT. PLN (Persero) Sektor Bukit Asam, 2006

PT. PLN (Persero) Sektor Bukit Asam, *Laporan Hasil Pelaksanaan RKL & RPL PLTU Triwulan III Tahun 2007*, Muara Enim, PT. PLN (Persero) Sektor Bukit Asam, 2007

PTBA, *Laporan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2007*, Muara Enim, PTBA, 2007

PT. Lingga Jaya, *Data Swapantau Limbah Cair, Udara dan Kebisingan*, Muara Enim, PT. Lingga Jaya, 2007

PT. MEDCO E & P Indonesia, *Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Blok Lematang*, Muara Enim, PT. Medco E & P Indonesia, 2006

Data-data dari Dinas Instansi Terkait dalam Kabupaten Muara Enim.

